

# **Pengembangan Kawasan Rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan**

**(Implementasi Perpres Nomor 87 Tahun 2021)**

Djoko Hartoyo, dkk

**Deputi Bidang Koordinasi  
Infrastruktur dan Transportasi,  
Kementerian Koordinator Bidang  
Kemaritiman dan Investasi  
Republik Indonesia**

# **Pengembangan Kawasan Rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan**

(Implementasi Perpres Nomor 87 Tahun 2021)

**Penulis:** Djoko Hartoyo, Sri Fatkhianti Sa'diah, Supardiono, Dhodik Christanto D, Erlangga Putra U, Thias Anggoro, Narulita Altari, Krisnanto Nugroho, Joyce Dearn S, Nadya Rachmi, dan Nurcahyani Wulandari

**ISBN: 978-623-88467-3-3**

**Editor:** Djoko Hartoyo dan Faris Sabilar Rusydi

**Design Graphic:** M Kholid Afandi

**Quality Control:** Faris Sabilar Rusydi

Pertama kali diterbitkan dan dicetak dalam Bahasa Indonesia oleh:  
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi,  
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi  
Republik Indonesia, 2023

Hak cipta dilindungi Undang-undang  
dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Perpustakaan Nasional:

Katalog Dalam Terbitan (KDT)  
*Pengembangan Kawasan Rebana  
dan Jawa Barat Bagian Selatan  
(Implementasi Perpres Nomor 87 Tahun 2021)*  
x+310 halaman, 14 cm x 21 cm

**Sambutan**  
**Deputi Bidang Koordinasi**  
**Infrastruktur dan Transportasi**  
**Kementerian Koordinator Bidang**  
**Kemaritiman dan Investasi RI**

Pertama-tama, saya menyambut gembira atas diterbitkannya buku Pengembangan Kawasan Rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan (Implementasi Perpres Nomor 87 Tahun 2021). Perkenalkan saya dalam kesempatan ini untuk menyampaikan apresiasi kepada Dr Djoko Hartoyo yang sukses menyusun dan merampungkan buku yang memaparkan berbagai kemajuan dalam pengembangan Kawasan Rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan (Jabarsel), dua kawasan ekonomi baru yang menjadi prioritas pembangunan Indonesia saat ini.

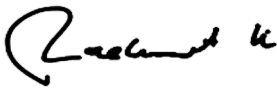
Dari buku ini, tampak jelas kemajuan dan program pengembangan dari kawasan sebagaimana amanat yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kawasan Rebana dan Jabarsel. Sebagai Asisten Deputi, penulis betul-betul memahami implementasi Perpres tersebut dan mampu menjelaskan dimanika pembangunan dengan alur yang mudah dipahami.

Dimulai dari urgensi pembangunan, rencana induk, arah pengembangan, hingga progres pembangunannya dari waktu ke waktu.

Harapan saya, buku yang ditulis dengan bahasa ilmiah populer ini bisa membangkitkan semangat dan meningkatkan kesadaran bahwa sebagai bangsa yang besar, Kawasan Rebana dan Jabarsel memiliki potensi yang besar, baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, dan keragaman yang bisa memberikan kontribusi positif bagi Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat, mandiri, dan kuat. Buku ini juga menjadi upaya nyata pemerintah, khususnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI dalam upaya memajukan Indonesia, melalui pengembangan kawasan ekonomi baru di Jawa Barat.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, bangsa Indonesia, dalam menapaki era new normal ini dan berhasil merealisasikan cita-cita sebagai bangsa maritim yang besar.

Jakarta, Oktober 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rachmat K'.

Rachmat Kaimuddin



## **Sekapur Sirih Dari Penulis**

Buku Pengembangan Kawasan Rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan (Implementasi Perpres Nomor 87 Tahun 2021) ini merupakan catatan Iptek populer yang disusun penulis sejak September 2021 hingga September 2023. Artikel-artikel yang tertuang dalam buku ini sebagiannya merupakan kumpulan tulisan yang pernah diterbitkan di website Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI dan juga telah tayang di kanal media *Sains Indonesia*, yang mengulas perkembangan Iptek kemaritiman.

Sebelumnya pada 9 September 2021, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Dalam instruksinya, Presiden RI menegaskan bahwa Percepatan kedua kawasan itu dilakukan melalui penyediaan infrastruktur untuk menumbuhkan investasi yang diharapkan berdampak pada peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Kawasan Rebana merupakan wilayah di Bagian Utara dan Timur Provinsi Jawa Barat yang meliputi tujuh daerah kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Sumedang, Majalengka, Cirebon, Subang, Indramayu, dan Kuningan, serta Kota Cirebon. Sedangkan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Jabarsel) meliputi enam kabupaten, yaitu Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Pangandaran. Amanat Perpres juga menyebut bahwa Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Jabarsel harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi.

Pengembangan Kawasan Rebana dan Jabarsel terus berlanjut dari waktu ke waktu. Di Kawasan Rebana, terdapat Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang dan Bandar udara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka yang berfungsi sebagai pusat konektivitas dan logistik. Kedepannya, Kawasan Rebana diproyeksikan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Jawa Barat melalui pengembangan kawasan industri yang terintegrasi, inovatif, kolaboratif, berdaya saing tinggi, serta berkelanjutan.

Sedangkan di Kawasan Jabarsel, terdapat 81 program pengembangan kawasan yang meliputi 59 unit program pengembangan infrastruktur, lima unit program pengembangan agribisnis, 8 unit pengembangan kelautan dan perikanan, serta sembilan unit pengembangan pariwisata. Kedepannya Kawasan Jabarsel ini diproyeksikan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat melalui pengembangan kawasan pariwisata, perikanan dan kelautan, serta agribisnis.

Buku ini merupakan bagian dari ikhtiar kami dalam mendiseminasi kegiatan maupun program pengembangan yang tengah berlangsung. Buku ini juga menjadi upaya nyata dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, khususnya di lingkup Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi dalam berkontribusi, agar kebermanfaatan dari pengembangan di dua wilayah ekonomi baru tersebut dapat tersampaikan dengan baik kepada pemerintah daerah dan masyarakat luas.

Jakarta, Oktober 2023

Djoko Hartoyo

Asisten Deputy Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah, Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dan Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI

# Daftar Isi

Sambutan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia | iii

Sekapur Sirih dari Penulis | v

## Bagian 1

Urgensi Pembangunan Kawasan Rebana dan Jabarsel | 1

1. Menyusun Perpres 87 Tahun 2021 | 3
2. Di Balik Perpres 87 Tahun 2021 | 13
3. Masa Depan Jabar Ada di Rebana dan Jabarsel | 23
4. Sinergi dan Kolaborasi Bersama | 33
5. Untuk Perekonomian Jabar Yang Lebih Merata | 41

## Bagian 2

Gambaran Umum dan Arah Pengembangan Kawasan Rebana dan Jabarsel | 55

6. Provinsi Jawa Barat Dalam Angka | 57
7. Tantangan Jawa Barat di Masa Depan | 73
8. Menuju Pantura Jabar yang Semakin Mandiri | 83

- 9. Menuju Jabarsel yang Semakin Berkilau | 101
- 10. Arah Pengembangan Kawasan Rebana | 121
- 11. Arah Pengembangan Kawasan Jabarsel | 135
- 12. Rencana Induk Kawasan Rebana | 147
- 13. Rencana Induk Kawasan Jabarsel | 161

## Bagian 3

### Progres Pembangunan Kawasan Rebana dan Jabarsel | 181

- 14. Dukungan Lintas Sektor | 183
- 15. Pentingnya Sinergi dan Kolaborasi | 203
- 16. Pembangkit Listrik Ramah Lingkungan di Jabarsel | 209
- 17. Membangun Politeknik Manufaktur Kampus 2 di Majalengka | 221
- 18. Mengembangkan Kawasan Agribisnis Pertanian | 233
- 19. Studi Sosial Pengembangan Wilayah | 249
- 20. Kawasan Industri Subang Smartpolitan | 265
- 21. Mengembangkan Desa Digital | 275

## Bagian 4

### Monitoring dan Evaluasi | 283

- 22. Terus Mengawasi dan Mengevaluasi | 285
- 23. Catatan Dari Cilacap Hingga Pangandaran | 297



# Bagian 1

Urgensi Pembangunan  
Kawasan Rebana dan  
Jabarsel





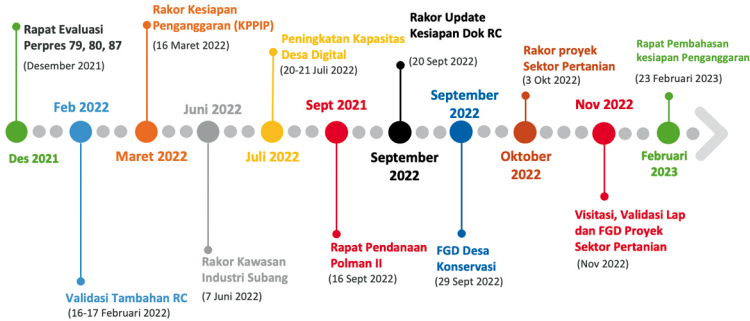
## Menyusun Perpres 87 Tahun 2021

*Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2021 disusun melalui serangkaian tahapan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, mulai dari usulan-usulan kegiatan pemerintah kabupaten maupun kota, hingga verifikasi di tingkat pemerintah pusat.*

Suatu waktu di awal 2021, Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) yang saat itu dijabat oleh Ayodhia Gehak Lakunamang Kalake menugaskan Asisten Deputy Infrastruktur Pengembangan Wilayah (Asdep IPW) Djoko Hartoyo untuk menjajaki kemungkinan mengembangkan kawasan ekonomi baru di Jawa Barat (Jabar). Asdep Djoko menindaklanjuti arahan tersebut dengan berkomunikasi bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Bappeda Jabar).

## GAMBARAN UMUM PERPRES NO 87 TAHUN 2021

(Beberapa Kegiatan Pengawasan Perpres 87/2021 bersama Kemenko Perekonomian, Setkab, dan K/L Terkait)



Beberapa kegiatan pengawasan Perpres 87/2021 yang dilakukan Kemenko Marves bersama dengan Kemenko Perekonomian, Setkab, dan K/L terkait.

Saat itu Kepala Bappeda Jabar dinahkodai oleh Ferry Sofwan Arif, yang baru sekitar satu bulan menjabat. Asdep IPW Djoko Hartoyo, yang mewakili Kemenko Marves, dan Kepala Bappeda Jabar, Ferry Sofwan Arif kemudian menggelar pertemuan sebagai tindak lanjut rencana tersebut. Dalam pertemuan strategis itu, Ferry mengusulkan agar pemerintah pusat mendorong pembangunan Jalur Tengah Selatan (JTS) Jawa Barat. Menurut Ferry, JTS sangat penting untuk mempersingkat waktu tempuh dari Sukabumi hingga Ciamis, dari Lengkonng sampai Kertahayu. JTS juga dinilai krusial dalam mengembangkan ekonomi dari tengah hingga selatan Jabar.

Secara umum, Bappeda Jabar mengusulkan sejumlah pengembangan wilayah di Jabar yang masuk dalam Kawasan Rebana. Namun selain Rebana, Asdep IPW Djoko Hartoyo juga melihat ada peluang untuk mengembangkan



Rapat Validasi Tambahan Pemeriksaan *Readiness Criteria* (RC) 30 Proyek/Program P1 dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2021, 16-17 Februari 2022.

Kawasan Jabar Bagian Selatan sebagai sumber ekonomi baru di Jabar. Termasuk di dalamnya antara lain pembangunan JTS Jabar. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves mendapat respon cukup baik dari Bappeda Jabar. Diskusi terkait pengembangan wilayah di Jabar ini semakin intens bergulir hingga usulan-usulan tersebut akhirnya diteruskan ke rapat tingkat Menko.

Jauh sebelum rapat tingkat menko itu dilakukan, Bappeda Jabar bersama Asdep IPW Kemenko Marves lebih dulu menjangring aspirasi dan usulan dari setiap pemerintah daerah di tingkat kota maupun kabupaten. Setiap usulan dicatat dan didiskusikan secara komprehensif. Akhirnya pada 16 Februari 2021, usulan itu disampaikan dalam Rapat Menko Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Provinsi Jawa Barat dengan arahan menyusun Peraturan Presiden (Perpres) Kawasan Rebana dan Jabar Bagian Selatan.

Inisiasi pengembangan dan pembangunan Kawasan Rebana dan Jabar Bagian Selatan (Jabarsel) itu lalu berlanjut dalam Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden RI Joko Widodo yang digelar pada 29 Maret 2021. Saat itu Presiden Joko Widodo memberi arahan agar kami menindaklanjuti dan menyiapkan rancangan Perpres mengenai percepatan pembangunan Jawa Barat, khususnya Rebana dan Jabarsel. Presiden kemudian memberi perintah kepada Sekretariat Kabinet RI (Setkab) untuk mengawal proses pembuatan Perpres tersebut.

Sebelum Ratas itu, Kemenko Marves bersama-sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Ekon), Setkab, dan Bappeda Jabar telah mulai menyusun batang tubuh rancangan Perpres. Rapat pertama digelar pada 4 maret 2021 dengan agenda Pembahasan Draft Rancangan Perpres. Rapat lalu dilanjutkan pada 5 April 2021 yang lantas mengerucut pada usulan untuk segera melakukan validasi dan kunjungan ke lapangan. Semua pihak lalu berkoordinasi. Pada 19-23 Mei 2021, kami



Rakor Pembahasan Tindaklanjuti Penyiapan Dokumen *Readiness Criteria* (RC) Proyek P1. Garut, 20 September 2022.

mengunjungi Kawasan Jabarsel. Pada 26-28 Mei 2021, kami giliran melakukan kunjungan ke Kawasan Rebana.

Hasil kunjungan lapangan itu membuahkan banyak hasil, temuan, dan usulan terkait program. Sehari berselang, atau tepatnya pada 29 Mei 2021, Kemenko Marves, Kemenko Ekon, Setkab, Bappeda Jabar, dan juga Kementerian/Lembaga (K/L) terkait bisa menggelar diskusi untuk mematangkan batang tubuh Rancangan Perpres. Pada 4-5 Mei 2021, Perpres pengembangan Kawasan Rebana dan Jabarsel semakin final dengan adanya lampiran Perpres yang digodog bersama-sama dengan lintas K/L. Setelah pengecekan dan validasi ulang pada 24 Juni 2021, Perpres Pengembangan Kawasan Rebana dan Jabarsel akhirnya difinalkan dan mendapat penetapan/legalisasi Perpres pada 10 September 2021. Perpres ini akhirnya selesai dan rampung dalam waktu 9 bulan.

Sejak Perpres yang kemudian ditetapkan sebagai Perpres Nomor 87 Tahun 2021 itu selesai, kami di Kemenko Marves mulai tancap gas. Salah satunya dengan menggelar sejumlah Rapat Koordinasi tentang Pembahasan Rencana Aksi/Kegiatan. Pada 18 Oktober 2021 digelar Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Kerja oleh Kemenko Ekon. Sedangkan pada 27 Oktober 2021, digelar Rapat Persiapan K/L oleh Kemenko Marves. Selain itu dilakukan pula Rapat Koordinasi Pembahasan Kesiapan Proyek Prioritas. Pada 11-12 November 2021, Kemenko Marves menghelat Rakor Persiapan K/L dan Pemda terhadap pelaksanaan Perpres 87/2021. Juga pada 29 Desember 2021, Kemenko Ekon menggelar Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Pelaksanaan Perpres ini.



Rapat Pembahasan Program/Proyek Kementerian Pertanian dalam mendukung Perpres 87 tahun 2021. Kementerian Pertanian – Jakarta, 3 Oktober 2022.

Pada prosesnya, Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Jabasel kemudian ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Perpres Nomor 87 Tahun 2021 dan Permenko Ekon Nomor 21 tahun 2022. Kemenko Marves sebagai kementerian yang memiliki fungsi koordinasi ditugaskan melaksanakan setidaknya tiga hal dalam upaya percepatan pengembangan Kawasan Rebana dan Jabarsel ini. *Pertama*, melaksanakan pendampingan atas ketersediaan dokumen perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan proyek dan program dalam Rencana Induk/Aksi. *Kedua*, melakukan penyelesaian hambatan dan pengawasan percepatan pembangunan Kawasan Rebana dan Jabarsel. *Ketiga*, melaksanakan perubahan proyek dan program dalam Rencana Induk, monitoring, evaluasi dan pelaksanaan pelaporan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan Kawasan Rebana dan Jabarsel.

Mulai Januari 2022 hingga Februari 2023, telah dilakukan beberapa kegiatan untuk mengawal Perpres 87/2021 bersama Kemenko Ekon, Setkab, dan K/L terkait. Antar lain validasi kelayakan proyek, rakor kesiapan penganggaran,

hingga visitas dan validasi lapangan dan berbagai FGD maupun rakor lainnya. Namun demikian, pelaksanaan dan implementasi Perpres ini tidak serta merta berjalan mulus. Beberapa tantangan mulai muncul seiring dengan waktu, diantaranya dari sisi implementasi program prioritas yang tidak segera bisa dilakukan karena berbagai alasan, hingga renstra K/L yang lebih dulu terbit dibandingkan dengan Perpres 87/2021 ini.

Tantangan implementasi Perpres 87/2021 antara lain adalah pemenuhan *Readiness Criteria* (RC) yang masih rendah. Perpres 87/2021 ini memiliki 170 proyek. Hasil Validasi yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, hanya ada 47 proyek yang telah dinyatakan memenuhi RC. Awalnya saat validasi pertama pada 17 Januari 2022, hanya ada 30 proyek P1 (prioritas pertama) yang divalidasi, dengan 5 diantaranya memenuhi kriteria RC. Kemudian pada 18 Februari 2022, terdapat 85 proyek P1 yang divalidasi, dan hasil review yang memenuhi RC total ada 47 proyek P1. Adapun proyek P1 ini diharapkan selesai paling lambat pada tahun 2024. Sedangkan proyek P2 (prioritas kedua), ditargetkan bisa terlaksana dan rampung setelah 2024.

Dalam Pasal 4 (a) Perpres 87/2021 tertulis: *Rencana Induk pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan berfungsi sebagai pedoman bagi menteri dan kepala lembaga untuk menetapkan kebijakan sektoral dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan tersebut sesuai kewenangan, yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis masing-masing kementerian/Lembaga sebagai bagian dari dokumen*





Visitasi dan Validasi Lapangan (Sumedang, Kuningan, Tasikmalaya, dan Ciamis). 26-28 Oktober 2022 dan 2-5 November 2022.

*perencanaan pembangunan. Namun Renstra K/L justru sudah lebih dulu diterbitkan sebelum terbitnya Perpres 87/2021 ini. Oleh sebab itu dilakukan penyesuaian mengacu pada Pasal 12 Perpres 87/21 yang berbunyi: Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota wajib menyesuaikan dokumen perencanaan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden ini.*

Keterpaduan lintas sektor memegang peranan penting agar pembangunan Kawasan Rebana dan Jabarsel bisa berjalan mulus dan cepat. Pelaksanaannya membutuhkan sinergi, kolaborasi, dan integrasi dari semua pihak (komunikatif dan responsif). Di sisi lain, dokumen RC juga harus dilengkapi, antara lain ketersediaan lahan, rencana tata ruang, studi kelayakan, DED, kajian amdal, semua perizinan yang diperlukan, serta dokumen lainnya yang terkait. Juga diperlukan dukungan pendanaan, baik yang bersumber dari APBN, APBD, KPBU, DAK, SBSN, dan lainnya.

Seiring berjalannya waktu, mulai dari urgensi pemulihan nasional pasca pandemi Covid-19, pembangunan Ibukota



Nusantara (IKN), dan program-program prioritas nasional lainnya, maka didasari bahwa Percepatan Pembangunan Kawasan Reba dan Jabarsel ini juga membutuhkan banyak biaya. Biaya ini tentu tidak semuanya bisa didanai oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), sehingga perlu dilakukan inovasi berbagai skema pendanaan, termasuk membuka kemungkinan kerjasama dengan investor luar negeri. Selain itu, berbagai strategi juga dilakukan agar usulan-usulan “kebutuhan” yang mendesak untuk segera dilaksanakan, bisa didahulukan pengerjaannya.

Dalam suatu Rapat Internal terkait PSN tanggal 6 September 2023, Presiden RI Joko Widodo memberikan arahan untuk memfokuskan dukungan pembiayaan tanah supaya dapat cepat disalurkan dan jangan di-*carry over* di 2023. Selain itu, perlu diprioritaskan PSN yang sudah masuk tahap konstruksi dan dapat beroperasi di tahun 2023. “Memprioritaskan pembangunan PSN yang dapat diselesaikan paling lambat semester 1 tahun 2024, serta memastikan waktu penyelesaian PSN yang telah transaksi atau sedang dalam tahap konstruksi namun tidak dapat diselesaikan pada tahun 2024 untuk dapat dipastikan kepastian terkait pembiayaan, pengadaan tanah, dan perizinannya,” demikian ujar Presiden RI.

Terkait dengan PSN ini, Kementerian PUPR melalui Menteri Basuki Hadimuljono juga memberi dukungan terkait Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR). *Pertama*, semua proyek pembangunan yang sudah selesai harus segera dimanfaatkan (bendungan, rusun, SPAM, dan lain sebagainya). *Kedua*, utamakan program



Monev Desa Digital di Desa Mekarjaya, Kabupaten Sukabumi.  
Desember 2022.

pemeliharaan infrastruktur yang telah terbangun (tanggul sungai dan pantai, jalan dan jembatan, serta lain-lain). *Ketiga*, seluruh infrastruktur baru harus langsung dapat beroperasi (SPM jalan tol, irigasi, bendungan, dan lain sebagainya). *Keempat*, utamakan program rehabilitasi (bendungan, sumur bor, sekolah, pasar, dan lain sebagainya).

Pada akhirnya, Perpres 87/2021 ini memang harus terus berlanjut. Selain karena telah tercatat sebagai PSN, Kawasan Rebana dan Jabarsel juga cukup penting untuk keberlanjutan pengembangan wilayah di Jawa Barat. Proyek P1 akan terus diusahakan agar selesai sebelum tahun 2024 berakhir, pun dengan proyek P2 yang akan didorong selesai selambatnya di tahun 2029. Impelementasi Perpres 87/2021 ini harus terus dikawal pelaksanaannya. Keberhasilan membangun Rebana dan Jabarsel sebagai kawasan industri baru di Jawa Barat pada akhirnya akan berdampak pula pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat maupun bagi peningkatan ekonomi nasional.

## Di Balik Perpres 87 Tahun 2021

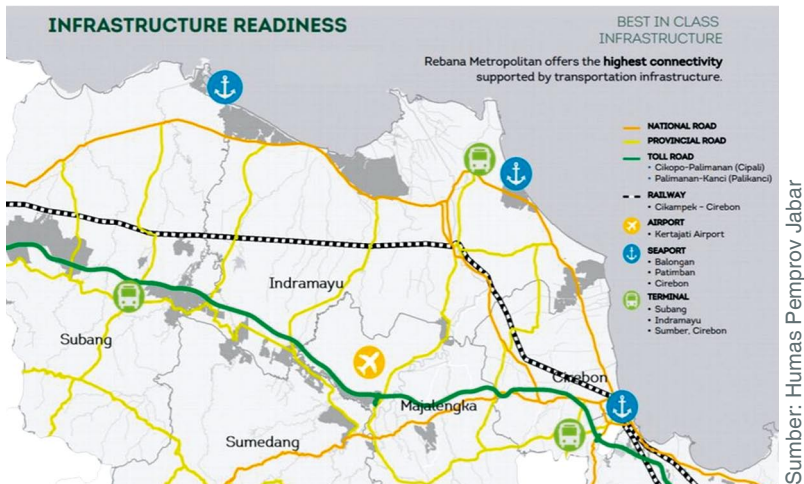
*Presiden Republik Indonesia Djoko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2021 mengenai Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Ini menjadi angin segar untuk pembangunan ekonomi di Jawa Barat yang lebih merata.*

**M**edio 9 September 2021, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2021 mengenai Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Jabarsel). Dalam lampiran Perpres itu terdapat sejumlah program dan proyek untuk pembangunan Provinsi Jawa Barat (Jabar), baik di wilayah utara maupun di selatan.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung berharap dengan diterbitkannya Perpres 87/2021 dapat mendorong akselerasi dan pemerataan pembangunan di Jabar yang

otomatis berdampak juga terhadap perekonomian nasional. Program-program maupun proyek-proyek prioritas yang tertuang dalam Perpres tersebut diharap bisa memberikan efek multiplier untuk percepatan dan pemerataan pembangunan di Jabar serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian regional yang berdampak pula pada perekonomian nasional.

Perpres 87/2021 merupakan satu dari sekian banyak Perpres yang penyusunannya relatif cepat, yaitu selama sembilan bulan, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, hingga kemudian ditetapkan sebagai Perpres. Menurut Pramono, Jabar memiliki potensi untuk dapat berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, Jabar juga merupakan provinsi tujuan utama investasi di Indonesia dengan nilai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) tertinggi.



Konektivitas di kawasan ekonomi baru Rebana Metropolitan.



Sumber: BKIP Kementerian Perhubungan

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan meninjau Pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis, (18/11/2021)

Jawa Barat juga merupakan provinsi penyumbang ekspor terbesar di Indonesia. Pada Januari-Juli 2021, tercatat nilai ekspor Jabar mencapai 18,61 miliar dolar AS atau setara 15,44 persen. Namun demikian, Jabar juga memiliki sejumlah tantangan yang harus diatasi. Di antaranya yaitu jumlah penduduk miskin yang mencapai 4,2 juta jiwa atau 8,40 persen serta angka kesenjangan (gini ratio) yang mencapai 0,412 atau lebih tinggi dari nasional yaitu 0,384 pada Semester I/2021.

Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka di Jabar medio Februari 2021 tercatat 8,92 persen atau lebih besar dari nasional yaitu 6,26 persen. Dengan terbitnya Perpres 87/2021 ini, maka pemerintah berharap bisa mengatasi



Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan melaksanakan rapat koordinasi (rakor) kertaajati tentang valuasi PT BIJB di Kantor Maritim, Kamis (16/05/2019). Dalam rakor tersebut, turut hadir Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

Sumber: Kemenko Marves RI

tantangan dan persoalan di Jabar sekaligus mendorong pertumbuhan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan kemiskinan.

Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Perpres 87/2021. Menurutnya, dalam implementasi beleid tersebut, presiden berharap tercipta sinergitas yang kuat, karena percepatan pembangunan yang dimuat di dalamnya disusun dengan pendekatan konektivitas dan keterikatan antarwilayah dan antarprogram.



Selain itu, program dan proyek yang tercantum dalam Perpres ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan kolaborasi dari dunia usaha. Untuk itu dibutuhkan iklim sehat yang mendukung kemudahan berusaha. Pemerintah daerah juga perlu melakukan sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat terdampak mengenai manfaat dari program dan proyek yang ada pada Perpres ini.

---

Foto udara proyek pembangunan Pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Rabu (18/11/2020). Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan Pelabuhan Patimban akan menjadi pusat pertumbuhan kota metropolitan baru dalam pengembangan segitiga emas Rebana, serta diharapkan dapat menciptakan kurang lebih 4,3 juta lapangan pekerjaan baru yang terdiri dari pekerjaan dalam kawasan industri dan juga sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.

Sumber: BKIP Kementerian Perhubungan



## Dinanti Sejak Lama

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) telah menanti Perpres 87 Tahun 2021 itu sejak lama. Perpres tentang pembangunan kawasan Rebana dan Jabarsel diperlukan untuk mendatangkan dana segar guna membangun sejumlah infrastruktur. Pemprov Jabar sangat optimistis pengembangan kawasan ekonomi baru itu bisa melahirkan pusat pertumbuhan ekonomi baru dan membuka jutaan lapangan kerja.

Rebana merupakan kawasan metropolitan baru di utara dan timur Jabar yang meliputi tujuh daerah, yaitu Kabupaten Cirebon, Subang, Majalengka, Indramayu, Kuningan, Sumedang, dan Kota Cirebon. Di kawasan seluas 43.913 hektare itu akan dibangun 13 kota baru





berbasis industri dalam 10-30 tahun mendatang. Sementara pembangunan kawasan selatan Jabar yang membentang dari Sukabumi hingga Pangandaran diprioritaskan di sektor transportasi, pariwisata, penanganan bencana, pengairan, serta kelautan dan perikanan.

Dalam acara Kick Off West Java Economic Society (WJES) 2021 di Bandung, 23 Agustus 2021, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyebut bahwa Rebana dan Jabarsel akan menjadi masa depan pembangunan Jabar. Perpres tentang pembangunan kedua wilayah ekonomi baru itu dibutuhkan untuk mendatangkan dana ratusan triliun rupiah dari berbagai sumber guna membangun infrastruktur di kawasan tersebut.



Presiden Jokowi meresmikan Jalan Tol Cibitung–Cilincing, Selasa (20/09/2022) pagi, di Gerbang Tol Gabus, Bekasi, Jawa Barat. Jalan tol Cibitung-Cilincing sepanjang 34 kilometer diharapkan dapat mengurangi beban angkutan barang di ruas jalan tol Jakarta-Cikampek. Tol Cibitung-Cilincing akan menjadi akses alternatif dari kawasan industri di Bekasi menuju Pelabuhan Tanjung Priok.

Sumber: Humas Setkab RI



Penerbangan jamaah umrah dari Bandara Kertajati, berangkat ke tanah suci pada Sabtu (26/11/2022). Sebanyak 375 jamaah umroh menggunakan pesawat Lion Air JT 068 (Airbus 330-300) langsung menuju Bandara Madinah.

Sumber: BKIP Kemenhub RI

“Menurut studi, kawasan ini akan menambah 3-4 persen pertumbuhan ekonomi Jabar dengan menyerap 4 juta-5 juta lapangan pekerjaan,” kata Emil, sapaan Ridwan Kamil.

Saat ini di Rebana sedang dibangun infrastruktur transportasi, seperti Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka dan Pelabuhan Patimban di Subang. Jalan tol juga dibangun untuk menghubungkan kawasan tersebut. Percepatan pembangunan di kawasan



Menurut studi, kawasan ini akan menambah 3-4 persen pertumbuhan ekonomi Jabar dengan menyerap 4 juta-5 juta lapangan pekerjaan.

---

**Ridwan Kamil**

Gubernur Jabar

selatan juga diperlukan untuk memangkas ketimpangan wilayah dengan mayoritas daerah yang infrastrukturnya maju berada di wilayah tengah ke utara Jabar. Sedangkan dari tengah ke selatan masih relatif tertinggal.

Hasil studi yang dilakukan Pemprov Jabar menyebut bahwa Jabarsel mempunyai beragam potensi untuk mendongkrak pendapatan daerah. Di antaranya yaitu komoditas perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Namun, kurang memadainya infrastruktur transportasi menjadi salah satu kendala memaksimalkan potensi tersebut. Di sisi lain, orientasi ekonomi pasca pandemi juga telah bergeser, dengan kini lebih berfokus pada sektor pangan, kesehatan, ekonomi digital, dan pariwisata.



Kendaraan melintas di terowongan  
Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan  
(Cisumdawu), Kabupaten Sumedang,  
Jawa Barat, Senin (7/11/2022). Tol ini  
menjadi salah satu infrastruktur pendukung  
kawasan Rebana Metropolitan.

Sumber: TEMPO/Prima Mulia

## Masa Depan Jabar Ada di Rebana Dan Jabarsel

*Kawasan Rebana dan Jalur Selatan merupakan masa depan Jawa Barat. Di Rebana dan Jabar Bagian Selatan tersimpan ragam potensi yang belum dimaksimalkan. Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara berkelanjutan diharapkan bisa mendorong kesejahteraan warga.*

**K**awasan industri Rebana, yang merupakan akronim dari Cirebon-Patimban-Kertajati dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan diproyeksi akan menjadi masa depan Jawa Barat. Masa depan disini berarti bahwa Rebana dan Jabarsel dipersiapkan untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan industri dengan salah satu indikatornya adalah kehadiran infrastruktur. Beragam kebijakan hingga beragam infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, serta bandar udara sudah lengkap tersaji di sana.



Caption: Presiden RI Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), Selasa, 11 Juli 2023. Peresmian dilakukan di Terowongan Kembar (Twin Tunnel), tepatnya di ruas KM 169, Desa Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Kawasan Rebana ibarat segitiga yang menghubungkan Cirebon, Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, dan Bandara Internasional Jabar Kertajati di Majalengka. Kawasan industri ini meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Subang, dan Sumedang. Sementara Jabarsel memiliki banyak potensi dari sektor pariwisata, perikanan, dan agribisnis yang meliputi Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Pangandaran, Ciamis, Tasikmalaya, dan Garut.



Pertengahan Juli 2023, Jalan Tol Cileunyi–Sumedang–Dawuan (Cisumdawu) sudah tersambung dan beroperasi. Keberadaan Tol Cisumdawu membuat durasi perjalanan dari Bandung ke Cirebon menjadi lebih singkat, yaitu hanya 90 menit dari yang biasanya tiga jam. Bahkan sebelum ada Tol Cipali (Cikopo-Palimanan), perjalanan Bandung-Cirebon umumnya ditempuh dalam waktu enam jam.

Beroperasinya Tol Cisumdawu yang dicanangkan sejak 2011 itu juga memudahkan akses warga dari Bandung dan sekitarnya ke Bandara Kertajati di Majalengka. Sebelumnya, waktu tempuh dari Bandung ke bandara bisa mencapai dua jam. Dengan Tol Cisumwadu, kini warga hanya membutuhkan kurang dari satu jam. Di sisi lain, sejak September 2023, jumlah penerbangan dari Bandara Kertajati juga mulai ramai.

---

Uji Laik Fungsi (ULF) Jalan Tol Cisumdawu Seksi I Cileunyi - Pamulihan (11,45 Km) yang dilaksanakan oleh tim evaluasi yang terdiri dari unsur Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Korps Lalu Lintas Kepolisian RI, pada 17-18 Januari 2022.

Sumber: BPJT – Kementerian PUPR



Ke depannya, Bandara Kertajati yang mampu menampung hingga 22 pesawat itu juga akan menggantikan peran Bandara Husein Sastranegara Bandung. Sehingga nantinya warga Bandung dan sekitarnya akan datang dan bepergian dari Bandara Kertajati. Lebih dari itu, Bandara Kertajati juga terintegrasi dengan pengembangan aerocity atau kota bandara seluas 3.480 hektare, meliputi apartemen, pabrik, pergudangan, hingga perkantoran.

Selain bandar udara jalan tol, Rebana juga memiliki Pelabuhan Patimban yang berkelas ekspor. Pelabuhan ini dapat menampung kontainer 250.000 Teus dan kendaraan sebanyak 218.000 CBU (*completely built up*). Pelabuhan Patimban diyakini mampu mengurangi kepadatan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pemerintah juga

---

Pengoperasian Jalan Tol Akses Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati sepanjang 3,38 Kilometer (km). Pembangunan Jalan Tol Akses Bandara Kertajati selesai September 2021 dan telah dilakukan Uji Laik Fungsi dengan diterbitkan Sertifikat Laik Operasinya pada 6 Desember 2021.

Sumber: BPJT – Kementerian PUPR







Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik Kepala Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (BP Cekban) dan Kepala BP Kawasan Metropolitan Rebana di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis 27 April 2023. Pelantikan tersebut disaksikan Asisten Deputy Infrastruktur Pengembangan Wilayah Kemenko Marves, Djoko Hartoyo.

Sumber: Dokumentasi Asdep IPW Kemenko Marves

akan terus menambah infrastruktur, seperti Tol Patimban, Tol Terisi–Losarang (Indramayu), rel kereta api Kertajati–Subang, hingga transportasi publik Cirebon Raya–Kertajati.

Pemerintah juga telah membentuk Badan Pengelola Kawasan Metropolitan Rebana. Badan ini berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mempercepat pengembangan kawasan. Badan tersebut juga diharapkan bisa memaksimalkan potensi ekonomi di daerah. Di Kota Cirebon misalnya, kendati luasnya hanya 37 kilometer persegi, namun Kota Cirebon merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di Jabar Bagian Timur yang memiliki puluhan hotel, restoran, hingga pusat perbelanjaan.



Sedangkan di Kabupaten Indramayu, terdapat potensi yang sangat besar, terutama dari sisi pertanian dan perikanan. Setiap tahunnya, produksi beras di Indramayu mencapai 1,3 juta ton, sedangkan perikanan 175.261 ton. Namun konektivitas masih menjadi kendala. Sebab itulah jalan tol dari Kertajati menuju Indramayu akan dibangun pada 2024-2029 untuk memudahkan mobilitas barang. Sekitar 20.000 hektare lahan industri juga disiapkan.



Suasana pengunjung menikmati senja di Sunset Point Pantai Pangandaran, Jawa Barat (18/12/2023).

Sumber: Dok Asdep IPW  
Kemenko Marves RI

Di Majalengka, dampak pembangunan kawasan Rebana mulai terasa. Sejumlah pabrik tekstil dan produk tekstil yang sebelumnya berlokasi di Jabar Bagian Utara dan Bandung kini pindah ke sana. Total hingga akhir September 2023, ada 61 industri dengan serapan tenaga kerja 68.000 orang. Pengangguran di Majalengka pun berkurang. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Majalengka kini membuka pintu selebar-lebarnya untuk investor.

Sementara di jalur selatan, tepatnya di Jawa Barat Bagian Selatan (Jabarsel), daerah ini kaya akan potensi keindahan alam, perkebunan, perikanan, hingga energi baru terbarukan. Pemerintah terus mendorong agar terjalin sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk memanggungkan keunggulan tersebut. Beberapa yang didorong adalah implementasi dari program pemerintah yang sudah ada, antara lain Korporasi Petani, Rumah Produksi Bersama, serta Petani Milenial dan Desa Digital.

Di Jabarsel terdapat destinasi wisata populer seperti Pantai Palangpang dan Geopark Ciletuh di Sukabumi, hingga Pantai Pangandaran. Dari sisi perikanan, data dari



Dinas Kelautan dan Perikanan Jabar mencatat, dari 10.000 hektare lahan tambak udang yang saat ini tersedia, baru ratusan hektare saja yang dikembangkan. Adapun investor dalam maupun luar negeri sudah banyak yang berminat mengembangkannya. Beberapa petani milenial juga dilatih dan dilibatkan untuk memanfaatkan potensi perikanan di Jabarsel. Mereka belajar cara budidaya hingga pemasaran berbasis teknologi.

Di Jabarsel juga terpetakan banyak potensi dari energi terbarukan, seperti matahari dan angin. Untuk hal ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jabarsel. Beberapa proyek yang dinantikan adalah pemanfaatan pembangkit listrik tenaga bayu.

Pembangunan infrastruktur jalan juga digenjot untuk mendongkrak wisata, khususnya dari sisi aksesibilitas. Dari Bandung menuju Ciletuh misalnya, menghabiskan waktu 6-7 jam. Durasi waktu tersebut akan berkurang jika kelak Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) telah sepenuhnya



---

Proyek Strategis Nasional (PSN)  
Bendungan Cipanas di Kabupaten  
Sumedang, Jawa Barat untuk Kawasan  
Cirebon-Patimban-Kertajati (Rebana).

Sumber: ANTARA/Aji Cakti





Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah Kemenko Marves, Djoko Hartoyo melakukan kunjungan kerja ke Desa Bantaragung di Kabupaten Majalengka pada Jumat, 14 April 2023 untuk menindaklanjuti pengembangan Desa Konservasi di Majalengka.

rampung dan beroperasi. Pemerintah juga akan terus mendorong agar dari sisi aminitis maupun atraksi wisata di Jabarsel terus bertumbuh.

Pembangunan Rebana dan Jabarsel tentu membutuhkan infrastruktur, intensif bagi investor, hingga institusional yang efektif. Adanya Badan Otorita yang membantu Pemda, serta peran serta Perguruan Tinggi, akan mewujudkan sinergi dan kolaborasi pemanfaatan kawasan industri sekaligus meningkatkan kualitas SDM dan mengurangi ketimpangan. Data Badan Pusat Statistik per Maret 2023 mencatat, ketimpangan ekonomi di Jabar menyentuh 0,425 poin. Rasio Gini di Jabar menjadi tertinggi ketiga di Indonesia setelah Daerah Istimewa Yogyakarta (0,449 poin) dan DKI Jakarta (0,431).

## Sinergi Dan Kolaborasi Bersama

*Kawasan Rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan merupakan proyek prioritas nasional. Pembangunan proyek infrastruktur tersebut tertuang dalam usulan proses verifikasi dua kementerian koordinator yang dilaksanakan di awal tahun 2021.*

Rencana pembangunan proyek prioritas infrastruktur kawasan Cirebon, Patimbang, Kertajati (Rebana) dan Jawa Barat bagian selatan sudah terjalin sejak lama. Medio 2021, ide untuk mengembangkan kawasan ekonomi baru di Jawa Barat (Jabar) itu kembali mengemuka. Pembangunan proyek infrastruktur di Kawasan Rabana dan Jabarsel tertuang dalam usulan proses verifikasi dua kementerian koordinator (Kemenko), yaitu Kemenko Kemaritiman dan Investasi serta Kemenko Perekonomian yang dilaksanakan selama pada 26-28 Mei 2021.

Usulan-usulan yang tampak dari proses verifikasi tersebut kemudian dimasukkan dalam lampiran Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan

Kawasan Cirebon-Patimban-Kertajati dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Selain dua Kemenko, proses verifikasi lapangan juga diikuti oleh pejabat dari kantor Sekretariat Kabinet, Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat, Pemkab Majalengka, Pemkab Indramayu, Pemkot Cirebon, Pemkab Kuningan, Pemkab Subang serta direksi PT Bandara International Jawa Barat (BJIB).

Selama tiga hari tersebut, semua pihak yang terlibat melakukan verifikasi atas semua usulan yang diberikan oleh rekan-rekan di Pemerintah Daerah. Selain itu, pemerintah pusat juga melihat signifikansi usulan-usulan proyek infrastruktur tersebut dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di daerah. Semua proyek yang diusulkan diharapkan bisa selesai di tahun 2024. Sementara usulan yang sifatnya baru dan membutuhkan upaya percepatan akan segera dikerjakan bersama-sama bersama kementerian terkait.

Sinergi dan kolaborasi antara Kemenko Ekon, Kemenko Marves, Setkab, dan Pemda menjadi poin penting, karena hampir semua kementerian yang terkait dengan kewilayahan berada di bawah koordinasi kedua kementerian. Proyek-proyek infrastruktur Cirebon-Kertajati-Patimban (Rebana) dan Jabar Bagian Selatan (Jabarsel) yang diusulkan lantas menjadi bagian dari lampiran Perpres tentang pengembangan wilayah Rebana dan Jabarsel, yaitu Perpres Nomor 87 Tahun 2021.

Asisten Deputi (Asdep) Bidang infrastruktur Pengembangan Wilayah Kemenko Marves Djoko Hartoyo





Sumber: Dokumentasi Asdep IPW Kemenko Marves

Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah Kemenko Marves, Djoko Hartoyo melakukan Kunjungan ke site proyek pengembangan Subang Smartpoliten, Senin 13 Februari 2023. Kawasan Industri Subang Smartpoliten merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tertuang dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2021.



Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah Kemenko Marves, Djoko Hartoyo melakukan Kunjungan ke site proyek pengembangan Subang Smartpoliten, Senin 13 Februari 2023. Kawasan Industri Subang Smartpoliten merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tertuang dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2021.



Humas Polman Bandung

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Marves, Ayodhia Kalake, didampingi Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah Kemenko Marves, Djoko Hartoyo melakukan Kunjungan ke Politeknik Manufaktur (Polman) Bandung, Sabtu 20 November 2021. Kunjungan ini sekaligus membahas kelanjutan pengembangan Polman Kampus 2 di Majalengka.



Humas Polman Bandung

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Marves, Ayodhia Kalake, didampingi Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah Kemenko Marves, Djoko Hartoyo melakukan Kunjungan ke Politeknik Manufaktur (Polman) Bandung, Sabtu 20 November 2021. Kunjungan ini sekaligus membahas kelanjutan pengembangan Polman Kampus 2 di Majalengka.

menyampaikan kesiapan Kemenko Marves menindaklanjuti hasil verifikasi tersebut. Menurutnya, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi bersama Biro Hukum Kemenko Marves dan Biro Hukum Pemprov Jabar sudah dalam tahap akhir menyusun batang tubuh rancangan Perpres Percepatan Pembangunan Kawasan Cirebon-Kertajati Patimban dan Jawa Barat bagian Selatan serta akan segera membentuk tim koordinasi pusat setelah rancangan Perpres ditandatangani oleh presiden.

Tim koordinasi pusat yang diketuai oleh Kemenko Marves ini akan melibatkan lintas kementerian dan lembaga terkait. Tugasnya antara lain adalah untuk melakukan pemantauan terhadap implementasi usulan proyek di kawasan Jawa Barat. Sebelum itu, Kemenko Marves juga akan memastikan Pemda menuliskan komposisi pembiayaan secara detail untuk masing-masing proyek di dalam lampiran rancangan Perpres. Dalam beberapa kondisi tertentu untuk menghemat APBN, pemerintah pusat juga akan memanfaatkan skema kerjasama dengan swasta (Public Private Partnership/PPP) atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Menurut Asdep Djoko, kendati di tengah suasana pandemi, pemerintah masih tetap melaksanakan pembangunan infrastruktur dengan berbagai penyesuaian. Kemenko Marves ingin agar semua pihak, baik pemerintah maupun swasta mau berkolaborasi terutama dalam aspek pembiayaan demi melancarkan pembangunan yang muaranya untuk kesejahteraan bersama. Akhirnya pada 9 September 2023, Perpres 87 Tahun 2021 tentang

Pengembangan Kawasan Rebana dan Jabarsel diteken Presiden Joko Widodo.

Namun jauh sebelum itu, sejumlah usulan program pembangunan infrastruktur Jawa Barat yang dikunjungipada Mei 2023 oleh Kemenko Marves, Kemenko Perekonomian, Setkab serta Pemprov Jawa Barat bersama Pemda terkait antara lain jalur tol Cisumdawu, Bandara Internasional Kertajati, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatigede, TPPAS Cirebon Raya, Jalan Lingkar timur Selatan yang berada di perbatasan antara Kabupaten Kuningan dengan Kabupaten Brebes serta Indramayu, Waduk Kuningan, ITB kampus Cirebon, Subang Metropolitan, serta rancangan kawasan industri Petrokimia di Kabupaten Indramayu.

---

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatigede merupakan proyek penyediaan air minum yang direncanakan untuk meningkatkan kapasitas penyediaan air bersih di Jawa Barat, khususnya di 5 kabupaten/kota yaitu, Kabupaten Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, dan Kota Cirebon. Air baku berasal dari Sungai Cimanuk dengan kapasitas suplai air 1.500 liter per detik.

Sumber: KPBU Provinsi Jawa Barat.



Dari tinjauan tersebut, berbagai catatan menarik dan sangat mendesak mengemuka. Diantaranya terkait sampah. Lokasi wisata seperti Majalengka dan Pangandaran memerlukan penanganan sampah secepatnya agar tidak mengganggu aktivitas wisatawan. Ada pula usulan terkait koordinasi dan pembangunan di sektor transportasi agar akses ke lokasi wisata bisa lebih mudah dan cepat.

Di Kawasan Jabarsel, Pemprov Jabar mengajukan usulan pengembangan infrastruktur yang berfokus pada pembangunan perikanan dan pariwisata. Secara detail, dalam rancangan Perpres Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Jabarsel, pemprov bersama pemkab mengusulkan beberapa proyek. Proyek tersebut antara lain rencana pembangunan Bandara Cikembar Sukabumi, penataan destinasi geyser Cisolok, pembangunan jalan lingkaran di Pelabuhan Ratu serta pengembangan pelabuhan perikanan untuk mengakomodasi 600 nelayan yang terdampak sedimentasi di wilayah pesisir.

Rencana pembangunan bandara di Sukabumi bukan hanya untuk penumpang, tapi juga logistik pengangkutan hasil perikanan. Karena di wilayah Jabarsel merupakan penghasil ikan untuk ekspor. Sementara itu, pengusulan jalan lingkaran selatan di Pelabuhan Ratu dimaksudkan untuk upaya mitigasi tsunami. Usulan lainnya adalah pembangunan pelabuhan perikanan di Santolo, Kabupaten Garut. Kemudian, daerah lain yang diusulkan adalah untuk pengembangan industri udang vaname di Tasikmalaya. Lalu di Pangandaran juga diusulkan pembangunan tempat pengolahan sampah.





Proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Cirebon Raya yang berlokasi di Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin, Desa Cupang dan Desa Walahar Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon memiliki kapasitas sampah 1.000 ton/hari. Di sekitar TPPAS akan dikembangkan sekitar 10 kota baru Segitiga Emas Rebana

“Setiap daerah sebaiknya benar-benar cermat membuat perencanaan wilayah. Agar usulan pembangunan infrastruktur antarwilayah dapat saling mendukung. Kemenko Marves bersama Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait akan menyelesaikan penyusunan rencana induk yang merupakan lampiran dari rancangan Perpres pada awal Juni agar dapat segera disepakati pada level menteri,” pesan Asdep Djoko pada 26 Mei 2021.

## Untuk Perekonomian Jabar Yang Lebih Merata

*Perpres Nomor 87 Tahun 2021 diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan dan masalah di Jawa Barat, seperti ketimpangan dan kemiskinan. Perpres ini diharap dapat membawa manfaat, kesejahteraan, dan kemakmuran, bagi masyarakat Jabar, khususnya di Kawasan Rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan.*

**K**onsep pembangunan berkelanjutan menegaskan bahwa tidak ada *trade off* antara pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Konsep tersebut mewajibkan negara untuk hadir menjalankan pembangunan ekonomi dan lingkungan secara seimbang, simultan, selaras, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Pembangunan infrastruktur mempunyai urgensi tersendiri dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi. Infrastruktur yang andal menjadi fondasi utama kekayaan dan kemandirian bangsa.



Sumber: Dokumentasi Asdep IPW Kemenko Marves

Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah, Kemenko Marves Djoko Hartoyo dalam rapat koordinasi yang membahas penganggaran untuk pelaksanaan proyek (program P1), Rabu (29-03-2023). Diskusi ini merupakan tindak lanjut dari rapat kesiapan dan prioritas anggaran tahun 2023 dan 2024.

Pembangunan infrastruktur dapat memastikan rantai pasokan barang dan jasa yang lebih baik, membuka jalan bagi bisnis yang lebih efisien, serta mengurangi disparitas harga produk di berbagai daerah. keberadaan infrastruktur yang baik juga akan memberikan efek pengganda yang signifikan untuk membuka banyak lapangan kerja dan memungkinkan orang untuk bepergian dan mencari kesempatan kerja yang lebih baik.

Di sisi lain, pembangunan ekonomi tersebut harus memperhatikan faktor kelestarian lingkungan. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan perlu dilihat dari perspektif jangka panjang demi peningkatan kualitas hidup generasi



selanjutnya. Transisi dari pembangunan konvensional ke pembangunan berkelanjutan memang tidaklah mudah. Butuh konsistensi yang luar biasa dan pendanaan yang besar.

Penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jabar Bagian Selatan diharapkan dapat menjawab tantangan dari semakin kompleksnya pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Perpres ini membuka peluang untuk menggali lebih banyak solusi pendanaan kreatif untuk proyek-proyek masa depan.

Perpres Nomor 87 Tahun 2021 mencakup progres dan proyek-proyek pembangunan di Jabar Bagian Utara (Rebana) dan Jabar Bagian Selatan (Jabarsel). Kunci keberhasilan proyek ini adalah adanya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemda Provinsi Jabar, dan Pemda Kabupaten maupun Kota. Perpres ini diharapkan bisa mengatasi berbagai tantangan dan masalah di Jabar, seperti ketimpangan dan kemiskinan.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI Luhut Binsar Pandjaitan, Pemda Provinsi Jabar bersama seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu mendukung agar semua program di dalam Perpres tersebut berjalan optimal. Sebagai amanat Presiden RI Joko Widodo, Perpres tersebut diharapkan bisa mengakselerasi investasi di Indonesia melalui pengembangan Kawasan Rebana dan Jabarsel.

“Presiden menginstruksikan pada seluruh jajaran pemerintah pusat untuk mendukung penuh pembangunan

yang dilakukan di Kawasan Rebana dan Jabar Bagian Selatan. Perpres Nomor 87 Tahun 2021 ini akan mempercepat penyediaan infrastruktur sekaligus menjadikan Kawasan Rebana dan Jabarsel sebagai tujuan utama investasi di Jabar. Kami berkomitmen untuk terus mendorong investasi yang ramah lingkungan guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” jelas Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan.

Dalam perjalanannya, pemerintah pusat dan Pemda Jabar berkonsep jika Rebana akan melompati ekonomi,

---

Pekerja mengoperasikan alat berat saat menyelesaikan proyek pembangunan Subang Smartpolitan tahap pertama di kawasan Rebana Metropolitan, Subang, Jawa Barat, Selasa (29/3/2022). Pemerintah berupaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi hingga 10 persen, pertumbuhan nilai investasi hingga 17 persen dan menciptakan kurang lebih 4,3 juta lapangan pekerjaan melalui kawasan industri dan perkotaan baru Rebana Metropolitan pada tahun 2030.

Sumber: ANTARA/M Ibnu Chazar



dan Jabarsel akan menyetarakan ekonomi. Perpres Nomor 87 Tahun 2021 diharap bisa menjawab sejumlah pekerjaan rumah yang saat ini ada di Jabar. Selama ini pembangunan wilayah di Jabar belum merata. Oleh sebab itu, implementasi pembangunan Rebana dan Jabarsel sangat dinanti untuk mewujudkan ekonomi Jabar yang semakin berdaya dan merata.

Di tingkat nasional, Jabar memegang peranan vital dalam perekonomian Indonesia. Jabar berkontribusi relatif besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional setiap tahunnya. Tahun 2021, Jabar menyumbang 13,03 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Indonesia. Jabar menempati urutan ketiga nasional setelah DKI Jakarta (17,19 persen) dan Jawa Timur (14,48 persen). Kendati demikian, Jabar memiliki posisi sangat penting dalam perdagangan internasional. Masifnya industrialisasi berteknologi mutakhir di Jabar membuatnya memiliki sumbangan besar terhadap produk-produk ekspor unggulan Indonesia. Nilai ekspor Jabar di tahun 2021 bahkan mencapai USD 33,7 miliar atau 14 persen dari total ekspor nasional. Nilai ekspor tersebut mungkin akan terus meningkat seiring dengan membaiknya situasi pandemi.

Kinerja perekonomian makro yang relatif baik itu juga disertai dengan daya tarik investasi yang tergolong tinggi. Pada tahun 2021, realisasi investasi Jabar mencapai Rp 134 triliun, tertinggi di antara provinsi lain di Indonesia. Masifnya investasi di Jabar akan memberi dampak positif secara makro. Semakin banyak investasi masuk, maka potensi menambah produksi barang dan jasa juga turut meningkat.

Semakin banyak industri yang dibuka, tentu membutuhkan tenaga kerja yang semakin banyak. Imbasnya, pengangguran akan menyusut, kemiskinan terus berkurang, kesejahteraan penduduk meningkat, dan kualitas kehidupan masyarakat Jabar secara umum akan semakin baik.

Selama ini -sebelum adanya Perpres Nomor 87 Tahun 2021- besarnya investasi yang masuk ke Jabar belum terdistribusi secara merata. Investasi hanya tertuju pada segelintir daerah utama tujuan investasi, antara lain Bekasi, Karawang, Bandung, dan Bogor. Akibatnya, daerah tujuan investasi itu menjadi kawasan padat industrialisasi yang mengundang banyak perantau dari luar daerah. Di sisi lain, kawasan-kawasan industri yang kian berkembang itu kemudian mendorong masuknya investasi lain. Bekasi, Karawang, Bandung, dan Bogor menjelma menjadi sentra ekonomi andalan di Jabar. Rata-rata nilai kontribusinya per tahun mencapai separuh lebih dari total PDRB Jabar.

---

Asdep IPW Kemenko Marves, Djoko Hartoyo didampingi Kepala KSOP Kelas II Patimban Capt Dian Wahdiana meninjau aktivitas dan pengembangan Pelabuhan Patimban Subang, Jawa Barat (21/12/2023).

Sumber: Dok Asdep IPW Kemenko Marves RI



Sejalan dengan kemajuan itu, kesejahteraan penduduk di Bekasi, Karawang, Bandung, dan Bogor pun lebih baik. Setidaknya di bidang ekonomi, pendidikan, dan juga kesehatan. Namun kinerja yang terpusat hanya pada sedikit daerah akhirnya berbuntut pada persoalan ketimpangan. Medio Maret 2023, Indeks Gini Ratio Jabar sebesar 0,425, yang menandakan adanya kesenjangan cukup lebar antara kaum kaya dan kelompok miskin. Rasio Gini di Jabar menjadi tertinggi ketiga di Indonesia setelah Daerah Istimewa Yogyakarta (0,449 poin) dan DKI Jakarta (0,431).

Tingginya ketimpangan tersebut salah satunya terjadi karena pembangunan yang tidak merata. Dari 27 kabupaten/kota di Jabar, tidak semua daerah berkembang pesat dalam hal kemajuan wilayahnya. Ada semacam dikotomi wilayah Jabar yang terbagi dua, yakni Jabar Bagian Utara dan Jabar Bagian Selatan. Jabar Bagian Utara merupakan daerah di pesisir Pantai Utara Jawa yang dinilai lebih berkembang. Sementara Jabar Bagian Selatan dinilai cenderung stagnan. Merujuk Perpres Nomor 87 Tahun 2021, wilayah Jabar Bagian Selatan terdiri atas enam kabupaten, yaitu Sukabumi, Cianjur, Ciamis, Pangandaran, Tasikmalaya, dan Garut.

Namun dikotomi tentang Jawa Bagian Utara dan Selatan itu kurang tepat. Aktivitas ekonomi dan pembangunan di Jabar faktanya masih terpusat di Jabar Bagian Tengah, seperti Bogor dan Bandung yang memang sudah menjadi kawasan industrialisasi masif. Sementara perkembangan di wilayah utara Jabar masih terbatas pada segelintir daerah





tertentu saja, seperti Karawang dan Bekasi. Adapun daerah Jabar Bagian Utara lainnya seperti Indramayu, Subang, dan Cirebon, masih relatif tertinggal.

Ketertinggalan Jabar Bagian Selatan dan sebagian Jabar Bagian Utara juga terlihat dari masih tingginya angka kemiskinan di daerah pinggiran tersebut. Data Badan Pusat Statistik tahun 2021 menunjukkan persentase penduduk miskin di sebagian besar Jabar Bagian Selatan dan Jabar Bagian Utara berada di atas rata-rata persentase penduduk miskin Jabar (8,4 persen). Bahkan beberapa daerah seperti Garut, Cianjur, Tasikmalaya, dan Indramayu, melampaui rata-rata penduduk miskin nasional (10,14 persen).



Pemandangan dari Destinasi Wisata Ciboer Pass di Desa Bantaragung, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

Sumber: Radar Majalengka

Objek Wisata Curug Putri Palutungan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Sumber: Google Maps/Tony Hidayat P

Jika dilihat dari jumlahnya, separuh lebih dari total 4,2 juta penduduk miskin Jabar ada di wilayah selatan dan sebagian wilayah utara Jabar. Tingginya kemiskinan itu sejalan dengan kualitas hidup penduduk yang juga tergolong rendah. Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada dua pertiga kabupaten/kota di Jabar berada di bawah capaian IPM provinsi (72,5 persen). Daerah-daerah itu mayoritas berasal dari Jabar Bagian Utara dan Selatan. Hanya Bandung, Bekasi, dan Depok yang memiliki capaian IPM di atas angka 80.

Situasi tersebut memberi gambaran secara nyata betapa pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah

Jabar. Sehingga program percepatan pembangunan di kawasan Rebana dan Jabar selatan melalui Perpres Nomor 87 Tahun 2021 memang mendesak untuk direalisasikan. Kawasan Rebana meliputi tujuh daerah di pesisir utara Jabar yang terdiri dari Kabupaten Subang, Indramayu, Majalengka, Sumedang, Cirebon, Kuningan, dan Kota Cirebon. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah menggelontorkan dana lebih dari Rp 390 triliun, dimana sekitar Rp 235 triliun diantaranya dialokasikan untuk kawasan Rebana dengan merencanakan 81 program pembangunan.

Kawasan Rebana akan difokuskan untuk pengembangan kawasan kota baru. Langkah ini dilakukan karena kepadatan



Wisatawan menikmati suasana sunset di Pantai Pangandaran, Jawa Barat, (18/12/2023). Wisatawan bisa menikmati suasana matahari terbit dan matahari tenggelam di Pantai Pangandaran. Beberapa tahun terakhir ini, Pemkab Pangandaran dan Pemprov Jabar merevitalisasi Pangandaran untuk kembali menarik wisatawan berkunjung.

Sumber: Dok Asdep IPW Kemenko Marves RI



penduduk di kawasan Rebana masih relatif lebih rendah. Jauh bila dibandingkan dengan Bandung, Bekasi, dan Depok yang sudah sangat padat penduduk. Di sisi lain, industrialisasi juga dialokasikan sebagai salah satu program untuk pembangunan kawasan Rebana. Lokasi yang strategis di pelintasan perdagangan kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura) berpotensi mendongkrak pembangunan di kawasan tersebut.

Pengembangan di Kawasan Jabar Bagian Selatan (Jabarsel) tidak sama dengan Rebana karena Jabarsel masih mempertahankan sumber daya alamnya. Dana sebesar Rp 157 triliun disiapkan untuk pembangunan infrastruktur serta untuk pengembangan potensi perikanan dan kelautan, maupun pariwisata. Pariwisata memang menjadi salah satu kekuatan alami yang dimiliki Jabarsel. Data Dinas Pariwisata Jabar mencatat, separuh dari total 1.984 daya tarik wisata Jabar terletak di Jabarsel. Paling banyak berada di Kabupaten Tasikmalaya dengan 408 destinasi wisata yang terdiri dari wisata alam, budaya, dan buatan. Berikutnya adalah Garut dengan lebih dari 200 daya tarik wisata.

Potensi wisata di Jabarsel tentu masih perlu dioptimalkan. Data Dinas Pariwisata Jabar mencatat hampir semua destinasi wisata yang dimiliki Jabar memiliki kunjungan wisatawan yang rendah. Contohnya adalah Tasikmalaya. Dengan banyaknya potensi wisata yang dimiliki, Tasikmalaya baru bisa menarik minat sekitar 590.000 pengunjung. Begitupun dengan Garut, yang baru mampu memikat sekitar 357.000 wisatawan. Angka kunjungan wisatawan di kedua daerah itu tertinggal jauh dari Pangandaran. Meskipun hanya memiliki separuh dari obyek

Pesona di Selatan Jawa Barat.  
Nelayan melaut dengan latar belakang  
Gunung Papandayan di Pantai  
Santolo, Pameungpeuk, Kabupaten  
Garut, Jawa Barat.

Sumber: ANTARA FOTO/ Raisan Al Farisi





wisata yang ada di Garut, Pangandaran bisa menyedot animo wisatawan lokal maupun asing hingga 3,6 juta orang. Tingginya kunjungan wisatawan di Pangandaran ini mendominasi total kunjungan ke Jabarsel yang mencapai 6,9 juta wisatawan.

Perpres Nomor 87 Tahun 2021 diharapkan bisa memangkas ketimpangan pariwisata yang terjadi di setiap wilayah di kawasan selatan Jabar itu. Berbagai metode promosi khusus dan paket-paket wisata perlu disiapkan agar destinasi-destinasi wisata potensial di Jabarsel bisa lebih dikenal secara menyeluruh. Wisata olahraga seperti tur sepeda, arung jeram, dan olahraga pantai yang kini mulai digandrungi masyarakat bisa menjadi salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk lebih mengenalkan wilayah selatan Jabar. Pembangunan wilayah di Jabarsel akan terus berfokus pada pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam.

Pembangunan kawasan Rebana dan Jabarsel pada akhirnya menuntut pembuktian untuk membangun perekonomian Jabar yang semakin berdaya dan merata. Semakin banyak wilayah di Jabar yang tumbuh dan berkembang dari potensi wilayahnya, maka Jabar secara keseluruhan akan semakin berkontribusi bagi pembangunan nasional. Industri dan segenap potensi alam yang dimiliki Jabar bisa dikolaborasikan untuk memperkuat kemajuan ekonomi daerah dan juga nasional. Itulah mengapa Perpres Nomor 87 Tahun 2021 ini menjadi penting dan semakin mendesak untuk diimplementasikan.

# Bagian 2

Gambaran Umum dan Arah  
Pengembangan Kawasan  
Rebana dan Jabarsel



## Provinsi Jawa Barat Dalam Angka

*Data terkini BPS menyebut bahwa Jawa Barat (Jabar) merupakan provinsi dengan jumlah populasi penduduk tertinggi di Indonesia. Jabar juga memiliki beragam potensi yang bisa dikembangkan. Seperti dari industri manufaktur, hingga pengelolaan SDA dan SDM untuk sektor pertanian, perikanan, kehutanan, perkebunan, dan pariwisata.*

**J**awa Barat (Jabar) merupakan provinsi dengan jumlah populasi penduduk tertinggi di Indonesia. Sensus Penduduk 2020 mencatat penduduk Jawa Barat (Jabar) pada September 2021 sebanyak 48,78 juta jiwa. Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Interim 2021-2023, maka tahun 2022 jumlah penduduk Jabar mencapai 49,40 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 2021-2022 sebesar 1,28 persen.



Data tahun 2022, jumlah penduduk laki-laki di Jabar tercatat 25,06 juta orang, atau 50,73 persen dari penduduk Jabar. Sementara penduduk perempuan di Jabar sebanyak 24,33 juta orang, atau 49,26 persen dari penduduk Jabar. Berdasarkan informasi itu, maka rasio jenis kelamin (sex ratio) penduduk Jabar sebesar 103, yang artinya terdapat 103 laki-laki per 100 perempuan di Jabar medio 2022.

Dengan luas daratan 35,38 ribu kilometer persegi, kepadatan penduduk Jabar tercatat 1.379 jiwa per km<sup>2</sup> atau meningkat dari Sensus Penduduk 2020 yang mencatat kepadatan penduduk Jabar sebanyak 1.396,52 jiwa per km<sup>2</sup>. Adapun jumlah penduduk terbanyak berada di Kabupaten Bogor, yang dihuni oleh 5,56 juta penduduk atau 11,27 persen penduduk Jabar. Sementara penduduk tersedikit ada di Kota Banjar dengan 206,46 ribu jiwa (0,42 persen).

---

Jawa Barat (Jabar) merupakan salah satu tujuan utama investasi di Indonesia. Dari Realisasi Investasi, Jabar merupakan provinsi dengan nilai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) tertinggi di Indonesia, yaitu 14,6 persen.

Sumber: Humas Pemprov Jabar





Dari sisi ketenagakerjaan, jumlah angkatan kerja di Jabar pada Agustus 2022 sebanyak 25,57 juta orang, atau naik 0,83 juta orang dibanding Agustus 2021. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat menjadi 66,15 persen dibanding 2021 yang (64,95 persen). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus 2022 tercatat sebesar 8,31 persen, atau turun dibandingkan Agustus 2021 dengan TPT sebesar 9,82 persen<sup>1</sup>.

Dari sisi kesejahteraan, jumlah penduduk miskin di Jabar medio September 2022 tercatat mencapai 4,05 juta orang (7,98 persen dari total penduduk). Dibandingkan Maret 2022, jumlah itu menurun 17,36 ribu orang. Sementara apabila dibandingkan dengan September 2021, jumlah penduduk miskin meningkat 48,76 ribu orang. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada September 2021 – September 2022, jumlah penduduk miskin perkotaan naik 68,33 ribu orang, sedangkan di perdesaan turun 19,57 ribu orang.

Apabila dilihat dari Upah Minium Provinsi (UMP), Jabar tercatat dalam empat provinsi terendah di Indonesia. Pada tahun 2020, UMP Jabar sebesar Rp 1.810.350, sedangkan pada 2019 sebesar Rp 1.668.372. Pada tahun 2020, sebanyak 18,79 juta jiwa penduduk di Jabar termasuk dalam katagori usia produktif (15-64 tahun). Angka tersebut setara dengan 70,68 persen dari keseluruhan penduduk di Provinsi Jabar.

---

1 Provinsi Jawa Barat Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Februari 2023



Dari sisi ketenagakerjaan, jumlah angkatan kerja di Jawa Barat pada Agustus 2022 sebanyak 25,57 juta orang, atau naik 0,83 juta orang dibanding Agustus 2021.

Sumber: Humas Sekretariat Kabinet RI

Dari sisi perekonomian, Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) Jabar tahun 2020 secara nominal menurun Rp 36 triliun dibandingkan tahun 2019. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB-ADHK) menurun menjadi Rp 36,34 triliun di periode yang sama. Adapun dalam lima tahun terakhir, struktur perekonomian Jabar didominasi lima lapangan usaha, yaitu Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; serta Transportasi dan Pergudangan.



Pada tahun 2020, UMP Jawa Barat tercatat sebesar Rp 1.810.350. Sebanyak 18,79 juta jiwa penduduk di Jawa Barat termasuk dalam katagori usia produktif (15-64 tahun). Angka tersebut setara dengan 70,68 persen dari keseluruhan penduduk di Jawa Barat.

Sumber: Humas Sekretariat Kabinet RI

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jabar pada tahun 2019 tercatat 5,07 persen dan menopang sebesar 13,52 persen dari perekonomian nasional. Namun pada tahun 2020, LPE Jabar berkontraksi menjadi -2,44 persen<sup>2</sup>. Sementara dari Realisasi Investasi, Jabar merupakan provinsi dengan nilai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) tertinggi di Indonesia, yaitu 14,6 persen. Jabar memang merupakan salah satu tujuan utama investasi di Indonesia.

Realisasi PMA Jabar tertinggi secara nasional mencapai Rp 69 triliun di tahun 2020, menurun dibandingkan tahun 2019, yaitu sebesar Rp 88,22 triliun. Namun realisasi investasi domestik PMDN Jabar meningkat pada 2019, dari Rp 49,25 triliun menjadi Rp 51,4 triliun. Sektor yang berkontribusi terbesar pada realisasi PMA dan PMDN tahun 2020 di antaranya sektor konstruksi (22,15 persen);

---

2 Data Badan Pusat Statistik, 2021



Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum melepas ekspor setelan jas PT Daese Garmin ke Amerika Serikat dan Korea Selatan di Jalan H Ibrahim Adjie, Kota Bandung (2020). Dari aspek perdagangan internasional, Jabar memang memiliki prestasi yang cukup baik. Sumber: Humas Pemprov Jabar

Sumber: Humas Sekretariat Kabinet RI

sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi (16,99 persen); sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran (14,15 persen); sektor kelistrikan, gas, dan penyediaan air (10,44 persen); serta sektor transportasi dan kendaraan industri lainnya (9,74 persen).

Pada akhir tahun 2020 terdapat 8.215 perusahaan/usaha dan sekitar 1.923.421 orang yang bekerja di perusahaan industri besar dan sedang di Jabar<sup>3</sup>. Jumlah tersebut terdiri atas pekerja sektor produksi yaitu pekerja yang langsung bekerja di dalam proses produksi dan pekerja

---

3 Data Badan Pusat Statistik. Survei Industri Besar dan Sedang Tahunan, 2021

administrasi serta penunjang lainnya; yaitu pekerja selain pekerja produksi seperti pimpinan perusahaan, staf direksi, pegawai administrasi, keuangan, pemasaran, kebersihan dan lain sebagainya.

Pada tahun 2020 nilai produksi di Jabar mencapai Rp 3.053.648 miliar atau terjadi kenaikan 7,08 persen dibandingkan tahun 2019. Adapun biaya investasi yang dipakai oleh seluruh perusahaan industri di Jabar pada tahun 2020 sebesar Rp 1.859.940 miliar, atau naik sebesar Rp 251.424 miliar (18,76 persen) dibandingkan tahun 2019.

Sementara dari sisi industri mikro, jumlah Industri Mikro dan Kecil di Jabar tahun 2021 meningkat menjadi 625.943 perusahaan. Jumlah tenaga kerja yang terserap juga meningkat menjadi 1.375.130 orang. Adapun jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri Mikro dan Kecil paling banyak terdapat di Kabupaten Garut sebanyak 54.630 usaha, sementara jumlah tenaga kerja terbanyak di Kabupaten Bandung yaitu sebanyak 125.926 orang.

Dari aspek perdagangan internasional, Jabar juga memiliki prestasi yang cukup baik. Volume ekspor barang asal Jabar tahun 2022 mencapai 8.644,18 ribu ton yang terdiri dari ekspor migas (514,78 ribu ton) dan ekspor nonmigas (8.129,40 ribu ton). Total nilai FOB (harga barang) ekspor Jabar menyentuh USD 38.591,03 juta atau naik 13,90 persen jika dibandingkan dengan nilai ekspor di tahun sebelumnya. Sementara itu volume ekspor (menurut pelabuhan) yang terbesar tahun 2022 adalah melalui pelabuhan Tanjung Priok yaitu 7.943,20 ribu ton dengan nilai USD 35.027,77 juta atau lebih dari 90,77 persen dari total ekspor Jabar.





Masjid Agung Al Jabbar di Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah populasi penduduk tertinggi di Indonesia. Sensus Penduduk 2020 mencatat penduduk Jawa Barat pada September 2021 sebanyak 48,78 juta jiwa.

Sumber: Herdik Herlambang/IG: @herdik

Adapun volume impor Jabar di tahun 2022 tercatat sebesar 5.251,54 ribu ton, yang terdiri dari impor barang migas (2.949,05 ribu ton) dan nonmigas (2.302,49 ribu ton). Sama halnya dengan ekspor, nilai impor juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Nilai impor pada tahun 2021 adalah sebesar USD 11.990,57 juta, sedangkan nilainya di tahun 2022 mencapai USD 14.234,16 juta atau naik sebesar 18,71 persen<sup>4</sup>.

---

4 Dokumen PEB dan PIB dari Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan, 2023



Foto diudara irigasi pertanian di areal pesawahan Purbatu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (1/11/2018). Dari sektor pertanian, Jawa Barat memiliki luas panen padi pada tahun 2022 sebesar 1.624.680,95 hektare dengan produksi 9.354.368,84 ton (angka sementara).

Sumber: ANTARA FOTO

Di sisi lain, Jabar juga memiliki potensi pengembangan di sektor pertanian, perikanan, kehutanan, dan peternakan. Dari sektor pertanian, Jabar memiliki luas panen padi pada tahun 2022 sebesar 1.624.680,95 hektare dengan produksi 9.354.368,84 ton (angka sementara). Sedangkan produksi beras tercatat 5.374.153,33 ton<sup>5</sup>. Jabar juga memproduksi

---

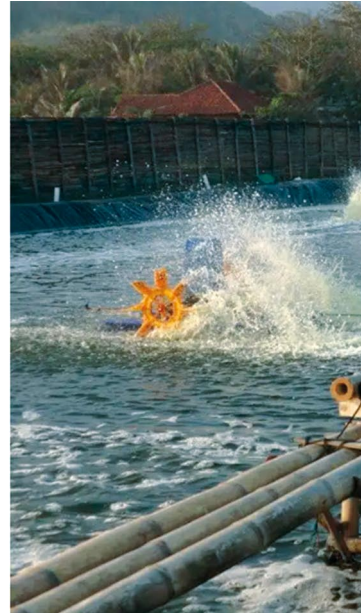
5 Provinsi Jawa Barat Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Februari 2023



buah-buahan dengan produksi yang terbesar adalah pisang (16.437.248 kwintal). Sementara itu produksi sayur sayuran di Jabar didominasi oleh cabai besar yaitu 3.390.178 kwintal. Untuk tanaman biofarmaka, produksi terbesar adalah kapulaga (89.021.626 kg) dan jahe (43.666.648 kg).

Dari sub sektor perkebunan, sampai sekarang masih mempunyai peranan yang cukup besar dalam pengembangan sektor pertanian di Jabar. Peluang bisnis perkebunan masih bisa ditingkatkan karena produksi perkebunan Jabar menunjukkan peningkatan, walaupun tidak untuk semua komoditas. Jabar memiliki perkebunan yang dikelola oleh perkebunan besar milik negara dan swasta serta perkebunan rakyat. Komoditi potensialnya adalah teh, kelapa, kelapa sawit, tebu dan karet. Pada tahun 2022, luas areal perkebunan terluas adalah kelapa (145.759,32 ha) dan luas areal Perkebunan Rakyat terkecil adalah jambu mete (100,37 ha). Sedangkan produksi hasil perkebunan rakyat terbesar yakni kelapa deres (154.512,98 ton).

Dari sektor kehutanan, area kawasan hutan di Jabar terdiri dari 3 bagian yaitu Hutan Lindung, Suaka Alam dan Pelestarian Alam, serta Hutan Produksi. Pada tahun 2022, Hutan Lindung di Jabar tercatat seluas 229.221,58 ha. Hutan Suaka Alam dan Pelestarian Alam memiliki luas 170.658,40 ha, sedangkan hutan produksi memiliki luas 176.181,88 ha.





Jabar memiliki potensi dari perikanan budidaya. Pada tahun 2021, produksi perikanan budidaya di Jabar terbesar berasal dari budidaya kolam air tenang sebanyak 503.515 ton.

Sumber: JABAR  
DIGITAL SERVICE

Data Dinas Kehutanan Jabar mencatat, produksi kayu bulat di tahun 2022 adalah 112.326,11 m<sup>3</sup>.

Dari aspek peternakan, jenis ternak yang diusahakan di Jabar berupa ternak besar, kecil, dan unggas. Pada tahun 2022, jumlah ternak sapi potong sebanyak 415.036 ekor, sapi perah 119.915 ekor, kerbau 85.042 ekor, kuda 9.313 ekor, kambing 1.428.482 ekor, domba 12.246.608 ekor dan babi 7.274 ekor. Pada tahun 2022, produksi daging ternak terbesar di Jabar adalah daging ternak sapi, yaitu 64.425.184 kg. Sedangkan produksi untuk daging unggas terbesar adalah ayam broiler/pedaging sebesar 860.156.127 kg

Dari sisi perikanan, pada tahun 2021, produksi perikanan tangkap di laut sebanyak 234.256 ton dan di perairan umum sebanyak 16.287 ton. Sedangkan produksi



Caption: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) turun dari rangkaian Comprehensive inspection Train (CIT) saat peninjauan di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (22/6/2023). Dalam kesempatan tersebut, Menko Luhut meninjau sejumlah fasilitas kereta cepat di Tegalluar.

Sumber: ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi.

perikanan budidaya di Jabar, hasil terbesar pada budidaya kolam air tenang sebanyak 503.515 ton dan hasil produksi terendah pada budidaya jaring apung laut sebanyak 1 ton.

Dari aspek konektivitas, Jabar memiliki konektivitas yang terbilang bagus, baik antar kabupaten/kota di dalamnya, maupun dengan wilayah lainnya dalam skala nasional maupun internasional. Konektivitas Jabar ini didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang terdiri dari jaringan jalan, bandar udara (bandara), pelabuhan, terminal, dan jaringan kereta api dengan kondisi yang

memadai. Secara umum, saat ini Jabar memiliki 4 (empat) bandara, 6 (enam) pelabuhan, 9 (sembilan) ruas jalan tol, serta 7 (tujuh) jalur kereta api yang tersebar di berbagai wilayah.

Berikut adalah rincian sarana dan prasarana pendukung konektivitas di Provinsi Jabar:

1. Bandara: 1) Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung, 2) Bandara International Kertajati di Kabupaten Majalengka, 3) Bandara Chakrabuwana di Kota Cirebon, dan 4) Bandara Nusawiru di Kabupaten Pangandaran.
2. Pelabuhan: 1) Pelabuhan Palabuhanratu di Kabupaten Sukabumi, 2) Pelabuhan Pertiwi di Kabupaten Subang, 3) Pelabuhan Pangandaran di Kabupaten Pangandaran, 4) Pelabuhan Indramayu di Kabupaten Indramayu, 5) Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, dan 6) Pelabuhan Cirebon di Kota Cirebon.

---

Bandar Udara Nusawiru di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Bandara ini meningkatkan konektivitas dan menggairahkan pariwisata di Jawa Barat Bagian Selatan.

Sumber: istimewa



3. Jalan Tol: 1) Ruas Tol Bocimi yang menghubungkan kawasan Bogor-Ciawi-Sukabumi, 2) Ruas Tok Cipularang yang menghubungkan kawasan Cikampek-Purwakarta-Padalarang, 3) Ruas Tol Padaleunyi yang menghubungkan kawasan Padalarang dan Cileunyi, 4) Ruas Tol Cipali-Palikanci-Pejagan yang menghubungkan kawasan Cikopo-Palimanan, 5) Ruas Tol Palikanci yang menghubungkan kawasan Palimanan-Kanci, 6) Ruas Tol Cijagan yang menghubungkan kawasan Kanci-Pejagan, 7) Ruas Tol Soroja yang menghubungkan kawasan Soreang-Pasirkoja, 8) Ruas Tol Cisumdawu yang menghubungkan kawasan Cileunyi-Sumedang-Dawuan, dan 9) Ruas Tol Japek 2 Selatan yang menghubungkan kawasan Jakarta-Cikampek.
4. Stasiun Kereta Api: 1) DAOP 1 Jakarta dengan rincian Jalur Jatinegara-Cirebon (12 stasiun) dan Manggarai-Sukabumi (20 stasiun), 2) DAOP 2 Bandung dengan rincian Jalur Cikampek-Padalarang (44 stasiun) dan Padalarang-Sukabumi (17 stasiun), serta 3) DAOP 3 Cirebon dengan rincian Jalur Cikampek-Cirebon (19 stasiun), Cirebon-Tegal (10 stasiun), dan Cirebon-Prupuk (10 stasiun).

Sarana dan prasarana konektivitas Jabar yang baik ini merupakan potensi bagi Jabar dalam upaya pengembangan wilayah. Konektivitas darat, laut, maupun udara yang saling terkoneksi satu sama lain, mampu mendukung kegiatan dasar masyarakat yang tinggal di dalamnya dan upaya pengembangan kegiatan sektoral lainnya. Dan salah satu

sektor yang sangat terpengaruh dengan adanya konektivitas mumpuni di Jabar adalah sektor pariwisata.

Dalam mendukung pembangunan ekonomi di Jabar, sektor pariwisata memiliki andil yang sangat besar. Dengan memanfaatkan berlimpahnya Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), Jabar mampu menarik para wisatawan domestik maupun asing untuk berwisata. Pertumbuhan sektor pariwisata dapat dilihat dari kunjungan wisatawan, perkembangan hotel/ penginapan dan perkembangan fasilitas akomodasi lainnya. Dalam hal ini, perkembangan wisata di Jabar menunjukkan hasil yang cukup baik.

Pada tahun 2022, jumlah akomodasi pada hotel berbintang di Jabar tercatat sebanyak 539 akomodasi dengan jumlah kamar yang tersedia 51.511 kamar dan 80.073 tempat tidur. Sementara hotel non-bintang dan akomodasi lainnya sebanyak 2,570 akomodasi dengan jumlah kamar yang tersedia 43.435 kamar dan 64.426 tempat tidur. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang di Jabar pada Desember 2022 tercatat 60,18 persen atau naik 3,54 poin dibandingkan TPK November 2022 yaitu sebesar 56,64 persen. Adapun TPK hotel non-bintang pada Desember 2022 sebesar 25,97 persen, naik 1,79 poin di bandingkan November 2022 yang tercatat 24,18 persen.

Dari aspek penyediaan sumber energi, data dari PT PLN mencatat, pada tahun 2022 sudah ada daya terpasang sebesar 30.196,9 MVA di Jabar; produksi listrik mencapai 60.209.696.947,20 KWh; jumlah pelanggan listrik sebesar 16.310.301, meningkat 3,45 persen dari tahun 2021; dan



listrik terjual sebesar 56.226.114.031,76 KWh, dengan jumlah terbesar penjualan di wilayah Cikarang sebesar 13,16 persen<sup>6</sup>.

Dari aspek expenditure, rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Jabar pada tahun 2022 adalah Rp 1.437.394, meningkat sebesar 4,72 persen dibanding tahun 2021. Dari jumlah tersebut, 50,72 persen diantaranya digunakan untuk pengeluaran bukan makanan. Dan dari komoditas bukan makanan, pengeluaran terbanyak adalah untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga. Sementara dari komoditas makanan, pengeluaran per kapita sebulan paling banyak adalah untuk makanan dan minuman jadi. Hal ini menandakan masyarakat Jabar yang sudah beralih ke ciri-ciri masyarakat kelas menengah.

---

PLTB Sidrap I di Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan. Pemerintah berencana membangun PLTB di Ciemas, Sukabumi sebagai bagian dari implementasi Perpres 87/2011 tentang Pengembangan Kawasan Rebana dan Jabarsel.

Sumber: Humas Kementerian ESDM

---

6 PT PLN Distribusi Jawa Barat. Data Badan Pusat Statistik, 2023



## Tantangan Jawa Barat di Masa Depan

*Jawa Barat (Jabar) memiliki segudang potensi untuk menjadi provinsi yang maju dan terus berkembang. Namun Jabar juga harus bisa menjawab tantangan pengembangan wilayah di masa depan. Mulai dari isu MEA, pengelolaan lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, hingga disparitas pembangunan.*

Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan kerjasama untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi di ASEAN maupun dengan kawasan di luar ASEAN. Tujuan MEA 2015 paling utama adalah menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, dengan adanya arus barang, jasa, investasi, serta tenaga terampil maupun aliran modal yang lebih bebas. ASEAN diharapkan menjadi sebuah wilayah yang kompetitif, stabil, sejahtera, dengan perkembangan ekonomi merata, kemiskinan berkurang, dan sosio-ekonomi beragam.

Setidaknya terdapat lima pilar dalam cetak biru MEA 2025, yaitu: 1) Ekonomi ASEAN yang terintegrasi dan kohesif; 2) ASEAN yang kompetitif dan dinamis; 3) Peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral; 4) ASEAN yang tangguh, inklusif, dan berorientasi serta fokus ke masyarakat; serta 5) ASEAN Global. Integrasi ini meliputi elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

Keberadaan MEA setidaknya menimbulkan tiga dampak positif bagi masyarakat Jabar. *Pertama*, dari sisi aspek perdagangan. Dengan adanya MEA, segala hambatan perdagangan menjadi berkurang, bahkan nyaris tidak ada. Jabar juga memiliki potensi untuk meningkatkan kapasitas ekspor produknya ke mancanegara dan berkontribusi meningkatkan devisa negara. *Kedua*, dari aspek investasi. MEA memberikan akses lebih mudah untuk para investor agar secara langsung dan tanpa hambatan bisa menjalankan investasinya di berbagai sektor di Jabar. MEA juga menyebabkan semakin luas dan lebarnya peluang wirausaha yang kreatif dan berdaya saing tinggi. *Ketiga*, dari bidang ketenagakerjaan. Dengan MEA, masyarakat Jabar didorong untuk terus berusaha meningkatkan kualitas dan keterampilan agar dapat bersaing dengan masyarakat dari negara ASEAN lainnya. Masyarakat Jabar juga “dipaksa” berpikir lebih terbuka terhadap perubahan sosial budaya yang ada.

Namun demikian, dalam memasuki era MEA ini, kesiapan dari Pemerintah Indonesia sangatlah dinanti, dan



Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah, Kemenko Marves, Djoko Hartoyo dalam rapat koordinasi anggaran untuk pelaksanaan proyek/program P1, Rabu 29 Maret 2023. Diskusi ini merupakan untuk percepatan implementasi Perpres 87/2021 tentang Pengembangan Kawasan Rebana dan Jabarsel.

Sumber: Dokumentasi Asdep IPW Kemenko Marves

secara khusus pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun di level kabupaten ataupun kota, baik sebagai pasar maupun tempat memproduksi. Daerah-daerah di Indonesia, termasuk Jabar, diharapkan bisa berperan aktif dan membaca peluang untuk menjadi produsen. Sebab Indonesia membutuhkan pembukaan lapangan pekerjaan. Provinsi Jabar telah siap untuk menghadapi pasar tunggal MEA. Pemerintah Jabar telah menyiapkan beberapa langkah dan antisipasi, mulai dari Sumber Daya Manusia (SDM), hingga kualitas barang dan jasa, termasuk perizinan usaha di tingkat provinsi.

Tidak hanya harus menjawab tantangan MEA, Jabar juga harus bisa mengatasi isu terkait lingkungan hidup di Jabar. Kendala lingkungan di Jabar ditandai dengan terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan. Degradasi kuantitas air yang terjadi di Jabar diantaranya diakibatkan oleh pemanfaatan air tanah secara berlebihan, berkurangnya luas kawasan resapan air (*catchment area*), dan berkurangnya fungsi sungai sebagai sumber daya air akibat pencemaran dan sedimentasi.

Degradasi kualitas air ditandai dengan banyaknya sungai yang tercemar berat. Salah satunya adalah Sungai Citarum, akibat belum terkendalinya pencemaran limbah domestik, industri, pertanian, peternakan, dan pertambangan. Penurunan

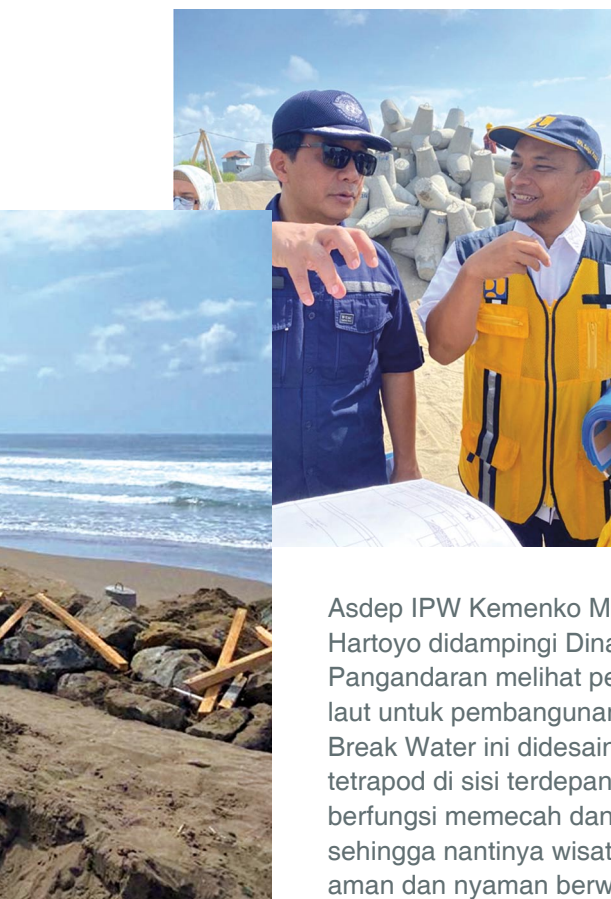


Sumber: Dok Asdep IPW Kemenko Marves RI

kualitas udara ambien di Provinsi Jabar diakibatkan oleh meningkatnya emisi kendaraan bermotor, emisi cerobong industri, dan emisi pembakaran sampah oleh masyarakat.

Peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) diakibatkan oleh meningkatnya alih fungsi lahan, aktivitas pertanian, dan peternakan yang tidak ramah lingkungan, penggunaan energi fosil berlebihan, dan limbah domestik yang tidak terkelola. Dari hasil proyeksi hingga 2030, besar emisi GRK di Provinsi Jabar pada kondisi tanpa aksi mitigasi

(*business as usual*) mencapai 135.212.417 ton eC02. Sumber emisi terbesar adalah sektor energi (41 %), sektor transportasi (31 %), sektor kehutanan (12%), sektor limbah domestik (11 %), dan sektor pertanian (5%).



Asdep IPW Kemenko Marves, Djoko Hartoyo didampingi Dinas PUPR Kab Pangandaran melihat pemanfaatan pasir laut untuk pembangunan Break Water. Break Water ini didesain dengan meletakkan tetrapod di sisi terdepan. Tetrapod akan berfungsi memecah dan meredam ombak sehingga nantinya wisatawan bisa lebih aman dan nyaman berwisata.



Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jabar tahun 2020 adalah 61,59 poin atau cukup baik dengan rincian sebagai berikut: 1) Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 42,84 poin dengan sumber pencemar adalah dari limbah domestik, industri, pertanian, peternakan, perikanan, dan pertambangan; 2) Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 79,58 poin dengan sumber pencemar yaitu emisi cerobong industri, emisi gas buang kendaraan bermotor, open burning sampah, dan kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH); 3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 42,28 poin dengan komponen tutupan lahan adalah hutan lahan kering, hutan mangrove, hutan tanaman, semak belukar, perkebunan, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campur, sawah, tambak, tubuh air, lahan terbuka, pertambangan, dan permukiman/ lahan terbangun; dan 4) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebesar 74,17 poin dengan sumber pencemar adalah limbah domestik, industri, pertanian, peternakan, perikanan, dan pertambangan.

---

Desa Wisata Bantaragung di Kabupaten Majalengka yang tengah dikembangkan lebih luas untuk pariwisata. Desa yang meraih Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022 ini diharap bisa semakin menumbuhkembangkan pariwisata di Kawasan Rebana.

Sumber: Dok Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif





Sumber: JABAR EKSPRES/Hendrik Muchlison

Potret perkampungan padat penduduk di samping megahnya gedung-gedung di Kota Bandung, Jabar. Berdasarkan data BPS tahun 2021, angka kesenjangan atau gini ratio di Jabar pada tahun 2020 mencapai 0,403 persen, atau di atas angka nasional yaitu 0,381 persen.

Jabar juga masih ditempa isu kesenjangan pembangunan. Disparitas di Jabar telah menjadi jurang pemisah (*gap*) dan kesenjangan spasial antara wilayah maju (*developed region*) dan wilayah tertinggal (*underdeveloped region*). Angka kesenjangan (*gini ratio*) ini mewarnai proses pembangunan di Jabar yang sedang berlangsung dan adanya indikasi bahwa pembangunan di Jabar belum merata dengan angka *gini ratio* mencapai 0,403 persen dan selalu berada di atas angka nasional yaitu 0,381 persen. Jabar juga mempunyai wilayah geografis yang berbeda antara barat, timur, utara dan selatan. Karakteristiknya yang unik ini menyebabkan adanya tingkat kesenjangan, terutama kesenjangan pembangunan.



Industri di Cirebon mencoba bertahan di tengah badai Covid-19. Selain pandemi, industri di Jabar juga menghadapi tantangan pasar perdagangan bebas.

Sumber: TRIBUN CIREBON/Eki Yulianto

Disparitas pembangunan pun terjadi di kawasan Jabar yang letaknya berdekatan atau di sekitar Provinsi DKI Jakarta dengan kawasan Jabar lainnya, terutama Jabar Bagian Selatan (Jabarsel) dan sebagian wilayah Jabar Bagian Utara. Disparitas ini terjadi karena percepatan pembangunan alami sebagai dampak dari pembangunan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Pengembangan Kawasan Rebana dan Kawasan Jabarsel kian mendesak dilakukan untuk mengurangi tingkat disparitas antarwilayah di seluruh Jabar.

Pemerataan pembangunan di Jabar juga harus menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* - SDGs). Adapun tujuan dan

sasaran pembangunan berkelanjutan yang harus diwujudkan bersama-sama oleh kementerian maupun lembaga (k/l) dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota), yaitu:

- 1) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun;
- 2) Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
- 3) Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
- 4) Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
- 6) Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
- 7) Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
- 8) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
- 9) Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;

- 10) Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
- 11) Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
- 12) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
- 13) Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan;
- 15) Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
- 16) Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan; serta
- 17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

## Menuju Pantura Jabar yang Semakin Mandiri

*Kawasan Rebana didesain untuk menjadi kawasan industri masa depan Jawa Barat (Jabar). Regulasi hingga aneka infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandar udara sudah tersaji di sana. Semua upaya itu dilakukan agar masyarakat di daerah-daerah Pantai Utara (Pantura) Jabar itu bisa semakin mandiri.*

**W**ilayah Rebana, yang merupakan akronim dari Cirebon-Patimban-Kertajati bersama dengan Jawa Barat Bagian Selatan (Jabarsel) ditetapkan sebagai kawasan prioritas melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2021. Kawasan Prioritas adalah kawasan yang mendapat prioritas paling utama di dalam pengembangan dan penanganan permasalahan pembangunan. Kawasan Rebana ini meliputi tujuh kabupaten maupun kota, yaitu Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten





Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah, Kemenko Marves Djoko Hartoyo (paling kanan) saat meninjau lokasi kilang Balongan (28/5/2021). Kunjungan tersebut dalam verifikasi dan tahap akhir penyusunan Perpres Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Jabarsel.

Sumber: Dokumentasi Asdep IPW Kemenko Marves

Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kota Cirebon.

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (2021), Kawasan Rebana memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang cukup timpang bila dibandingkan IPM Provinsi Jawa Barat (Jabar). Dari tujuh daerah di dalam kawasan ini, hanya Kota Cirebon yang memiliki nilai IPM lebih tinggi dari IPM Provinsi, yaitu 74,89 poin. Sementara enam kabupaten lainnya memiliki nilai IPM lebih rendah dari IPM Provinsi, dengan IPM terendah sebesar 67,29 poin di Kabupaten Indramayu<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Data Badan Pusat Statistik (BPS), 2021

Dari aspek kemiskinan, jumlah penduduk miskin di Jabar pada tahun 2020 mencapai 3.920.230 jiwa dengan persentase 7,88%. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2019 yaitu 3.399.160 jiwa atau 6,91%. Adapun perbandingan tingkat kemiskinan Provinsi dengan setiap wilayah di Kawasan Rebana adalah sebagai berikut: Kab Subang (9,31%), Kab Sumedang (10,25%), Kab Indramayu (12,7%), Kab Majalengka (11,43%), Kab Cirebon (11,24%), Kota Cirebon (9,52), dan Kab Kuningan (12,82). Berdasarkan data tersebut terlihat jelas bahwa kemiskinan di Kawasan Rebana lebih tinggi dari kemiskinan Provinsi<sup>2</sup>.

Dari sisi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) kabupaten/kota di Kawasan Rebana. Jika dibandingkan dengan PDRB ADHK Provinsi, maka PDRB total di Kawasan Rebana menyumbang 13,6% dari total PDRB Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020<sup>3</sup>. Sementara dari aspek Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), LPE di Kawasan Rebana cenderung fluktuatif dan seluruh kabupaten/kota mengalami penurunan LPE yang cukup besar pada tahun 2020 dengan rata-rata LPE (2020) sebesar -0,72%. Sementara tahun 2019, rata-rata LPE di kawasan Rebana adalah 5,60%. Jumlah ini berada di atas rata-rata LPE Provinsi (5,07%), sehingga itu menjadi peluang bagi pertumbuhan ekonomi di Jabar<sup>4</sup>.

---

2 Data Badan Pusat Statistik (BPS), 2021

3 Data Badan Pusat Statistik (BPS), 2021

4 Data Badan Pusat Statistik (BPS), 2021

Dari sisi konektivitas, kondisi konektivitas di Kawasan Rebana dalam beberapa dekade terakhir mengalami perkembangan pesat. Sejumlah proyek dan program pembangunan telah dilakukan pemerintah di level provinsi hingga kabupaten/kota. Mulai dari jalan dan jembatan; terminal; jaringan rel kereta api; bandara; hingga pelabuhan. Adapun kondisi konektivitas di Kawasan Rebana saat ini secara umum adalah sebagai berikut:

### 1. Jalan dan Jembatan

Jaringan jalan di Kawasan Rebana meliputi jalan tol maupun non-tol. Jalan tol yang sudah melintasi kawasan ini adalah Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) dan Jalan Tol Palimanan-Kanci (Palikanci) yang merupakan bagian dari Jaringan Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan



Kemacetan di Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) saat H-5 Idul Fitri pada Rabu, 27 April 2022. Tol ini merupakan bagian dari Jaringan Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan Jawa Barat hingga Jawa Timur. Tol ini juga melintasi Kawasan Rebana di Jabar.

Sumber: ANTARA FOTO/  
Risyal Hidayat

Jawa Barat hingga Jawa Timur. Jalan tol ini merupakan jalan utama yang menjadi penghubung Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kota Cirebon, dan Kabupaten Cirebon.

Adapun Ruas Jalan Nasional yang ada di Kawasan Rebana meliputi: Ruas jalan batas Kabupaten Subang-batas Kota Pamanukan; Ruas jalan batas Kota Pamanukan-Sewo; Ruas jalan Sewo-Lohbener; Ruas jalan Lohbener-batas Kabupaten Indramayu-Soekarno-Hatta (Indramayu)-Mulia Asri (Indramayu)-Lingkar Indramayu-Karangampel-Singakerta-batas Kota Cirebon; Ruas jalan Langut-Lohbener-Jatibarang-Cadang Pinggan-batas Kota Palimanan; Ruas jalan batas Kota Sumedang-Cijelag-Kadipaten-Prapatan-Jatiwangibatasa Kata Palimanan-Klangenan-Jamblang-batas Kota Cirebon; dan Ruas jalan Pilangsari (Cirebon)-Brigjen Darsono (Cirebon)-Jendral A.Yani (Cirebon)-Kalijaga (Cirebon)-batas Kota Cirebon-Losari.

Sedangkan Jalan Provinsi yang berada di Kawasan Rebana, antara lain: Ruas jalan batas Purwakarta-Subang-Kalijati-Sukamandi; Ruas jalan Subang-Bantarwaru-Haurgeulis-Patrol; Ruas jalan Subang-Pagaden-Pamanukan; Ruas jalan Bantarwaru-Cikamurang-Jangga; Ruas jalan Jatitujuh-Kadipaten-Jatibarang-Pekandangan; dan Ruas jalan Bantarsari-Ciledug-Waled.

## 2. Terminal

Terminal yang terdapat di Kawasan Rebana merupakan terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. Saat ini

sudah ada 21 terminal yang berlokasi di Kawasan Rebana. Di Kota Cirebon terdapat Terminal Harjamukti (Tipe A) dan Terminal Kalijaga (Tipe B) di Kecamatan Harjamukti. Di Kabupaten Cirebon terdapat Terminal Weru (Tipe B) di Kecamatan Weru dan Terminal Ciledug (Tipe B) di Kecamatan Ciledug. Sementara di Kabupaten Indramayu terdapat Terminal Indramayu Kota (Tipe B) di Kecamatan Indramayu; Terminal Jatibarang (Tipe C) di Kecamatan Jatibarang; dan Terminal Patrol (Tipe C) di Kecamatan Patrol.

Di Kabupaten Subang, terdapat dua terminal, yaitu Terminal Parnanukan (Tipe B) di Kecamatan Pamanukan dan Terminal Blanakan (Tipe C) di Kecamatan Blanakan. Di Kabupaten Sumedang, terdapat tiga terminal yaitu Terminal Ciakar (Tipe B) di Kecamatan Sumedang Utara; Terminal Tanjungsari (Tipe 8) di Kecamatan Tanjungsari;

---

Tampak depan Terminal Harjamukti Cirebon yang lama dan belakang Terminal Harjamukti yang baru. Terminal Tipe A di Cirebon ini sudah beroperasi sejak 2022. Adapun bangunan terminal lama dialihfungsikan sebagai lokasi kegiatan ekonomi.

Sumber: Kementerian Perhubungan



dan Terminal Wado (Tipe C) di Kecamatan Wado. Di Kabupaten Majalengka, terdapat empat terminal yaitu Terminal Kadipaten (Tipe B) di Kecamatan Kadipaten; Terminal Cigasong (Tipe C) di Kecamatan Cigasong; Terminal Bantarujeg (Tipe C) di Kecamatan Bantarujeg; dan Terminal Rajagaluh (Tipe C) di Kecamatan Rajagaluh.

Sementara Kabupaten Kuningan menjadi wilayah dengan terminal terbanyak di Kawasan Rebana dengan total lima terminal. Yaitu Terminal Cirendang (Tipe A) di Kecamatan Kuningan; Terminal Kertawinangun (Tipe A) di Kecamatan Sindangagung; Terminal Ciawigebang (Tipe B) di Kecamatan Ciawigebang; Terminal Luragung (Tipe C) di Kecamatan Luragung; dan Terminal Cilimus (Tipe C) di Kecamatan Cilimus.

### 3. Jaringan Rel Kereta Api

Jaringan rel kereta api di Kawasan Rebana merupakan bagian dari sistem jaringan rel kereta api jalur utara yakni dari Jakarta-Surabaya dan Jakarta-Cirebon.

### 4. Bandara

Bandara yang dikembangkan di Kawasan Rebana adalah Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. BIJB Kertajati juga termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Bandara yang terletak di Kabupaten Majalengka ini merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta. BIJB Kertajati



Asdep IPW Kemenko Marves, Djoko Hartoyo didampingi Kepala KSOP Kelas II Patimban Capt Dian Wahdiana melihat maket pengembangan Pelabuhan Patimban di Kantor KSOP Kelas II Patimban Subang, Jawa Barat (21/12/2023).

Sumber: Dok Asdep IPW Kemenko Marves RI



dibangun di atas lahan seluas 1.800 Hektare. Memiliki landasan pacu tunggal sepanjang 3.000 meter. BIJB memiliki kapasitas hingga 29 juta penumpang dan dapat digunakan pesawat tipe Boeing 777 atau Airbus A380. Bandara ini melayani keberangkatan haji dan kargo.

Bantara yang dibuka sejak 2018 itu mulai beroperasi penuh pada Minggu, 29 Oktober 2023. Sejumlah rute penerbangan domestik dari Bandara Internasional Husein Sastranegara di Bandung dipindahkan ke BIJB Kertajati secara bertahap untuk meningkatkan aktivitas di BIJB Kertajati. Adapun saat ini, BIJB Kertajati belum beroperasi secara reguler setiap hari. Penerbangan dari dan menuju Kuala Lumpur, Malaysia oleh maskapai AirAsia misalnya, hanya berlangsung setiap Rabu dan Minggu. Adapun penerbangan umrah menuju Jeddah, Arab Saudi oleh maskapai Garuda Indonesia beroperasi setiap Minggu.

## 5. Pelabuhan

Kawasan Rebana berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Di kawasan ini terdapat dua jenis pelabuhan, yaitu pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan. Untuk pelabuhan laut, terdapat pelabuhan besar, yaitu Pelabuhan

Petugas beraktivitas di Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat, (21/12/2023). Pelabuhan yang mulai beroperasi pada 2021 ini telah melayani bongkar muat kapal domestik dan internasional, khususnya untuk pengiriman kendaraan atau mobil.



Cirebon dan Pelabuhan Patimban yang menjadi gerbang baru untuk kegiatan ekspor dan impor dari Provinsi Jabar. Sementara untuk pelabuhan perikanan terbagi menjadi dua jenis, yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

Berikut rincian pelabuhan laut dan perikanan di Kawasan Rebana:

- 1) Pelabuhan Patimban. Pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang direncanakan memiliki kapasitas total terminal peti kemas sebesar 7,5 juta (*twenty foot equivalent unit/TEUs*) dan memiliki fasilitas terminal kendaraan yang mampu mendukung pengiriman produk otomotif sebanyak 600.000 *Completely Build Up* (CBU). Pelabuhan ini merupakan infrastruktur utama yang menunjang pembangunan Kawasan Rebana dan akan menjadi salah satu simpul transportasi yang



Deretan mobil baru di terminal kendaraan (car terminal) Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat, (21/12/2023). Pelabuhan yang mulai beroperasi pada 2021 ini telah melayani bongkar muat kapal domestik dan kapal internasional, khususnya untuk pengiriman kendaraan atau mobil antarpulau ataupun antarnegara.

Sumber: Dok Asdep IPW Kemenko Marves RI

mampu menunjang aksesibilitas Kawasan Rebana serta mendukung dalam pengembangan kawasan industri.

- 2) Pelabuhan Cirebon. Pelabuhan ini berlokasi di Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon. Pelabuhan Cirebon merupakan tipe pelabuhan regional yang digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas Kawasan Rebana. Revitalisasi Pelabuhan Cirebon diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 629 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Cirebon Provinsi Jawa Barat.
- 3) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Sejumlah PPP dan PPI yang berada di Kawasan Rebana antara lain: PPP Eretan Wetan (Kelas C), di Kecamatan Kandanghaur (Indramayu); PPP Bondet (Kelas C), di Kecamatan Gunung Jati (Kab Cirebon); PPP Blanakan (Kelas C), di Kecamatan Blanakan, (Subang); PPP Muara Ciasem (Kelas C), di Kecamatan Blanakan (Subang); PPI Karangsong (Kelas D), di Kecamatan Indramayu (Indramayu); PPI Dadap (Kelas D), di Kecamatan Juntinyuat (Indramayu); PPI Tegal Agung (Kelas D), di Kecamatan Karangampel (Indramayu); dan PPI Gebang Mekar (kelas D), di Kecamatan Gebang (Kab Cirebon).

### **Isu Kawasan Rebana**

Kawasan Rebana diarahkan untuk menjadi kawasan ekonomi baru di Provinsi Jabar. Pun demikian, pengembangan kawasan ini memiliki sejumlah isu dan

tantangan. Diantaranya adalah terkait pengembangan dan penyediaan infrastruktur; pengembangan kawasan industri yang terintegrasi; peningkatan daya saing investasi kawasan; dan pengembangan sistem vokasi, kewirausahaan, serta SDM yang inovatif.

## 1. Pengembangan dan Penyediaan Infrastruktur

Secara umum, pembangunan/penyediaan infrastruktur kawasan dan pengembangan ekonomi makro kawasan memiliki hubungan timbal balik. Melalui *multiplier effect*, peningkatan kualitas dan persebaran infrastruktur kawasan, baik infrastruktur fisik (seperti jalan, jembatan, dan struktur fasilitas umum) maupun infrastruktur nonfisik (seperti kesejahteraan sosial dan kesehatan) akan meningkatkan daya saing ekonomi. Sedangkan kondisi daya saing ekonomi kawasan akan turut meningkatkan daya tarik investasi, sehingga pembangunan dan penyediaan infrastruktur di kawasan akan lebih lancar. Eratnya pengaruh tersebut mengakibatkan pentingnya pembangunan dan penyediaan infrastruktur di Kawasan Rebana yang ditargetkan menjadi kawasan berdaya saing tinggi, berskala nasional maupun internasional.

## 2. Pengembangan Kawasan Industri yang Terintegrasi

Menimbang kebijakan pengembangan industri di Provinsi Jabar, maka perkembangan industri diarahkan menuju bagian timur-utara Jabar, yaitu Kawasan Rebana. Percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan ini diharapkan bisa memicu peningkatan investasi di kawasan industri. Pembangunan industri di Kawasan Rebana harus

dipastikan tetap berada pada delineasi Kawasan Peruntukan Industri yang telah ditetapkan. Dengan adanya Kawasan Rebana, arah investasi dan pengembangan industri akan terdistribusi ke bagian timur-utara Provinsi Jabar.

### 3. Peningkatan Daya Saing Investasi Kawasan

LPE Provinsi Jabar tahun 2020 mengalami kontraksi signifikan akibat dampak pandemi COVID-19. Salah satu lapangan usaha yang terkontraksi adalah industri pengolahan yang menjadi sektor utama ekonomi Provinsi Jabar. Selain itu, LPE kabupaten/kota di Provinsi Jabar juga mengalami ketimpangan. Kabupaten/kota dengan LPE terendah dan tertinggi di Jabar terdapat di Kawasan Rebana. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kawasan Rebana masih timpang.

Menimbang urgensi tersebut, Pemerintah Provinsi Jabar melakukan upaya pemulihan ekonomi. Salah satunya dengan pembangunan Kawasan Rebana. Pengembangan Kawasan Rebana diharapkan meningkatkan kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kota Cirebon melalui pengembangan kawasan industri serta penciptaan lapangan kerja.

### 4. Pengembangan Sistem Vokasi, Kewirausahaan, dan SDM Inovatif

Salah satu isu strategis dalam pengembangan Kawasan Rebana adalah terjadinya fenomena deindustrialisasi di Indonesia. Pengembangan industri di Kawasan Rebana



akan mengadopsi kebijakan industri 4.0 yang berdampak pada revitalisasi industri manufaktur dan mempercepat implementasi programprogram *Fourth Industrial Revolution* (4IR).

Pencanangan Industri 4.0 ini disinyalir akan memberikan potensi yang besar untuk melipatgandakan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan daya saing dan penetrasi pangsa pasar ekspor global. Meningkatnya ekspor dapat membuka kesempatan kerja yang berdampak pada peningkatan konsumsi domestik di Indonesia. Peluang ini dijadikan *engine of economic growth* di Provinsi Jabar.

## **Keunggulan Komparatif Kawasan Rebana**

Kawasan Rebana setidaknya memiliki tiga keunggulan komparatif, yaitu Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang kompetitif; Konektivitas Kawasan Tinggi; Sumber Daya Identik dan Melimpah; serta Potensi Pengembangan Tenaga Kerja yang Tinggi.

### **1. Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kompetitif**

Kawasan Rebana memiliki UMK yang kompetitif dengan rata-rata UMK tahun 2021 sebesar Rp 2.444.517. Rata-rata UMK ini lebih rendah dibandingkan UMK di kawasan industri lainnya, termasuk di kawasan industri pada Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri I Provinsi Jawa Barat. UMK tertinggi di Kawasan Rebana adalah Kabupaten Subang yaitu Rp 3.064.218. sedangkan UMK

terendah di kawasan ini adalah Kabupaten Kuningan yaitu Rp 1.882.642<sup>5</sup>.

Selain itu, UMK kabupaten/kota di Kawasan Rebana juga kompetitif jika dibandingkan dengan kabupaten/kota dalam kawasan industri Provinsi Jawa Tengah (rata-rata Rp 2.056.469) dan lebih rendah jika dibandingkan dengan kawasan industri di Provinsi Jawa Timur (rata-rata Rp 3.134.871)<sup>6</sup>.

## 2. Konektivitas Kawasan Tinggi

Kawasan Rebana dibangun dengan poros pertumbuhan berupa infrastruktur perhubungan, yaitu Pelabuhan Cirebon, Pelabuhan Patimban, dan Bandara Kertajati (BIJB). Ketiga infrastruktur ini memainkan peranan penting dalam pergerakan orang dan barang, baik dalam konstelasi nasional maupun global.

Pelabuhan Cirebon saat ini sedang dilakukan revitalisasi agar dapat melayani pengangkutan peti kemas untuk ekspor. Sedangkan Pelabuhan Patimban telah diresmikan pada Desember 2020 dengan kapasitas mencapai 7,5 juta TEU. Pelabuhan Patimban dicanangkan menjadi pelabuhan kargo utama untuk industri di Provinsi Jabar, menggantikan Pelabuhan Tanjung Priok.

---

5 Data Badan Pusat Statistik (BPS), 2021

6 Data Badan Pusat Statistik (BPS), 2021

Selain tiga infrastruktur utama tersebut, di Kawasan Rebana juga akan dikembangkan kereta barang, kereta semi cepat, jalan tol, dan jalan non-tol yang menghubungkan infrastruktur utama dan kawasan industri yang akan dikembangkan. Dukungan infrastruktur yang tersedia menjadikan konektivitas Kawasan Rebana sangat baik untuk kepentingan industri maupun kebutuhan pelayanan dasar. Ketersediaan infrastruktur di dalam kawasan ini juga merupakan nilai lebih dari Kawasan Rebana dibandingkan kawasan industri lain di Indonesia.

### 3. Sumber Daya Identik dan Melimpah

Kawasan Rebana memiliki potensi sumber daya yang identik dan melimpah, diantaranya berupa hasil pertambangan, bahan galian nonlogam, hasil hutan, pertanian, perkebunan, dan hasil laut.

Kawasan Rebana memiliki potensi hasil tambang berupa minyak dan gas, terutama di pesisir pantai utara seperti Kabupaten Indramayu. Pemerintah juga telah merencanakan pengembangan Kilang Minyak VI milik Pertamina yang mengolah minyak mentah dari Duri dan Minas dengan kapasitas produksi ditargetkan mencapai lebih dari 300.000 barel per hari. Sedangkan potensi gas terdapat di Kilang LPG Mundu VI dengan kapasitas 47,5 Million *Standard Cubic Feet per Day* (MMSCFD). Ketersediaan sumber daya hasil tambang menjamin keberlangsungan proses produksi industri kimia dan produk turunannya termasuk minyak dan gas di Kawasan Rebana.

Selain potensi hasil pertambangan, Kawasan Rebana juga memiliki bahan galian nonlogam meliputi andesit, batu gamping, batu lempung, batu kapur, tanah liat, dan tras, terutama di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Cirebon. Ketersediaan sumber daya bahan galian nonlogam ini menjamin keberlangsungan proses produksi industri pengolahan bahan bangunan dan hotmix/beton di Kawasan Rebana.

Sementara dari sektor perhutanan, Kawasan Rebana memiliki hutan produksi yang luas meliputi Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kuningan, KPH Majalengka, KPH Indramayu, KPH Sumedang, dan KPH Purwakarta. Komoditas utama yang dihasilkan berupa kayu putih, jati, mahoni, pinus, karet, dan rotan. Ketersediaan sumber daya hasil hutan menjamin keberlangsungan proses produksi industri kerajinan, furnitur, dan barang dari kayu lainnya di Kawasan Rebana.

Dari sektor pertanian dan perkebunan, Kawasan Rebana memiliki potensi komoditas hasil pertanian terutama padi, jagung, ubi jalar, bawang merah, tomat, cabai, jamur, kacang panjang, dan mentimun. Terdapat pula komoditas hasil perkebunan yang identik di kawasan ini, diantaranya mangga agrimania, mangga gedong gincu, pepaya california, nanas, jambu biji merah, sawo citali, ubi cilembu, nangka, kopi, teh, dan pisang. Ketersediaan sumber daya hasil pertanian menjamin keberlangsungan proses produksi industri pengolahan makanan dan minuman di Kawasan Rebana.

Kawasan Rebana juga memiliki sumber daya yang melimpah dari sektor kelautan karena kawasan ini memiliki

garis pantai yang panjang. Komoditas hasil laut diperoleh dari perikanan tangkap maupun budidaya. Diantaranya adalah ikan, udang, bandeng, kerang hijau, dan rumput laut. Komoditas hasil laut di Kawasan Rebana berkontribusi lebih dari 40% produksi ikan di Provinsi Jabar. Ketersediaan sumber daya hasil laut ini menjamin proses produksi industri pengolahan perikanan dan pengolahan makanan di Kawasan Rebana yang berkesinambungan.

#### 4. Potensi Pengembangan Tenaga Kerja Tinggi

Potensi pengembangan tenaga kerja di Kawasan Rebana terbilang tinggi lantaran jumlah angkata kerja di dalam kawasan yang juga tinggi. Potensi pengembangan ini juga didukung dengan adanya perguruan tinggi, sekolah vokasi, sekolah menengah kejuruan, dan *teaching factory school* yang saat ini terus dikembangkan di setiap kabupaten/kota untuk mendukung terciptanya link and match ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja industri.

Adapun program studi keahlian yang dikembangkan untuk mendukung spesialisasi pengembangan industri di Kawasan Rabana, antara lain pertambangan, geologi, kimia industri, nautika perkapalan, agroindustri, agroteknologi, konstruksi bangunan, otomotif, mesin, komputer dan jaringan, kelistrikan, farmasi, dan tata busana. Ketersediaan SDM yang sesuai dengan kebutuhan industri ini akan menciptakan *labor pool* dan menjadi salah satu manfaat aglomerasi yang akan diterima industri apabila berlokasi di Kawasan Rebana.

## Menuju Jabarsel yang Semakin Berkilau

*Jika Jawa Barat (Jabar) dibelah dua menjadi bagian utara dan selatan, terlihat perbedaan yang cukup besar antarkeduanya. Jabar Bagian Selatan (Jabarsel) masih jauh tertinggal dalam hal pembangunan. Melalui Perpres Nomor 87 Tahun 2021, pemerintah berharap bisa mendorong Jabarsel yang semakin maju dan berkilau.*

**W**ilayah Jawa Barat Bagian Selatan (Jabarsel) bersamadenganWilayahRebanatelahditetapkan sebagai kawasan prioritas melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2021. Kawasan Prioritas merupakan kawasan yang mendapat prioritas paling utama di dalam pengembangan dan penanganan permasalahan pembangunan. Adapun kawasan Jabarsel meliputi enam kabupaten, yaitu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran.



Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (2021), Kawasan Jabarsel memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang cukup timpang, bila dibandingkan IPM Provinsi Jawa Barat (Jabar). Seluruh kabupaten yang berada pada Kawasan Jabarsel memiliki IPM di bawah Provinsi, dengan Kabupaten Ciamis memiliki IPM tertinggi yaitu mencapai 70,49 poin, sementara IPM terendah adalah Kabupaten Cianjur dengan nilai 65,36 poin.

Adapun IPM Provinsi Jabar pada tahun 2020 tercatat mencapai 72,09 poin, meningkat dari tahun 2019 yang hanya sebesar 72,03 poin. Perbandingan IPM Provinsi dengan daerah-daerah di Kawasan Jabarsel adalah sebagai berikut: Kabupaten Sukabumi (66,88), Kabupaten Cianjur (65,36), Kabupaten Garut (66,12), Kabupaten Tasikmalaya (65,67), Kabupaten Ciamis (70,49), dan Kabupaten Pangandaran (68,06).

Dari aspek kemiskinan, jumlah penduduk miskin di Jabar tercatat mencapai 3.920.230 jiwa dengan persentase 7,88% pada tahun 2020. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2019, yaitu 3.399.160 jiwa dengan persentase 6,91%. Adapun perbandingan tingkat kemiskinan Provinsi dengan setiap kabupaten di Kawasan Jabarsel adalah sebagai berikut: Kabupaten Sukabumi (7,09%), Kabupaten Cianjur (10,36), Kabupaten Garut (9,98), Kabupaten Tasikmalaya (10,34), Kabupaten Ciamis (7,62), dan Kabupaten Pangandaran (8,99).

Berdasarkan catatan itu, terlihat bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Ciamis berada di bawah tingkat kemiskinan Provinsi. Sementara



Asisten Deputy Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Asdep IPW) Kemenko Marves, Djoko Hartoyo menjadi narasumber dalam Talkshow “Pemantapan Daya Saing Ekonomi Melalui Peningkatan Infrastruktur Daerah,” yang menjadi bagian dari kegiatan Musrenbang Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 di Sukabumi, 15 Maret 2023.

Sumber: SAINS INDONESIA

empat kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran memiliki tingkat kemiskinan di atas tingkat kemiskinan Provinsi.

Dari sisi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) kabupaten/kota di Kawasan Jabarsel. Jika dibandingkan dengan PDRB ADHK Provinsi Jabar, PDRB total kabupaten/kota di Kawasan Jabarsel menyumbang 11,58% dari total PDRB Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020. Sedangkan dari Laju Pertumbuhan

Ekonomi (LPE), LPE di kabupaten/kota dalam Kawasan Jabarsel cenderung fluktuatif dan seluruh kabupaten/kota mengalami penurunan LPE yang cukup besar pada tahun 2020 dengan rata-rata LPE (2020) sebesar -0,953%. Jumlah ini berada di atas rata-rata LPE Provinsi yang secara keseluruhan sebesar 5,07%, sehingga hal tersebut menjadi peluang bagi pertumbuhan ekonomi di Jabar.

Dari sisi konektivitas, kondisi konektivitas di Kawasan Jabarsel dalam beberapa dekade terakhir mengalami sejumlah perkembangan. Sejumlah proyek dan program pembangunan telah dilakukan pemerintah di level provinsi hingga kabupaten/kota di kawasan ini. Mulai dari jalan dan jembatan; terminal; jaringan rel kereta api; bandara; hingga pelabuhan. Berikut gambaran umum kondisi konektivitas di Kawasan Jabarsel saat ini:

### 1. Jalan dan Jembatan

Dibandingkan dengan wilayah utara dan tengah di Provinsi Jabar, konektivitas jalan di Kawasan Jabarsel terbilang masih cukup rendah. Disparitas konektivitas jalan antara Jabar Bagian Utara dan Jabar Bagian Tengah terhadap Jabar Bagian Selatan dapat diuraikan dalam tiga poin berikut: *Pertama*, terdapat sistem jaringan jalan primer utara dan tengah yang relatif baik, terutama untuk sistem primer horizontal. Sementara sistem jaringan primer lintas vertikal maupun horizontal di selatan masih belum terpenuhi.

*Kedua*, kurang lebih 71,76% jaringan jalan ada di wilayah utara dan tengah, sedangkan hanya 28,24% yang ada di



Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum saat meninjau pembangunan Jalur Tengah Selatan (JTS) Segmen 1 Lengkong-Sagaranten di Jalur Lengkong-Sagaranten Kabupaten Sukabumi, Rabu (8/9/2021). Dalam konteks konektivitas darat, Kawasan Jabarsel memiliki potensi pengembangan Jalur Tengah Selatan (JTS) sebagai poros barat-timur yang menghubungkan kota/kabupaten di wilayah selatan Jabar.

Sumber: Biro Adpim Jabar

wilayah selatan. *Ketiga*, tingkat pergerakan di Kawasan Jabarsel relatif lebih kecil dibandingkan dengan tingkat pergerakan di wilayah Jabar Bagian Utara dan Jabar Bagian Tengah. Ini berkaitan dengan minimnya kegiatan yang bisa membangkitkan dan pergerakan penduduk secara masif untuk menarik aktivitas ekonomi di Kawasan Jabarsel.

Pengembangan Kawasan Jabarsel memang belum terintegrasi. Pemerataan kualitas fasilitas tujuan wisata antar-wilayah pun menjadi suatu keniscayaan. Terbangunnya aktivitas ekonomi di Jawa Barat Bagian Utara selama ini tidak lepas dari posisi strategis kota-kotanya yang lebih terhubung

dengan wilayah lain, seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Sementara kota-kota di sisi selatan Jabar terletak cukup jauh, sehingga harus diakses melalui perjalanan darat dengan waktu tempuh relatif lama.

Posisi kota-kota di selatan Jabar yang sulit terjangkau itu membuat perkembangan fasilitas dan infrastruktur kurang optimal. Terlebih dengan medan jalan darat yang penuh tanjakan-turunan serta kelokan, membuat berbagai proyek tidak bisa dipaksakan berjalan sebentar. Maka keberpihakan pemerintah dengan menjadikan wilayah Jabarsel sebagai salah satu prioritas pertumbuhan ekonomi baru layak disyukuri.

Adapun jaringan jalan yang berada dalam Kawasan Jabarsel terbagi atas kelompok ruas jalan horizontal dan ruas jalan vertikal dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Jalur horizontal (arah timur-barat Kawasan Jabarsel) sepanjang 410>69 km dengan rute memanjang dari barat ke timur, meliputi Cibareno (Batas Provinsi Banten)-Palabuhanratu-Bagbagan-Surade-Tegalbuleud-Sindangbarang-Cidaun-Rancabuaya-Pameungpeuk-CipatujahKalapagenep-Pangandaran-Kalipucang (Batas Provinsi Jawa Tengah).
- 2) Jalur vertikal (arah utara-selatan Kawasan Jabarsel) dengan jalur vertikal sepanjang 428 km yang terdiri dari beberapa ruas jalan, yaitu ruas Tegalbuleud-Sagaranten-Nyalindung-Sukabumi; Sindangbarang-Pagelaran-Tanggeung-Sukanagara-Cianjur; Cidaun-Naringgul-Rancabali-Bandung; Palembang-Rancabuaya-

Sukarame-Cisewu-Talegong-Pangalengan; Cijayana-Bungbulang-Cileuleuy-Santosa-Pintu-Pangalengan; Cilautereun-Pameungpeuk-Cikajang; Cipatujah-Karangnunggal-Sukaraja-Tasikmalaya; dan Pangandaran-Kalipucang-Banjar-Ciamis.

## 2. Terminal

Terminal yang terdapat di Kawasan Jabarsel merupakan terminal penumpang Tipe B, Tipe C, dan sub terminal. Adapun terminal yang terdapat di Kawasan Jabarsel adalah Terminal Palabuhanratu di Kabupaten Sukabumi dan Terminal Pangandaran di Kabupaten Pangandaran. Sedangkan Sub terminal yang terdapat di Kawasan Jabarsel adalah: Terminal Bojong Lopang di Kecamatan Jampang Kulon dan Terminal di Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi; Terminal di Kecamatan Sindangbarang dan Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur; Terminal Bungbulang di Kecamatan Bungbulang dan Terminal Pameungpeuk di Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Garut; Terminal Cipatujah di Kecamatan Cipatujah, Terminal Cikalong di Kecamatan Cikalong, dan Terminal Cibalong di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya; dan Terminal Ciamis di Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis.

## 3. Rel Kereta Api

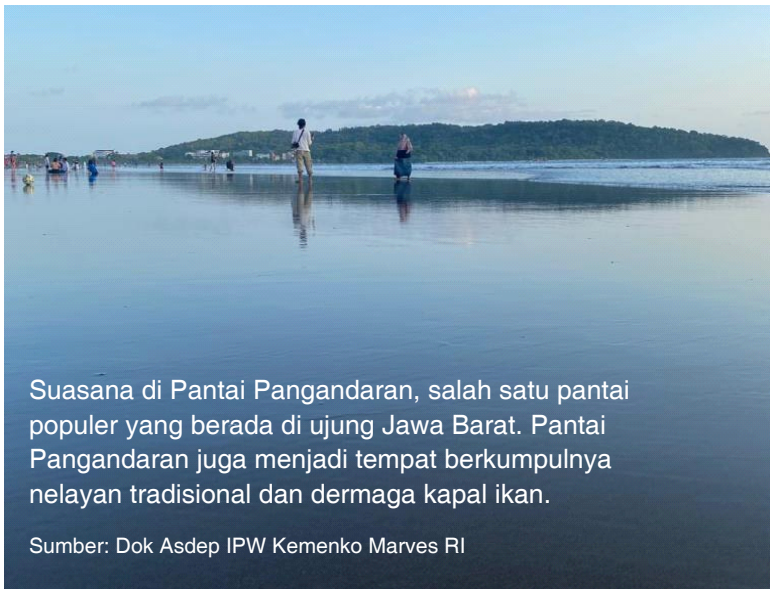
Jaringan rel kereta api di Kawasan Jabarsel adalah jaringan rel yang menghubungkan Banjarsari-Padaherang-



Kalipucang-Pangandaran-Parigi-Cimerak. Adapun jalur tersebut saat ini belum terpelihara dengan baik dan tidak beroperasi. Keberadaan rel kereta api di Kawasan Jabarsel merupakan salah satu aset potensi transportasi untuk memudahkan pergerakan barang dan orang.

#### 4. Laut dan Pelabuhan

Secara geografis, Kawasan Jabarsel berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Posisi ini memberi dua keuntungan, yaitu faktor strategis keamanan nasional berkaitan dengan wilayah perairan nasional dan faktor ekonomis kandungan potensi kelautan Samudra Hindia. Untuk kepentingan tersebut maka perhubungan laut menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan transportasi regional di Kawasan Jabarsel.



Suasana di Pantai Pangandaran, salah satu pantai populer yang berada di ujung Jawa Barat. Pantai Pangandaran juga menjadi tempat berkumpulnya nelayan tradisional dan dermaga kapal ikan.

Sumber: Dok Asdep IPW Kemenko Marves RI

Pelabuhan yang berhubungan dengan keamanan nasional di Kawasan Jabarsel adalah pelabuhan bagi Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) yang berada di Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Sukabumi. Pelabuhan jenis lainnya adalah pelabuhan pengumpan, pelabuhan komersial, dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Pelabuhan pengumpan berada di Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi yang menjadi pelabuhan transportasi perdagangan dan pangkalan pendaratan ikan.

Kawasan Jabarsel juga terdapat Pelabuhan komersial (penyeberangan) di Kabupaten Pangandaran, yaitu Pelabuhan Santolo dan Pelabuhan Majingklak di Kecamatan Kalipucang yang menghubungkan Kecamatan Kalipucang dengan Kota Cilacap, Jawa Tengah. Selain melayani angkutan penyeberangan, pelabuhan ini juga melayani angkutan pariwisata berupa kapal feri dengan kapasitas kurang dari 10 ton. Adapun untuk pelabuhan nelayan, Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan PPI yang berkembang di Kawasan Jabarsel adalah sebagai berikut:

Di Kabupaten Sukabumi terdapat Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Kelas B), terletak di Kecamatan Palabuhanratu; PPI Ujung Genteng (Kelas D) di Desa Gunungbatu, Kecamatan Ciracap; PPI Loji (Kelas D) di Desa Loji, Kecamatan Palabuhanratu; PPI Cislok (Kelas D) di Desa Cikahuripan, Kecamatan Cislok; dan PPI Cibamban (Kelas D) di Desa Pasirbaru, Kecamatan Cislok.

Di Kabupaten Pangandaran terdapat PPI Pangandaran (Kelas D) di Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran; PPI Bojongsalawe (Kelas D) di Desa Karangjaladri, Kecamatan

Parigi; PPI Majingklak (Kelas D) di Desa Pamotan, Kecamatan Kalipucang; PPI Batukaras (Kelas D) di Desa Batukaras, Kecamatan Cijulang; dan PPI Legokjawa (Kelas D) di Desa Legokjawa, Kecamatan Cimerak. Sedangkan di Kabupaten Cianjur terdapat PPI Jayanti (Kelas D) di Desa Cidamar, Kecamatan Cidaun.

Di Kabupaten Garut, ada PPP Cilauteureun (Kelas C) di Desa Pamalayan, Kecamatan Cikelet; PPI Sancang (Kelas D) di Desa Sancang, Kecamatan Cibalong; PPI Cimari (Kelas D) di Desa Cimari, Kecamatan Pakenjeng; dan PPI Rancabuaya (Kelas D) di Desa Purbayani, Sukarame, Kecamatan Caringin. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya, terdapat PPI Pamayangsari (Kelas D) di Desa Cikawungading, Kecamatan Cipatujah.

Melalui Perpres Nomor 87 Tahun 2021, tantangan dalam pengembangan pelabuhan laut di Kawasan Jabarsel bisa diselesaikan. Mulai dari rendahnya pemeliharaan untuk setiap pelabuhan yang ada. Hingga keterbatasan kapasitas serta sarana dan prasarana yang ada untuk melayani bobot kapal ataupun muatan yang lebih besar. Selama ini, kendala-kendala tersebut telah menghambat perkembangan penangkapan ikan dan kemungkinan masuknya kapal-kapal dengan kapasitas besar ke pelabuhan.

## 5. Bandar Udara

Kawasan Jabarsel hanya memiliki satu fasilitas perhubungan udara, yaitu Bandar Udara (Bandara) Nusawiru yang terletak di Kecamatan Cijulang, Kabupaten

Pangandaran. Bandara Nusawiru berfungsi sebagai bandara komersial dengan landasan pacu sepanjang 1.400 meter dengan lebar 30 meter dan landasan gelinding (taxiway) selebar 20 meter. Bandara Nusawiru berperan sangat penting bagi perkembangan pariwisata dan perikanan di Kawasan Jabarsel dan sekitarnya, sehingga kondisi fisik dan kualitas pelayanan di Bandara Nusawiru harus terus dipelihara dan ditingkatkan.

Pemerintah kini tengah mengembangkan dua bandar udara lainnya di Jabarsel, yaitu Bandara Wiriadinata di Tasikmalaya dan Bandara Sukabumi. Pembangunan dua bandara di selatan Jabar itu diharapkan bisa memperkuat konektivitas dengan wilayah selatan Jawa Tengah-DI Yogyakarta, di mana sudah tersedia Bandara Jenderal Soedirman di Purbalingga, dan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulonprogo. Koneksi tersebut, dari sisi transportasi juga diharapkan bisa terhubung dengan Ponorogo-Pacitan dan Lumajang-Banyuwangi di Jawa Timur.

### **Isu Kawasan Jabarsel**

Kawasan Jabarsel diarahkan untuk menjadi kawasan ekonomi baru di Jabar. Namun demikian pengembangan kawasan ini memiliki sejumlah isu dan tantangan. Diantaranya terkait infrastruktur, agribisnis dan agroindustri, industri kelautan, dan pariwisata terpadu.

Hampir semua kabupaten di Kawasan Jabarsel mengalami ketimpangan wilayah dan pemerataan

pembangunan. Angka PDRB yang tinggi di Jabar hingga saat ini didominasi oleh beberapa kota/kabupaten di Jabar Bagian Tengah dan Barat. Sementara kota/kabupaten lainnya, terutama di Kawasan Jabarsel hanya menghasilkan sedikit pendapatan, bahkan tidak sampai 50% dari pendapatan wilayah lainnya seperti Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, dan Kabupaten Bogor.

Perbedaan pendapatan ini menyebabkan pembangunan di masing-masing daerah menjadi berbeda. Ketimpangan wilayah tidak hanya dilihat dari segi ekonomi, namun juga dari segi sosial. Selain itu, ketimpangan ini secara langsung maupun tidak langsung berkaitan erat dengan aspek spasial. Secara morfologi, Kawasan Jabarsel memiliki kondisi morfologi kawasan, menyebabkan pembangunannya tidak bisa dilakukan sporadis sebagaimana di wilayah Jabar Bagian Tengah maupun Utara.

Banyaknya hutan dengan fungsi lindung dan konservasi di Jabarsel ini menjadikan banyak kawasan menjadi *negative list* pembangunan dan menimbulkan terjadinya disparitas ekonomi antar kawasan. Oleh karena itu, Kawasan Jabarsel memerlukan pemetaan sesuai dengan potensi wilayah eksisting. Pengembangan ekonomi Jabarsel memerlukan pendekatan yang berbeda dengan wilayah utara Jabar. Adapun wilayah Jabar Bagian Utara sendiri saat ini sebagian besar mengusung konsep industrialisasi.

Di sisi lain, ketimpangan di Jabarsel juga berkaitan erat dengan kualitas SDM-nya yang secara umum berdasarkan tingkat pendidikan, berada di bawah wilayah Jabar lainnya. Tingkat pendidikan tersebut sangat berpengaruh terhadap

kemampuan masyarakat dan nilai jual masyarakat itu sendiri. Pekerja dengan tingkat pendidikan dan kemampuan rendah akan sulit mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang baik.

Kawasan Jabarsel juga memiliki tantangan dari aspek konektivitas wilayah. Saat ini tingkat konektivitas di Jabarsel masih relatif rendah, baik konektivitas antarkota/kabupaten maupun antarkawasan di dalam kawasan itu sendiri. Kondisi konektivitas yang rendah ini menyebabkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Jabarsel tidak berjalan optimal.

Di satu sisi, investasi di berbagai sektor yang telah didorong di Jabarsel sering kali terhambat oleh faktor keterbatasan infrastruktur dasar yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis, terutama dalam konteks aksesibilitas antarwilayah. Di sisi lainnya, hal ini pula yang menyebabkan masih cukup banyak kawasan di Jabarsel yang masih tergolong ke dalam kategori wilayah tertinggal.

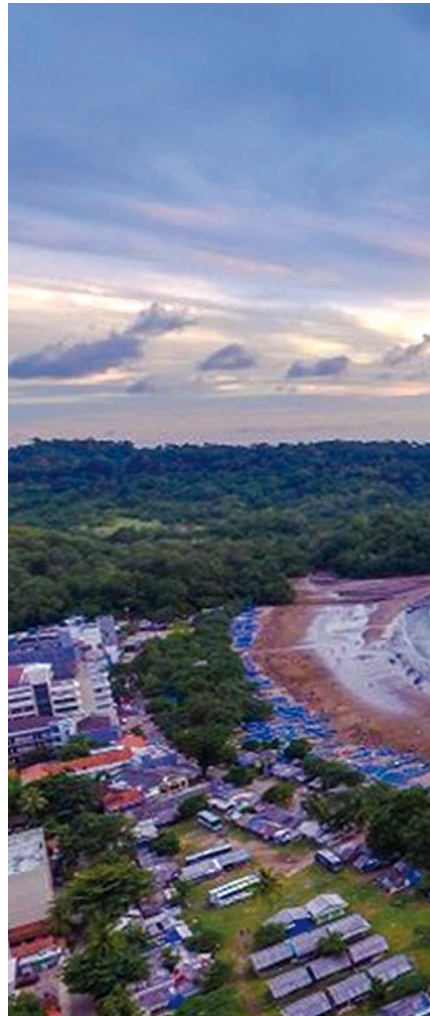
Pertumbuhan ekonomi di Jabarsel dapat dipacu dengan ketersediaan infrastruktur memadai yang berujung pada terciptanya konektivitas antarwilayah. Dalam konteks Jabarsel, peningkatan konektivitas perlu didorong di setiap jalur, yaitu darat, laut, dan udara. Dalam konteks konektivitas darat, ada potensi pengembangan Jalur Tengah Selatan (JTS) sebagai poros barat-timur yang menghubungkan kota/kabupaten di wilayah selatan Jabar. Kawasan Jabarsel yang berbatasan dengan laut juga menghasilkan potensi peningkatan konektivitas melalui

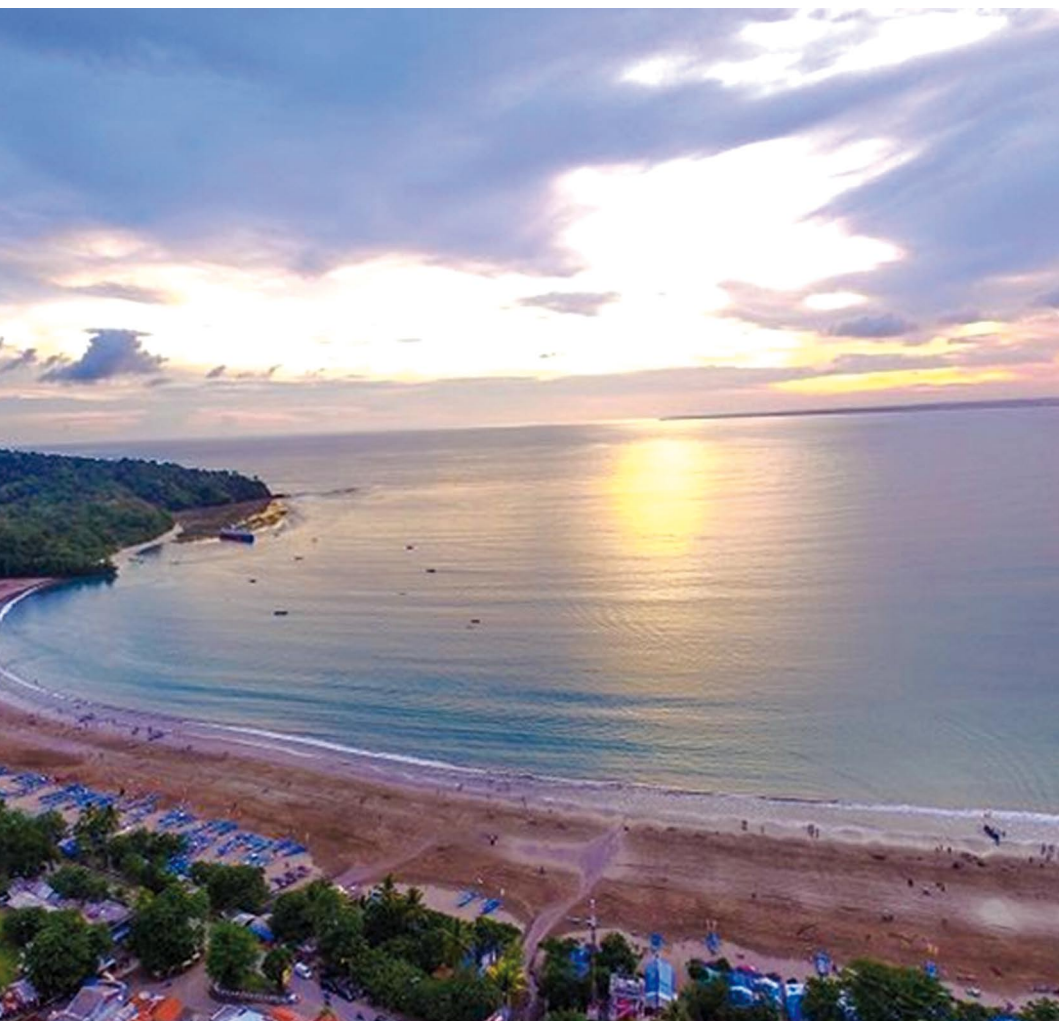


jalur laut. Selain itu, pada beberapa kabupaten di Kawasan Jabarsel juga terdapat bandara perintis yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan konektivitas wilayah melalui jalur udara.

Sebagai upaya optimalisasi potensi dan komoditas daerah di Kawasan Jabarsel, maka kawasan ini dirancang untuk memaksimalkan Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Merujuk pada morfologi kawasan, daya dukung, dan daya tampung lingkungan, serta kondisi SDA maupun SDM di Jabarsel, maka potensi daerah yang layak dan berpotensi untuk didorong dan dikembangkan berada dalam lingkup pertanian (agribisnis); kelautan dan perikanan; serta pariwisata.

Sejumlah isu yang berkaitan dengan pengembangan tiga sektor unggulan di Kawasan Jabarsel ini antara lain: besarnya potensi pertanian belum diimbangi dengan infrastruktur pendukung yang memadai, seperti jaringan irigasi; penguatan armada dalam usaha perikanan serta peningkatan skala usaha untuk memperluas jangkauan penangkapan; Pengelolaan pelabuhan perikanan belum





Pantai Pangandaran di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Kawasan Pantai Pangandaran dan sekitarnya termasuk dalam Rencana Induk Pariwisata Nasional dan telah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Sumber: Shutterstock/Raditya



The Nice Funtastic Park di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Semua wilayah di Kawasan Jabar Bagian Selatan memiliki ragam destinasi wisata yang potensial untuk dikembangkan.

Sumber: Instagram/@thenice\_funtasticpark

berjalan baik; dan peran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) dalam usaha pemanfaatan potensi sumber daya kelautan secara efisien dan berkelanjutan.

Selain itu, adapula isu terkait akses permodalan dan akses pasar untuk pengembangan usaha perikanan; kelengkapan dan kondisi sarana dan prasarana pendukung (khususnya aspek transportasi) destinasi wisata, terutama dalam konteks aksesibilitas; kesiapan dan kualitas SDM maupun masyarakat lokal untuk terlibat dan mendukung pengembangan kepariwisataan di daerah; dan kerentanan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami.

## Keunggulan Komparatif Kawasan Jabarsel

Berbeda dengan wilayah Jabar pada umumnya yang perekonomiannya ditopang oleh sektor industri pengolahan; perdagangan besar, kecil, dan eceran; serta konstruksi, sektor ekonomi potensial di Kawasan Jabarsel lebih mengarah pada sektor agroindustri, perikanan, dan pariwisata. Hal ini terjadi karena morfologi dan kondisi geografis Kawasan Jabarsel yang didominasi lahan dengan limitasi pembangunan fisik, posisi yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, serta bentang alam yang banyak memiliki daya tarik wisata.

Di sektor perkebunan, Kawasan Jabarsel memiliki keunggulan komparatif di beberapa komoditas, antara lain: Kakao, dengan wilayah produksi terbesar di Kabupaten Ciamis dan Garut; Kopi, dengan wilayah produksi terbesar di Kabupaten Pangandaran; Aren, dengan wilayah produksi terbesar di Kabupaten Tasikmalaya dan Cianjur; Karet, dengan wilayah produksi terbesar di Kabupaten Pangandaran dan Sukabumi; serta Kelapa, dengan wilayah produksi terbesar di Kabupaten Garut dan Tasikmalaya.

Ilustrasi Petani memanen biji kopi. Kawasan Jabarsel memiliki keunggulan komparatif di sejumlah komoditas perkebunan. Salah satunya adalah Kopi dengan produksi terbesar di Kabupaten Pangandaran.

Sumber: ANTARA/Syaiful Arif





Kolam-kolam tambak udang vaname di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat (19/12/2023). Kawasan Jabarsel dari Kabupaten Pangandaran hingga Kabupaten Garut terpantu memiliki banyak lahan yang telah digunakan untuk budidaya udang secara intensif.

Sumber: Dok Asdep IPW Kemenko Marves RI







Kawasan Jabarsel juga memiliki keunggulan komparatif pada sektor tanaman pangan dan hortikultura. Sejumlah komoditas yang menjadi keunggulan komparatif bagi Kawasan Jabarsel diantaranya adalah Manggis, dengan wilayah produksi terbesar di Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Garut; Padi organik, dengan wilayah produksi terbesar di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran; dan Jagung, dengan wilayah produksi terbesar di Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur.

Sementara pada saat sektor budi daya perikanan selesai, keunggulan komparatif di Kawasan Jabarsel diperoleh dari sejumlah komoditas unggulan, antara lain: Udang Vaname di Kabupaten Tasikmalaya; Lobster di Kabupaten Sukabumi; dan Garam di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Pangandaran.

Pada sektor pariwisata, Kawasan Jabarsel juga memiliki berbagai potensi daya tarik wisata yang terbentang dari ujung barat hingga ujung timur. Sejumlah destinasi wisata diantaranya memiliki nilai strategis, nasional maupun internasional. Di sebelah barat terdapat Taman Nasional Ujung Kulon serta kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO *Global Geopark*. Menyusuri Pantai Selatan Jabar terdapat beberapa pantai yang menjadi daya tarik wisata, antara lain Pantai Santolo, Pantai Karang Tawulan, serta Pantai Pangandaran. Selain itu ada pula kawasan Pantai Pangandaran dan sekitarnya yang termasuk dalam Rencana Induk Pariwisata Nasional dan telah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

## Arah Pengembangan Kawasan Rebana

*Pembangunan Kawasan Rebana ditetapkan meliputi tujuh kabupaten/kota di Jawa Barat. Seluruh pengembangan kawasan tersebut berbasis ecoindustri yang dilakukan melalui pembangunan eco-industrial park atau kawasan industri berwawasan lingkungan.*

Pembangunan Kawasan Rebana ditetapkan meliputi 7 kabupaten/kota di Jawa Barat. Yaitu Kabupaten Subang, Indramayu, Majalengka, Sumedang, Cirebon Kuningan, dan Kota Cirebon. Terdapat 13 titik pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), dengan rincian 3 titik pengembangan kawasan di Kabupaten Subang, 6 titik pengembangan kawasan di Kabupaten Indramayu, 2 titik pengembangan kawasan di Kabupaten Majalengka, dan masing-masing 1 titik pengembangan kawasan di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Cirebon. Seluruh pengembangan kawasan tersebut didesain

berbasis ecoindustri yang dilakukan melalui pembangunan eco-industrial park atau kawasan industri berwawasan lingkungan. Adapun arah fungsi kawasannya secara umum dibagi menjadi 4 jenis kawasan, yaitu Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), serta Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

Dalam Perpres 87/2021, Kota Cirebon ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKNL) dengan peran untuk melayani kegiatan skala internasional. Wilayah Patimban, Kadipaten-Kertajati, dan Indramayu menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan peran untuk melayani kegiatan skala nasional. Sementara wilayah Pabuaran, Cipunagara, Patrol, dan Krangkeng ditetapkan menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan wilayah pelayanan kabupaten/kota sekitarnya.

---

Suasana city view dari salah satu resto di Kabupaten Kuningan. Kabupaten Kuningan termasuk dalam Kawasan Rebana yang dibangun berdasarkan konsep Polycentric Smart Region. Kabupaten Kuningan akan difungsikan sebagai kawasan pendukung perkotaan inti di Kota Cirebon.

Sumber: Dok Asdep IPW Kemenko Marves RI



Kawasan Rebana dikembangkan dengan konsep *Polycentric Smart Region*. Konsep ini berarti bahwa kawasan akan memiliki inti ganda yang memfasilitasi kawasan sesuai dengan fungsinya masing-masing tanpa bertentangan satu sama lain. Konsep *smart region* ini adalah suatu jenis konsep pengembangan kawasan geografis, yang melalui kebijakan bersama, mampu meningkatkan daya saing dan daya tarik kawasan, dengan perhatian khusus terhadap kepaduan sosial, penyebaran pengetahuan, pertumbuhan kreativitas, aksesibilitas dan kebebasan bergerak, kegunaan lingkungan (alami, sejarah, arsitektur, persebaran perkotaan), kualitas lanskap, dan kehidupan masyarakatnya.

Berdasarkan konsep *Polycentric Smart Region* tersebut, fungsional kawasan terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kawasan perkotaan inti dan kawasan aktivitas utama, dengan rincian sebagai berikut: *pertama*, Kota Cirebon, Kota Patimban, dan Kertajati Aerocity sebagai kawasan perkotaan inti; dan *kedua*, 13 KPI yaitu KPI Patimban (542 hektare/ha), KPI Cipali Subang Barat (10.408 ha), KPI Cipali Subang Timur (4.806 ha), KPI Cipali Indramayu (2.875 ha), KPI Patrol (4,14 ha), KPI Losarang (6.710 ha), KPI Balongan (2.122 ha), KPI Krangkeng (3.452 ha), KPI Tukdana (563 ha), KPI Kertajati (1.415 ha), KPI Jatiwangi (972 ha), KPI Butom (4,092 ha), dan KPI Cirebon (1.815 ha) sebagai kawasan aktivitas utama.

Arah Pengembangan Investasi di Kawasan Rebana difokuskan pada klaster industri yang tersebar di 13 KPI. Pengembangan investasi di setiap KPI diarahkan pada pengembangan Kawasan Industri (KI) yang bersifat



Sumber: jabarekspres.com

Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Patimban, Subang. Pelabuhan itu jadi salah satu PSN yang telah beroperasi di Kawasan Metropolitan Rebana.

holistik dan integratif. Tidak berfokus pada pengembangan industrinya semata, namun juga berfokus pada penyediaan sarana dan prasarana pendukung atau penyediaan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai.

Pengembangan Kawasan Industri (KI) pada 13 KPI tersebut diharapkan menjadi trigger pertumbuhan ekonomi kawasan perkotaan secara umum dengan industri sebagai kegiatan utamanya. Berikut rincian pengembangan investasi di Kawasan Rebana:

1. KPI Patimban, Kabupaten Subang dengan spesialisasi investasi di industri pengolahan makanan, logam, mesin, elektronika, metal, dan logistik dan pergudangan terpadu;

2. KPI Cipali Subang Barat, Kabupaten Subang dengan spesialisasi investasi di industri kertas dan karton, pengolahan makanan dan minuman, logam, mesin, elektronika/ metal, dan alat transportasi;
3. KPI Cipali Subang Timur, Kabupaten Subang dengan spesialisasi investasi pada industri pengolahan makanan, logam, mesin, elektronika, metal, pertahanan, alat transportasi otomotif dan perkepalan, dan logistik (*dry port*);
4. KPI Krangkeng, Kabupaten Indramayu dengan spesialisasi investasi pada industri kimia hulu (pengolahan garam), bahan penolong, kimia dasar berbasis migas dan batu bara, hulu agro, petrokimia hulu, resin sintetik dan bahan plastik, pengolahan bahan makanan, dan perkapalan;
5. KPI Patrol, Kabupaten Indramayu dengan spesialisasi investasi pada industri kimia hulu (pengolahan garam), pengolahan ikan, bahan penolong, kimia dasar berbasis migas dan batu bara, hulu agro, petrokimia hulu, resin sintetik dan bahan plastik, dan perkapalan;
6. KPI Losarang, Kabupaten Indramayu dengan spesialisasi investasi di industri kimia hulu (pengolahan garam), pengolahan ikan, bahan penolong, kimia dasar berbasis migas dan batu bara, hulu agro, petrokimia hulu, dan resin sintetik dan bahan plastik;
7. KPI Balongan, Kabupaten Indramayu dengan spesialisasi investasi di industri kimia hulu (pengolahan garam), pengolahan ikan, bahan penolong, kimia dasar berbasis



migas dan batu bara, hulu agro, petrokimia hulu, dan resin sintetik dan bahan plastik;

8. KPI Tukdana, Kabupaten Indramayu dengan spesialisasi investasi di industri kimia hulu (pengolahan garam), pengolahan makanan dan minuman, mesin dan alat pertanian, bahan penolong, hulu agro, petrokimia hulu, dan resin sintetik dan bahan plastik;
9. KPI Cipali, Kabupaten Indramayu dengan spesialisasi investasi di industri kimia hulu (pengolahan garam), pengolahan ikan, bahan penolong, kimia dasar berbasis migas dan batubara, hulu agro, petrokimia hulu, resin sintetik dan bahan plastik, pengolahan bahan makanan, metal stamping electrical automotive, knitting (rajut) dan garmen, dan ban dalam dan ban luar sepeda motor;
10. KPI Kertajati-Jatitujuh, Kabupaten Majalengka dengan spesialisasi investasi di Penerbangan, Kargo/logistik, industri elektronik sensor, robotika, alat angkut berbasis elektrik, pertahanan, tekstil, pengolahan makanan dan minuman, dan resin sintetik dan bahan plastik;
11. KPI Jatiwangi, Kabupaten Majalengka dengan spesialisasi investasi di industri Tekstil, pengolahan makanan dan minuman, resin sintetik dan plastik, bahan bangunan, pengolahan hotmix dan beton, clan funitur dan barang dari kayu SIKM Penyedia bahan balrn dan bahan setengah jadi industri bahan bangunan dan perumahan;
12. KPI Butom, Kabupaten Sumedang dengan spesialisasi investasi di industri pengolahan makanan dan minuman,

tekstil, logistik dan pergudangan, agroindustri, dan furnitur dan barang dari kayu; dan

- 13.KPI Cirebon di Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon dengan spesialisasi investasi di industri pengolahan makanan dan minuman, furnitur dan barang dari kayu, perkapalan, pakan, bahan galian nonlogam, bahan bangunan, pengolahan garam konsulasi, dan pengolahan hotmix dan beton.

Pada akhir Juni 2023, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Iendra Sofyan menyebut bahwa pengembangan Kawasan Rebana sudah mencapai kurang lebih 40 persen sejak Perpres 87/2021



Sumber: Pemprov Jabar

Kawasan peruntukkan industri (KPI) Rebana menjadi primadona. Menurut Kepala Badan Pengelola Rebana Bernardus Djonoputro,terdapat 20 perusahaan yang sudah mulai masuk untuk ikut ambil bagian dalam membangun kawasan aerocity di Rebana.

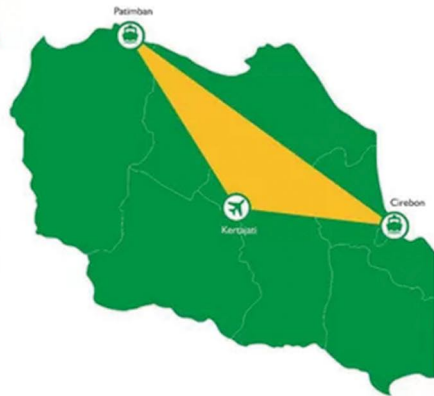
tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Jabarsel diterbitkan. Menurut Iendra Sofyan, pengembangan kawasan tersebut sempat mengalami perlambatan karena dampak pandemi Covid-19. “Saat keluar Perpres tersebut, kita baru saja beranjak pulih dari pandemi, laju pertumbuhan ekonomi kita belum menunjukkan perkembangan yang baik saat itu. Masih ada dampak dari refocusing anggaran dan lain-lain,” jelas Iendra di Bandung, (26/6/2023).

Menurut Iendra, kemajuan sebesar 40 persen dalam dua tahun terakhir terbilang bagus dalam kondisi penataan kembali anggaran daerah dan penentuan skala prioritas pasca pandemi. Adapun pengembangan 40 persen itu bisa dilihat dari progres Jalan Tol Cisumdawu, operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, dan Pelabuhan Patimban. “Itu harus masuk dalam hitungan karena kawasan Rebana masuk dalam Proyek Strategis Nasional, jadi bukan proyek yang dikerjakan oleh provinsi saja,” jelas Iendra.

Sementara beberapa proyek yang berkaitan langsung dengan kinerja Provinsi Jabar menurut Iendra, di antaranya adalah pengembangan kawasan industri di Rebana. Dari delapan investasi pengembangan industri yang ditawarkan oleh Bappeda Jabar, saat ini sudah ada lima investor yang menyatakan kesiapannya, tiga di antaranya sudah mulai melakukan pembangunan. Beberapa merupakan industri teknologi seperti barang elektronik. Dengan dibentuknya Badan Khusus Pengembangan Kawasan Rebana, progres pembangunan kawasan tersebut diharap bisa lebih cepat rampung dan terwujud seutuhnya pada 2030.

# SEGITIGA REBANA

Terletak diantara Pelabuhan Patimban, Bandara Kertajati, dan Pelabuhan Cirebon



## Ilustrasi Kawasan Rebana

Sumber: Bappeda Jabar

Kawasan Rebana digadang-gadang akan menjadi kota metropolitan ketiga di Jabar setelah Bogor, Depok, Bekasi, dan Bandung Raya. Rebana diharapkan akan menjadi wilayah regional paling lengkap di Indonesia. Ada Pelabuhan Internasional Patimban sebagai pintu penggerak ekonomi skala regional di Jabar juga berdekatan dengan Bandara Internasional Kertajati yang fungsinya tidak hanya mengangkut penumpang dan kargo, namun juga untuk perawatan pesawat atau *Maintenance, Repair, Overhaul* (MRO). Rebana juga terkoneksi Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) dan jalur kereta api arah Cirebon dan

Surabaya. Keduanya merupakan infrastruktur yang akan memudahkan koneksi intermoda di dalam kawasan.

Pada 9 Agustus 2023, Badan Pengelola Kawasan Metropolitan Rebana (BP Rebana) mendapatkan dukungan asistensi dari World Resources Institute (WRI) Indonesia untuk mengembangkan kawasan industri hijau berbasis energi bersih dan teknologi rendah karbon, dan berdaya saing tinggi. Kerja sama ini secara resmi disahkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh BP Rebana dan WRI Indonesia yang dilaksanakan hari ini di acara West Java Investment Summit (WJIS).

Melalui skema kolaborasi di bawah program Climate Solution Partnership (CSP), dukungan WRI Indonesia akan meliputi: *Pertama*, penelitian dan pengembangan, serta implementasi strategi dan kebijakan pembangunan; *Kedua*, peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan *ketiga*, pelaksanaan strategi komunikasi. Adapun rencana produk yang dihasilkan dari kerjasama ini seperti pemetaan teknologi dekarbonisasi untuk kelima sektor industri strategis di Kawasan Rebana, analisis kerangka pikir pembangunan kawasan industri rendah emisi atau Sustainable Industrial Estate (SIE) Framework, dan skema pembiayaan potensial untuk dekarbonisasi kawasan industri. Kelima sektor industri strategis yang dimaksud adalah makanan, tekstil dan pakaian, kimia dasar, bangunan komersil, otomotif berbasis listrik (EV).

Kepala Badan BP Rebana, Bernardus Djonoputro menyampaikan bahwa sebagai kawasan industri strategis di Jawa Barat, Kawasan Rebana menaungi 13 kawasan industri



Asisten Deputy Infrastruktur Pengembangan Wilayah Kemenko Marves, Djoko Hartoyo (kedua dari kiri) meninjau pembangunan Kawasan Industri Subang Smartpolitan yang menjadi salah satu proyek strategis nasional dalam Perpres 87/2021. Subang, 13 Februari 2023.

Sumber: Dokumentasi Asdep IPW Kemenko Marves

seluas 43.913 hektare dan memiliki 9,28 juta penduduk, yang merepresentasikan hampir 20% dari total penduduk Jawa Barat. “Kerja sama strategis antara BP Rebana dan WRI Indonesia melalui asistensi untuk dekarbonisasi industri, kami harapkan dapat mendukung pencapaian visi kawasan ini sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Jawa Barat lewat pengembangan kawasan industri yang terintegrasi serta rendah emisi,” paparnya.

Country Director WRI Indonesia, Nirarta Samadhi menyatakan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi



kesempatan menjadi knowledge partner BP Rebana untuk merealisasikan dekarbonisasi industri dan mewujudkan Kawasan Rebana sebagai kawasan industri yang rendah emisi serta semakin berdaya saing tinggi. “Kami memahami peran sentral BP Rebana dalam menentukan strategi pengelolaan dan arah kebijakan, serta mengawasi aktivitas industri di Kawasan Rebana. Oleh karena itu, kami harapkan asistensi yang WRI Indonesia berikan dapat mendorong visi Kawasan Rebana sebagai kawasan industri rendah emisi yang kompetitif secara ekonomi, serta tidak mengabaikan aspek keberlanjutan sosial dan lingkungan, khususnya bagi warga lokal,” ujarnya.

Sektor industri diperkirakan akan menghasilkan emisi gas rumah kaca sebesar dua kali lipat di tahun 2030<sup>1</sup> dan merupakan salah satu sektor penyumbang emisi terbesar di Indonesia. Hal ini perlu diatasi dengan cepat dan efektif mengingat peran sentral sektor industri sebagai penggerak ekonomi nasional. Oleh karena itu, upaya mewujudkan praktik bisnis emisi rendah melalui dekarbonisasi industri menjadi sangat krusial dan intervensi di tingkat Industrial Estate (IE) atau Kawasan Industri, seperti di Kawasan Rebana, memiliki peran kunci dalam mempercepat dekarbonisasi dan mendukung target nasional untuk mencapai Emisi Nol Bersih 2060.

Kawasan Rebana diharap bisa menyerap 4,49 juta tenaga kerja jika pengembangannya berjalan dengan baik. Rebana juga akan menjadi penggerak ekonomi Jabar yang mendukung kawasan industri yang saat ini berjalan di Bekasi dan Karawang. Menurut Kepala Dinas Penanaman

Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat, Nining Yulianti, Rebana sudah ditunjang lengkap dari sisi regulasi, RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) daerah, dan infrastruktur. Jika rencana berjalan dengan baik, maka pada 2030 kawasan ini akan memacu pertumbuhan ekonomi Jabar melejit hingga 7,16 persen.

Pasca peresmian Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) pada 11 Juli 2023 dan beroperasinya Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati, Kabupaten Majalengka secara penuh di bulan Oktober 2023, maka semakin memudahkan akses transportasi menuju kawasan industri Rebana Jabar. Akses jalan nasional, provinsi, jalan tol, udara hingga laut melalui Pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang membuat kawasan industri Rebana



Caption: Foto udara aliran Sungai Cimanuk Bendung Rengas dari saluran irigasi pemanfaatan Bendungan Jatigede di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

Sumber: ANTARA JABAR/Adeng Bustomi/agr

Jabar menjadi primadona investasi. Nining Yuliastiani menyebutkan, investasi yang saat ini sudah terealisasi atau sudah berjalan sebanyak 28 industri dan ada tujuh investasi sedang berproses dan bakal beroperasi penuh tahun 2024. Kemudian 11 industri lainnya masuk perencanaan, dalam arti sudah memiliki lahan dan tinggal dibangun di Kota dan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Subang.

Pengembangan bukan hanya dalam pembangunan industri manufaktur, namun juga industri pendukung lainnya seperti akomodasi hingga leisure sesuai kriteria dan potensi masing-masing daerah yang memiliki KPI. Misalnya, Kabupaten Kuningan akan menjadi pusat industri wisata masa depan di kawasan Rebana. Menurut Nining dari 13 KPI itu terbanyak ada di Indramayu. Di sisi lain, banyak tantangan yang harus diselesaikan di Indramayu dan wilayah lain seperti meningkatkan kualitas SDM, pengentasan kemiskinan, dan menekan angka pengangguran. Selain dari investor, pemerintah juga terus mendukung pembangunan 81 infrastruktur dasar di kawasan Rebana senilai Rp234,59 triliun.

## Arah Pengembangan Kawasan Jabarsel

*Pembangunan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Jabarsel) ditetapkan meliputi 6 kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Uniknya, setiap kabupaten tersebut memiliki titik fokus pengembangan yang berbeda-beda.*

Pembangunan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Jabarsel) ditetapkan meliputi 6 kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Yaitu Kabupaten Pangandaran, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Cianjur, dan Sukabumi. Keenam kabupaten tersebut memiliki titik fokus pengembangan yang berbeda-beda dengan rincian sebagai berikut:

1. Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Sukabumi diarahkan untuk dikembangkan menjadi kawasan ekonomi baru berbasis pariwisata serta kegiatan perikanan;

2. Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur diarahkan sebagai kawasan pengembangan dengan basis kegiatan agribisnis dan perikanan;
3. Kabupaten Ciamis diarahkan menjadi sebagai kawasan pengembangan dengan basis kegiatan agribisnis; dan
4. Kabupaten Tasikmalaya difokuskan menjadi kawasan pengembangan ekonomi baru berbasis kegiatan perikanan;

Kawasan pengembangan di setiap kabupaten didukung dengan pembangunan dan pengembangan infrastruktur pendukung, seperti infrastruktur dasar, perhubungan, jalan, sumber daya air, maupun infrastruktur lainnya. Dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2021, arah fungsi kawasan



Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah (Asdep IPW) Kemenko Marves, Djoko Hartoyo membuka FGD tentang Pengembangan Wilayah Kabupaten Garut pada Kamis, 6 Juli 2023 di Garut. Garut termasuk wilayah Jabarsel yang akan dikembangkan.

Sumber: Dokumentasi Asdep IPW Kemenko Marves

Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah (Asdep IPW) Kemenko Marves, Djoko Hartoyo memberi masukan terkait Pengembangan Pariwisata Pangandaran dalam Semiloka Pengembangan Kawasan Wisata Pangandaran di Bandung (19/10/2023).

Sumber: Dokumentasi Asdep IPW Kemenko Marves



di Rebana dan Jabarsel secara umum dibagi menjadi 4 jenis, yaitu Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), serta Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

Wilayah Pangandaran, Palabuhanratu, Kota Sukabumi, dan Cidaun ditetapkan sebagai PKW dengan peran untuk melayani kegiatan skala nasional. Sementara Wilayah Rancabuaya dan Banjarsari didorong menjadi PKL yang masing-masing mempunyai fungsi tertentu dengan skala pelayanan kabupaten/kota dan beberapa kecamatan. Adapun wilayah Jampang Kulon, Sagaranten, Sukanagara, Sindangbarang, Cikajang, Pameungpeuk, Karangnunggal, Parigi, dan Cikatomas menjadi PKL dengan wilayah pelayanan kabupaten/kota dan beberapa kecamatan.

Pengembangan kawasan Jabarsel mengusung konsep pengembangan wilayah yang terpadu dengan basis Sumber Daya Alam (SDA). Konsep pengembangan



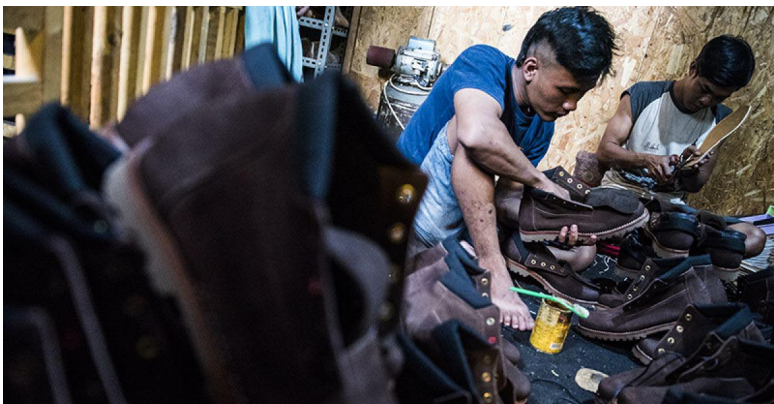
wilayah terpadu ini diharapkan bisa menghasilkan *spread-effect* yang memberikan pengaruh positif antar wilayah serta menghasilkan keseimbangan pembangunan dengan memanfaatkan tiga sektor potensial, yaitu agribisnis, perikanan, dan pariwisata.

Arah pengembangan investasi di Kawasan Jabarsel mencakup sektor perdagangan, perkebunan, pariwisata, pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan. Dari sektor perdagangan, ruang investasi diarahkan pada pembangunan sarana distribusi perdagangan, berupa pusat distribusi klaster Sistem Resi Gudang (SRG) 2 unit, dan pusat distribusi klaster SRG. Di Jabarsel sendiri terdapat pusat distribusi klaster SRG 2 Unit di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten



Ilustrasi nelayan di Sukabumi, Jabar. Dalam Perpres 87/2021, Kabupaten Sukabumi diarahkan untuk dikembangkan menjadi kawasan ekonomi baru berbasis pariwisata serta kegiatan perikanan.

Sumber: bojongraharja.com



Ilustrasi pekerja menyelesaikan pembuatan sepatu kulit Sneaker di industri kecil dan menengah (IKM) Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Sumber: ANTARA JABAR/M Agung Rajasa

Ciamis. Pusat distribusi klaster SRG terdapat di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran.

Dari klaster perkebunan, ruang investasinya diarahkan pada pengembangan kawasan perkebunan berbasis korporasi, pengembangan sistem informasi, pengembangan desa kopi organik, pembangunan sub terminal agribisnis kelapa, kopi, dan teh. Kawasan Jabarsel sudah sejak lama memiliki potensi perkebunan, diantaranya adalah penghasil kakao, kopi, aren, karet, dan kelapa. Adapun ruang investasi di bidang hortikultura, diarahkan pada peningkatan produksi dan produktivitas komoditas hortikultura, serta penerapan teknologi budidaya tanaman hortikultura yang berkelanjutan.

Dari sektor peternakan dan perikanan, ruang investasi diarahkan pada budidaya dan pengembangan bisnis tambak dan ternak. Komoditas tambak yang didorong antara lain adalah udang. Budidaya udang diarahkan pada penataan kawasan tambak. Sementara untuk klaster ternak dan perikanan, ruang investasi difokuskan pada pengembangan minapolitan, pengembangan fasilitas bisnis perikanan laut, serta pengembangan dan penataan kawasan peternakan unggulan. Di Kawasan Jabarsel, pengembangan klaster diarahkan pada Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), dan pengembangan klaster temak.

Dari sisi pariwisata, ruang investasi diarahkan dan difokuskan pada pengembangan destinasi pariwisata provinsi; pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi; kawasan pengembangan pariwisata provinsi; peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata berstandar internasional; pengembangan desa wisata; pembangunan pusat budaya; pengembangan Geopark Jawa Barat; pembangunan gedung *creative center*; dan pengembangan aksesibilitas menuju daya tarik wisata dan destinasi pariwisata.

Terkait destinasi pariwisata, saat ini di Kawasan Jabarsel telah memiliki 4 klaster kawasan wisata, yaitu kawasan pariwisata Pangandaran-Tasikmalaya-Garut, kawasan strategis pariwisata budaya Priyangan dan Alam Bahari, kawasan strategis wisata Pantai Apra-Cipatujah, dan kawasan strategis Geowisata Palabuhanratu-Ciletuh-Ujung Genteng.

Medio Kamis, 19 Oktober 2023, Pejabat Gubernur Jawa Barat Bayu Machmudin sempat menyebut bahwa Jababarsel memiliki potensi pariwisata luar biasa. Salah satu yang disinggung adalah Pariwisata di Kabupaten Pangandaran. Menurut Bayu, Pangandaran merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Jabar yang sering dikunjungi dengan beragam potensi dan daya tarik baik berupa pantai pasir putih, ombak yang besar bagi peselancar, cagar alam, budaya lokal hingga kuliner yang khas.

Oleh karena itu Pemprov Jabar melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jabar mendukung pembangunan infrastruktur di Pangandaran untuk mempermudah akses bagi wisatawan. Selain akses jalan, potensi lain pun harus dikembangkan mulai dari sumber daya alam, sumber daya manusia, juga penduduk sehingga bisa menjadi pelaku usaha. Namun yang terpenting adalah bagaimana masyarakat mempunyai kesadaran dalam menjaga kebersihan maupun keelokan tempat wisata.

“Maka harus dioptimalkan kemanfaatannya ataupun promosinya. Itu semua menjadi usaha kita bersama menjadikan Pangandaran sebagai tempat wisata yang dikenal. Dengan adanya Perpres Nomor 87 Tahun 2021, diharapkan bisa semakin meningkatkan daya saing dan kualitas pariwisata Pangandaran. Perpres ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Jababarsel), termasuk Pangandaran,” ungkap Bayu saat Semiloka Pengembangan Kawasan Wisata Pangandaran yang dihelat di Bandung (19/10/2023).







Sumber: [blog.tiket.com](https://blog.tiket.com)



Kepala Bappeda Jabar, Iendra Sofyan menyebut bahwa Jawa Barat (Jabar) merupakan provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia. Untuk mengembangkan 27 Kab/Kota di Jabar dibutuhkan investasi sebesar Rp 1.143 triliun. Dalam waktu dekat ini, ada tiga kawasan yaitu Pelabuhan Ratu, Cidaun, dan Pangandaran yang akan dikembangkan untuk pusat kegiatan pariwisata. Menurut Iendra, pengembangan pariwisata di Jabarsel bisa menyontoh pengembangan Sai Kung di Hongkong, yaitu kawasan perdesaan yang menjadi bagus dan mendunia karena wilayahnya berkembang dari sisi pariwisata dengan kampung nelayan. Sai Kung menjadi contoh yang menarik, bagaimana pengembangan daerah tidak hanya ditentukan dari adanya bangunan fisik, tapi juga masyarakatnya yang sejahtera. Saat ini hampir semua Kab/Kota di Jabar sekitar 30 persennya disokong dari PAD, sedangkan sisanya berasal dari dana transfer Pemprov maupun Pusat.

Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah Kemenko Marves, Djoko Hartoyo menyinggung pentingnya koordinasi untuk pembangunan Jabarsel. Dengan koordinasi yang baik dari semua pihak, maka semua masalah terkait pengembangan wilayah bisa ditangani bersama. Asdep Djoko menegaskan bahwa Kemenko Marves siap memfasilitasi siapapun yang mau maju dan berkembang. Di satu sisi, Asdep Djoko juga sepakat bahwa akses udara dan darat dari dan menuju Pangandaran, dan juga destinasi wisata lainnya di Jabarsel perlu dipercepat. Sepererti adanya ada tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap yang memangkas waktu tempuh dari Cirebon ke Pangandaran menjadi hanya 2,5 jam saja.

Namun begitu, Asdep Djoko juga mengingatkan bahwa di Jabarsel masih banyak lokasi yang menjadi destinasi wisata merupakan daerah rawan bencana yang memiliki potensi gempa bumi maupun tsunami. Oleh sebab itu semua pihak harus bisa mensosialisasikan ke masyarakat. Di sisi lain, Asdep Djoko juga mengingatkan bahwa selama ini kendala dalam implementasi dan percepatan Perpres 87/2021 umumnya ada di masalah lahan, terutama karena tidak tersedianya dokumen RTRW dan RDTR. Sehingga ini menjadi perhatian dan sesiapan Pemda dalam menyiapkan lahan dan dokumen tersebut.

Dalam prosesnya, Kemenko Marves melalui Asdep IPW juga telah melakukan studi sosial terkait pengembangan Desa Wisata dan Desa Konservasi di Kabupaten Kuningan (2022) dan di Kabupaten Majalengka (2023) yang memang menjadi program P1 di Perpres 87/2021. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut, Asdep IPW terus memfasilitasi untuk mengkoordinasikan dengan kementerian teknis terkait apa-apa yang diperlukan, terutama kegiatan di lingkup pengembangan wilayah.

Adapun dalam konteks Perpres 87/2021, semua pihak lintas kementerian/lembaga sudah berkomitmen bahwa Kemenko Marves adalah sebagai lead. Dari anggaran yang ada, Kemenko Marves telah menggunakan 70 persennya untuk memfasilitasi dan menyelesaikan *bottle necking* dalam pengembangan wilayah. Namun demikian, perlu diakui juga bahwa tidak semua daerah memiliki kecepatan dan progres pembangunan yang sama, sehingga dalam hal ini, pemerintah daerah harus bergerak lebih aktif dan agresif.

Pengembangan wilayah di Jabarsel ke depannya akan mencakup berbagai bidang, baik ekonomi, infrastruktur, transportasi, sosial, dan lainnya. Pembangunan Jabarsel tidak akan direpresentasikan sama seperti pembangunan Kawasan Rebana di Utara Jabar, mengingat karakter masyarakat, budaya, alam, dan lingkungannya yang jauh berbeda. Banyaknya lokasi dan kawasan hijau di Jabarsel telah mendorong Perpres 87/2021 untuk mengembangkan sisi Jabarsel dengan tetap mempertahankan fungsi lingkungan dan fungsi konservasinya.

Maka pengembangan sektor pertanian, perikanan, energi, dan pariwisata di Jabarsel harus tetap memperhatikan fungsi konservasi dan lingkungan hidup tersebut. Pengembangan sentra ekonomi baru di Jabarsel jangan sampai membuat lingkungan rusak. Pembangunan jalan lintas Jabarsel, dari Pangandaran ke Palabuhanratu misalnya, jangan sampai membuat kawasan hijau yang ada di sekitarnya hancur.

Pembangunan kawasan wisata di Jabarsel akan terus didorong untuk memaksimalkan potensi alam yang ada. Bagaimana kawasan dan potensi wisata alam ini bisa berkembang dan dijual kepada turis asing maupun domestik. Dari pengembangan destinasi wisata alam itu, diharap akan memacu timbulnya usaha-usaha pendukung lainnya, mulai dari penyedia paket wisata, tur guide, penginapan, usaha kuliner, cinderamata, dan lain sebagainya.

## Rencana Induk Kawasan Rebana

*Perpres 87/2021 menegaskan bahwa percepatan pembangunan kawasan Rebana akan mendapatkan dukungan penuh dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan juga kerja sama dengan daerah lain maupun pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*

**P**ercepatan pembangunan Kawasan Rebana sebagai kota metropolitan baru di Jawa Barat mendapatkan dukungan penuh seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Dalam aturan yang diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 9 September 2021 itu, aturan ini terbit untuk mempercepat pembangunan kawasan Rebana dan kawasan Jawa Barat bagian Selatan.

“Perlu dilakukan langkah strategis dan terintegrasi secara terarah, fokus, terukur dan tepat sasaran. Percepatan pembangunan kawasan Rebana dan kawasan Jawa Barat bagian Selatan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dalam rencana induk pembangunan kawasan,” demikian tulis pertimbangan aturan tersebut, seperti dikutip laman Sekretariat Negara, Kamis (30/9/2021). Aturan tersebut menegaskan bahwa percepatan pembangunan kawasan tersebut akan mendapatkan dukungan penuh dari kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda).

Setiap K/L maupun Pemda juga dapat melakukan kerja sama dengan daerah lain maupun pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, pendanaan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kerja sama pemerintah dengan badan usaha, dan sumber pembiayaan lain. Aturan ini berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 10 September 2021. Sejak aturan ini berlaku, maka menteri, gubernur, bupati maupun wali kota wajib menyesuaikan dokumen perencanaan dengan berpedoman pada aturan ini.

Pengembangan Kawasan Rebana disusun dan tertuang pada Rencana Induk yang di dalamnya memuat rencana-rencana proyek kurun waktu tahun 2021-2030. Penyusunan proyek dan program dalam Rencana Induk disertai dengan judul, lokasi, tahun pelaksanaan, penanggung jawab, indikasi anggaran, dan sumber dananya. Rencana proyek dan program diarahkan pada upaya pencapaian tujuan dan sasaran pengembangan, berupa:

1. Rencana Induk Penyediaan dan Peningkatan Infrastruktur Transportasi Jalan;
2. Rencana Induk Penyediaan dan Peningkatan Infrastruktur Perhubungan;
3. Rencana Induk Penyediaan dan Peningkatan Infrastruktur Dasar;
4. Rencana Induk Pembangunan dan Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air; dan
5. Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur Lainnya.

Rencana Induk Penyediaan dan Peningkatan Infrastruktur Transportasi Jalan berupa proyek dan program yang merupakan turunan dari kebijakan dan strategi. Kebijakan dan strategi utama yang mendasari Rencana Induk ini yaitu Pembangunan Jalan Bebas Hambatan; serta Pembangunan dan Peningkatan Jalan.

Adapun pembangunan Jalan Bebas Hambatan yang direncanakan yaitu: 1) Pembangunan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Seksi 3-6) di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Sumedang; 2) Pembangunan Akses Tol Cipali (Subang KM 89 Patimban) di Kabupaten Subang; 3) Pembangunan Interchange KM 115 (Manyingsal) Cipali – Patimban di Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang; dan 4) Pembangunan Jalan Tol Kertajati – Indramayu di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayu.

Sedangkan Pembangunan dan Peningkatan Jalan yang direncanakan meliputi:



- 1) Pembangunan Jalan Lingkar Luar Kota Subang di Kabupaten Subang;
- 2) Pembangunan Jalur Pamanukan – Patimban di Kabupaten Subang;
- 3) Pembangunan Jalur Cilamayu – Patimban di Kabupaten Subang;
- 4) Pembangunan Jalur Sarangpanjang – Cipeundeuy di Kabupaten Subang;
- 5) Pembangunan Jalan Akses Cisumdawu – BIJB di Kabupaten Majalengka;
- 6) Pembangunan Jalan Bantarwaru – Haurgeulis – Patrol di Kabupaten Indramayu;
- 7) Pembangunan Jalan Lingkar Cigugur – Cisantana di Kabupaten Kuningan;
- 8) Pembangunan Jalan Alternatif Ruas Jalan Nasional Cirebon – Ciamis (Segmen Cipasung – Cikijing – Panawangan) di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka;
- 9) Pembangunan Jalan Lingkar Timur Selatan di Kabupaten Kuningan;
- 10) Pembangunan Jalan Lingkar Sumber – Talun Cisaat di Kabupaten Cirebon;
- 11) Pelebaran Jalan dan Jembatan Jatitujuh – Ligung di Kabupaten Majalengka;
- 12) Pelebaran Jalan Legok – Conggeang (Interchange Cisumdawu – Legok) di Kabupaten Sumedang;
- 13) Pelebaran Jalan Conggeang – Buah Dua di Kabupaten Sumedang;
- 14) Pelebaran Jalan Cimalaka – Cipadung (Interchange Cisumdawu – Cimalaka) di Kabupaten Sumedang;

- 15) Pelebaran Jalan Conggeang – Ujungjaya di Kabupaten Sumedang;
- 16) Peningkatan Jalan Cipendeuy – Pabuaran di Kabupaten Subang;
- 17) Pelebaran Jalan Kabupaten (Pusakanagara – Patimban) di Kabupaten Subang;
- 18) Pelebaran Jalan Provinsi (Kadipaten – Jatibarang) di Kabupaten Indramayu;
- 19) Pelebaran Ruas Jalan Cipasung – Subang – Cilebak (Kabupaten Kuningan) – Kutaagung/Dayeuh Luhur (Kabupaten Cilacap); dan
- 20) Pelebaran Jalan Pangkalan Damri – Kiarapayung (Exit Ramp Cisumdawu – Jatinangor) di Kabupaten Sumedang.



Pemandangan udara proyek Jalan Tol Cisumdawu. Tol Cisumdawu mempersingkat jarak tempuh dari Bandung ke Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati di Majalengka menjadi 45 menit hingga maksimal satu jam.

Sumber: ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi



Foto udara pekerja mengoperasikan alat berat saat menyelesaikan proyek pembangunan Subang Smartpolitan tahap pertama di kawasan Rebana Metropolitan, Subang, Jawa Barat, Selasa (29/3/2022).

Sumber: ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar

Rencana Induk Penyediaan dan Peningkatan Infrastruktur Perhubungan berupa proyek dan program turunan dari kebijakan dan strategi Kebijakan dan strategi utama yang mendasari Rencana Induk ini, yaitu perencanaan sistem jaringan transportasi darat.

Adapun penyediaan dan peningkatan infrastruktur perhubungan yang direncanakan meliputi: 1) Reaktivasi Rel KA Rancaekek – Tanjungsari di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang; 2) Pembangunan Kereta Cepat Bandung – Kertajati di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Majalengka; 3) Pembangunan Rel KA Subang – Patimban di Kabupaten Subang; 4) Pembangunan Rel KA

Semi Cepat Jakarta – Surabaya di Kabupaten Indramayu; 5) Pembangunan Terminal Tipe B Ciledug di Kabupaten Cirebon; dan 6) Pembangunan Terminal Tipe B Indramayu di Kabupaten Indramayu.

Rencana Induk Penyediaan dan Peningkatan Infrastruktur Dasar berupa proyek dan program yang merupakan turunan dari kebijakan dan strategi yang mencakup peningkatan sarana dan prasarana persampahan; sarana dan prasarana air limbah; serta sarana dan prasarana permukiman.



Jalan tol Cisumdawu yang sudah beroperasi. Tol Cisumdawu berada di cekungan yang dikelilingi tiga gunung vulkanik, yakni Gunung Tampomas, Manglayang, dan Patuha. Jalan tol sepanjang 60,84 km tersebut dibangun melintasi perbukitan, membuat konstruksi tol ini sebagai salah satu yang terindah di Indonesia.

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Sarana dan Prasarana Persampahan yang direncanakan yaitu: 1) Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Jalupang di Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang; 2) Pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Cirebon Raya di Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon; 3) Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Heuleut di Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka; dan 4) Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kawasan Industri Terpadu (KIT) Subang di Manyingsal, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang.

Sementara untuk Sarana dan Prasarana Air Limbah yang direncanakan adalah Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terintegrasi Kawasan Industri Terpadu (KIT) Subang di Manyingsal, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang. Sedangkan untuk Sarana dan Prasarana Permukiman yang direncanakan meliputi:

- 1) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Industri Terpadu (KIT) Subang di Manyingsal, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang;
- 2) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Cirebon Raya (SPAM Jatigede) Tahap 1 di Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon;
- 3) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Cirebon Raya (SPAM Jatigede) Tahap 2 di Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon;



- 4) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Skala Kota Daerah Pelayanan Kuningan – Cirebon – Brebes di Kabupaten Kuningan;
- 5) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Kuningan (Sumber Mata Air Darmaloka, Cigugur, Cibulan) di Kabupaten Kuningan;
- 6) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Cipanas di Kabupaten Sumedang;
- 7) Pembangunan Rumah Susun Pekerja Kawasan Industri Terpadu (KIT) Subang di Manyingsal, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang; dan
- 8) Pembangunan Rumah Susun Pekerja Subang Smartpolitan di Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang.



Ilustrasi petugas mengecek pompa utama Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Berdasarkan Perpres 87/2021, ada 6 SPAM yang akan dibangun di Kawasan Rebana.

Sumber: ANTARA FOTO



Rencana Induk Pembangunan dan Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air berupa proyek dan program yang merupakan turunan dari tiga kebijakan dan strategi utama, yaitu Pembangunan Waduk/Bendungan; Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir; dan Infrastruktur Irigasi.

Pembangunan Waduk/Bendungan yang direncanakan meliputi: 1) Pembangunan Waduk/Bendungan Kadumanik di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Sumedang; 2) Pembangunan Waduk/Bendungan Cinupagara di Kabupaten Subang; 3) Pembangunan Waduk/Bendungan Gunungkarung di Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan; 4) Rehabilitasi Waduk/Bendungan Darma di Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan; dan 5) Pembangunan Waduk Cipanundan di Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon.

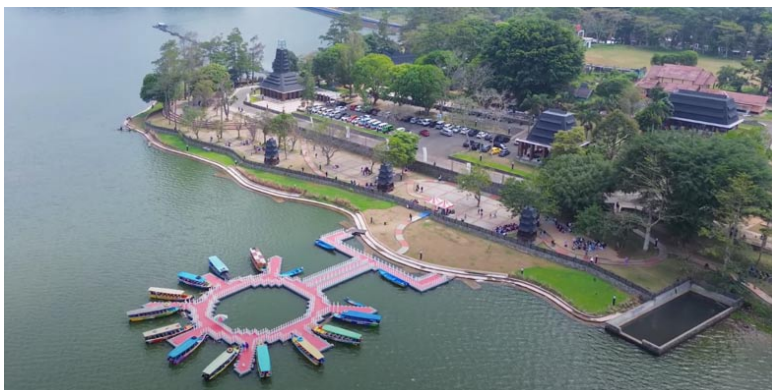
Sementara Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir yang direncanakan meliputi: 1) Pengendalian Banjir Kawasan BIJB (Normalisasi Sungai Cibolerang, Revitalisasi Situ Cijawura dan Cimaneh) di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka; 2) Pembangunan Embung Rancah Hilir di Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang; 3) Pengendalian Banjir Sungai DAS Cisanggarung, Citaal, Cijangkelok, Cibat, dan Cipanundan di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon; 4) Pembangunan Embung Winduhaji, Waled Asem, Suranenggala, Bangko Lur, Cikeusal di Kecamatan Sodong, Waled, Gempol, Suranenggala, Kapetakan, Kabupaten Cirebon; 5) Pengendalian Banjir di Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang; dan 6) Program Pengembangan Desa

Konservasi di 100 Desa yang tersebar di Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan.



Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisarung, Ditjen Sumber Daya Air, telah menyelesaikan pembangunan Bendungan Cipanas di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Bendungan berkapasitas 250,81 juta m<sup>3</sup> ini dimanfaatkan sebagai tampungan air mendukung irigasi pertanian dan sumber air baku di Kabupaten Indramayu dan Sumedang.

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)



Waduk/Bendungan Darma di Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan yang akan dilakukan rehabilitasi, berdasarkan Perpres 87/2021.

Sumber: Drone Langit Kelabu

Adapun dari sisi Infrastruktur Irigasi yang direncanakan meliputi: 1) Rehabilitasi tuntas daerah irigasi (DI) Cikeusik di Kabupaten Kuningan dan DI Seuseupan di Kabupaten Cirebon; 2) Pembangunan Daerah Irigasi (DI) Cileuweung di Kecamatan Cibingbin dan Cibeureum, Kabupaten Kuningan; dan 3) Pembangunan Daerah Irigasi (DI) Jangkelok di Kecamatan Cibingbin dan Cibeureum, Kabupaten Kuningan.

Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur Lainnya adalah proyek dan program yang merupakan turunan dari kebijakan dan strategi yang meliputi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM); Pengembangan Daya Saing Kawasan; Pengembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan; Pengembangan Infrastruktur Energi; dan Pengembangan Kawasan Industri (KI).

Dari sisi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), program yang direncanakan meliputi: 1) Pembangunan Pusat Pendidikan Vokasi dan/atau Pelatihan Vokasi di Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang; 2) Pembangunan Akademi Maritim di Kecamatan Pusanagara, Kabupaten Subang; 3) Pembangunan Politeknik Manufaktur Kampus II di Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka; dan 4) Pengembangan Institut Teknologi Bandung Kampus Cirebon di Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon.

Untuk Daya Saing Kawasan, program yang direncanakan meliputi: 1) Pembangunan Gedung *Creative Center* di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan; 2) Pembangunan Gedung Pusat Budaya di Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan



Ilustrasi Kawasan Rebana dan Jabarsel diperkirakan akan menyerap investasi hingga Rp 392 triliun.

Sumber: ANTARA FOTO/Dedhez Anggara

Kabupaten Sumedang; 3) Penataan Kawasan Waduk Jatigede sebagai Destinasi Wisata di Kabupaten Sumedang; 4) Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan di Kecamatan Losari, Gebang, Pangenan, Astanajapura, dan Mundu. Sarana Penangkaran Ikan juga akan dibangun di Kecamatan Lemahwungkuk dan Kecamatan Pusakanagara; 5) Pengembangan Kawasan Agribisnis Berbasis Korporasi Petani di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Kuningan; dan 6) Pengembangan Desa Digital di Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang; Kabupaten Indramayu; Kabupaten Cirebon; dan Kabupaten Sumedang.

Sementara untuk Sarana dan Prasarana Kesehatan yang direncanakan yaitu: 1) Pengembangan Rumah Sakit Cideres Tipe B di Kabupaten Majalengka; 2) Pembangunan Rumah Sakit Cipeundeuy Tipe A di Kabupaten Subang; dan 3) Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pantura di Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang.

Pemerintah juga berencana membangun Infrastruktur Energi yang meliputi: 1) Pembangunan Pembangkit Listrik

Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Tampomas di Kabupaten Sumedang; 2) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sangkahurip Ciremasi di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka; 3) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede di Kabupaten Sumedang; dan 4) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Wado di Kabupaten Sumedang.

Untuk Kawasan Industri (KI), pemerintah berencana melakukan pembangunan berupa: 1) Pengembangan Kawasan Industri (KI) Subang Smartpolitan di Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang; 2) Pengembangan Kawasan Industri (KI) Taifa di Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang; 3) Pengembangan Kawasan Industri (KI) Rebana Teknopolis di Kecamatan Cibogo, Cipeundeuy, dan Kalijati di Kabupaten Subang; 4) Pengembangan Kawasan Industri (KI) Grand Rebana di Manyingsal, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang; 5) Pengembangan Kawasan Industri (KI) Petrokimia Balongan di Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu; 6) Pengembangan Kawasan Industri (KI) Sultan Werdinata di Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu; dan 8) Pengembangan Kawasan Industri (KI) Kertajati di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka.

Berdasarkan Perpres 87/2021 tersebut, pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dalam Rencana Induk Pembangunan Kawasan sebagaimana telah diuraikan di atas. Rencana Induk tersebut menjadi pedoman untuk menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk menyusun kebijakan sektoral yang terkait dengan dua super kawasan ekonomi baru tersebut.

## **Rencana Induk Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan**

*Perpres 87/2021 menegaskan bahwa percepatan pembangunan kawasan Jabarsel akan mendapatkan dukungan penuh dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan juga kerja sama dengan daerah lain maupun pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

**P**ercepatan pembangunan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Jabarsel) sebagai kawasan ekonomi baru di Jawa Barat mendapatkan dukungan penuh seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Dalam aturan yang diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 9 September 2021 itu, aturan ini terbit untuk mempercepat pembangunan kawasan Rebana dan kawasan Jawa Barat bagian Selatan.





Presiden RI Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Bocimi Seksi 2 Cigombong – Cibadak, dihadiri Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, 4 Agustus 2023.

Sumber: ANTARA/Aji Cakti

“Perlu dilakukan langkah strategis dan terintegrasi secara terarah, fokus, terukur dan tepat sasaran. Percepatan pembangunan kawasan Rebana dan kawasan Jawa Barat bagian Selatan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dalam rencana induk pembangunan kawasan,” demikian tulis pertimbangan aturan tersebut, seperti dikutip laman Sekretariat Negara, Kamis (30/9/2021). Aturan tersebut menegaskan bahwa percepatan pembangunan kawasan tersebut akan mendapatkan dukungan penuh dari kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda).

Setiap K/L maupun Pemda juga dapat melakukan kerja sama dengan daerah lain maupun pihak ketiga

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, pendanaan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kerja sama pemerintah dengan badan usaha, dan sumber pembiayaan lain. Aturan ini berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 10 September 2021. Sejak aturan ini berlaku, maka menteri, gubernur, bupati maupun wali kota wajib menyesuaikan dokumen perencanaan dengan berpedoman pada aturan ini.

Pengembangan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Jabarsel) disusun dan tertuang pada Rencana Induk yang didalamnya memuat rencana proyek dan program kurun waktu tahun 2021-2030. Terdapat 81 program pengembangan di Kawasan Jabarsel. Penyusunan proyek dan program dalam Rencana Induk disertai dengan judul, lokasi, tahun pelaksanaan, penanggung jawab, indikasi anggaran, dan sumber dananya. Rencana proyek dan program Jabarsel diarahkan pada upaya pencapaian tujuan dan sasaran pengembangan Jabarsel, berupa:

1. Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur (59 unit program);
2. Rencana Induk Pengembangan Sektor Agribisnis (5 unit program);
3. Rencana Induk Pengembangan Sektor Perikanan (8 unit program; dan
4. Rencana Induk Pengembangan Sektor Pariwisata (9 unit program).



Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dan Kemenko Perekonomian memimpin proses verifikasi usulan proyek prioritas infrastruktur Kawasan Rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan pada Rabu-Jumat, 26-28 Mei 2021.

Sumber: Dokumentasi Asdep IPW Kemenko Marves

Untuk pengembangan infrastruktur terbagi dalam 5 rencana induk: 1) Penyediaan dan Peningkatan Infrastruktur Transportasi Jalan (16 program); 2) Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Perhubungan (11 program); 3) Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Dasar (10 program); 4) Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Sumber Daya Air (12 program); dan 5) Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Lainnya (10 program).

Untuk pengembangan sektor agribisnis terbagi dalam tiga rencana induk, yaitu 1) Pembangunan pasar (2 program); 2) Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan

Prasarana Penunjang Sektor Agribisnis (2 program); dan 3) Pembangunan Sarana Pengembangan Sektor Peternakan (1 program). Sedangkan untuk pengembangan sektor perikanan terbagi dalam empat rencana induk, yaitu: 1) Pembangunan dan penataan Pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan (4 program); 2) Pembangunan galangan kapal perikanan (1 program); 3) Pengembangan Kawasan tambak dan budi daya (2 program); dan 4) Pengadaan sarana penangkapan ikan (1 program). Sementara untuk pengembangan sektor pariwisata dibagi ke dalam tiga rencana induk, yaitu 1) Pengembangan destinasi pariwisata (6 program); 2) Pengembangan Kawasan ekonomi berbasis pariwisata (1 program); dan 3) Pengembangan desa wisata (2 program).

Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur berupa proyek dan program yang merupakan turunan dari kebijakan dan strategi. Kebijakan dan strategi utama yang mendasari Rencana Induk ini, yaitu Penyediaan dan Peningkatan Infrastruktur Transportasi Jalan; Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Perhubungan; Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Dasar; Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Sumber Daya Air; dan Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Lainnya.

Penyediaan dan Peningkatan Infrastruktur Transportasi Jalan mencakup rencana Pembangunan Jalan Bebas Hambatan serta Peningkatan dan Pengembangan Jalan. Adapun rencana program tersebut meliputi:

- 1) Pembangunan Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya  
– Cilacap Segmen 1 (Gedebage – Tasikmalaya) di

Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Tasikmalaya;

- 2) Pembangunan Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap Segmen 2 (Tasikmalaya – Cilacap) di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Cilacap;



Rencana pembangunan Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap (Getaci).

Sumber: Kementerian PUPR

- 3) Pembangunan Jalan Tol Ciawi – Sukabumi – Ciranjang – Padalarang Segmen 1 (Ciawi – Sukabumi) di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi;
- 4) Pembangunan Jalan Tol Ciawi – Sukabumi – Ciranjang – Padalarang Segmen 2 (Sukabumi – Padalarang) di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bandung Barat;

- 5) Pembangunan dan Peningkatan Jalur Tengah Selatan (JTS) Jawa Barat (Segmen Barat) di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bandung;
- 6) Pembangunan dan Peningkatan Jalur Tengah Selatan (JTS) Jawa Barat (Segmen Timur) di Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Ciamis;
- 7) Pelebaran Jalur Vertikal Cibadak – Cikidang – Palabuhanratu di Kabupaten Sukabumi;
- 8) Pelebaran Jalan Lingkar Tengah Pangandaran di Kecamatan Kalipucung, Kecamatan Pangandaran, Kecamatan Sidamulih, Kecamatan Parigi, dan Kecamatan Langkaplancar;
- 9) Pelebaran Jalan Lingkar Utara Ciamis – Banjar di Kabupaten Ciamis;
- 10) Pembangunan Ruas Jalan Alternatif Palabuhanratu – Cisolok di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi;
- 11) Pembangunan Jalan Lingkar Garut di Kecamatan Kadungora, Kecamatan Leres, Kecamatan Leuwigoong, Kecamatan Banyuresmi, Kota Garut, Kecamatan Terogong Kidul, Kecamatan Terogong Kaler; Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut;
- 12) Rekonstruksi Jalur Vertikal Bandung – Pangalengan – Rancabuaya di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut;
- 13) Pembangunan Jalur Vertikal Ciwidey – Cikadu – Sandangbarang di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur;



- 14) Pelebaran Jalan Akses Pelabuhan Pangandaran di Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran;
- 15) Pelebaran Jalan Cianjur – Sindangbarang di Kabupaten Cianjur; dan
- 16) Pembangunan Jembatan Benteng – Manonjaya di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis.

Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Perhubungan meliputi Sistem Jaringan Transportasi Darat, Sistem Jaringan Transportasi Darat, dan Sistem Jaringan Transportasi Udara, dengan rincian rencana program sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Jaringan Rel KA Cipatat – Padalarang di Kabupaten Bandung Barat;
- 2) Reaktivasi Jaringan Rel KA CIBatu – Cikajang di Kabupaten Garut;
- 3) Reaktivasi Rel KA Banjar – Cijulang di Kabupaten Pangandaran;
- 4) Pembangunan Terminal Tipe A Pangandaran di Kabupaten Pangandaran;
- 5) Pembangunan Terminal Tipe B Singaparna di Kabupaten Tasikmalaya;
- 6) Pembangunan Terminal Tipe B Palabuhanratu di Kabupaten Sukabumi;
- 7) Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Majingklak di Kabupaten Pangandaran;
- 8) Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional Palabuhanratu di Kabupaten Sukabumi;

- 9) Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Palangpang di Kabupaten Sukabumi;
- 10) Pengembangan Bandar Udara Nusawiru di Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran; dan
- 11) Pembangunan Bandar Udara Cikembar di Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi.

Sementara untuk Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Dasar, rincian program yang direncanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Ciminyak di Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis;
- 2) Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Nangkaleah di Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya;
- 3) Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Bojongsari di Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran;
- 4) Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah di Kecamatan Pameungpeuk, Kecamatan Caringin, dan Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut;
- 5) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perkotaan Palabuhanratu di Kabupaten Sukabumi;
- 6) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perkotaan Pangandaran di Kabupaten Pangandaran;
- 7) Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Purbahayu di Kabupaten Pangandaran;
- 8) Penataan Kawasan Kumuh di Kabupaten Pangandaran;

- 9) Pembangunan Kawasan Pesisir Minapolitan Jawa Barat Selatan di Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur; dan
- 10) Pembangunan Rumah Khusus Nelayan di Kabupaten Garut.

Dari sisi Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Sumber Daya Air di Kawasan Jabarsel, perencanaannya meliputi Pembangunan Bendungan/Waduk; Pengendalian Banjir; Pembangunan Breakwater; Pembangunan Embung; dan Pembangunan Infrastruktur Irigasi (baru maupun optimalisasi) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Bendungan Citepus di Kabupaten Sukabumi;
- 2) Pembangunan Bendungan Matenggeng di Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Cilacap;
- 3) Penanganan Banjir di Kabupaten Sukabumi yang meliputi Sungai Cipalabuan dan Ciranca (Kecamatan Palabuhanratu) serta Sungai Cisolok (Kecamatan Cisolok);
- 4) Penanganan Banjir di Kabupaten Pangandaran yang meliputi Sungai Cijulang-Cijalu (Kecamatan Parigi), Sungai Cikembulan (Kecamatan Sidamulih), dan Banjir Padaherang (Kecamatan Padaherang);
- 5) Penanganan Banjir di Kabupaten Tasikmalaya di Banjir Sukaresik, Sungai Cilangla (Kecamatan Karangnunggal, Kecamatan Bantarkalong, dan Kecamatan Bojongasih);
- 6) Penanganan Banjir di Kabupaten Garut di Sungai Cipalebuh dan Sungai Cikaso (Kecamatan

Pameungpeuk dan Kecamatan Cibalong);

- 7) Pembangunan Breakwater Pantai Timur Pangandaran di Kabupaten Pangandaran;
- 8) Pembangunan Breakwater Pantai Rancabuaya di Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut;
- 9) Pembangunan Embung Air Baku di Kabupaten Sukabumi (Kecamatan Sagaranten dan Kecamatan Purabaya);
- 10) Pembangunan Embung Pengendali Banjir dan Air Baku di Kabupaten Ciamis (Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Panjalu, Kecamatan Lakkok, dan Kecamatan Purwadadi);
- 11) Pembangunan Embung Air Baku Irigasi Sawah di Kabupaten Tasikmalaya (Kecamatan Cigalontang dan Kecamatan Pancatengah);
- 12) Pembangunan Daerah Irigasi (DI) Baru: DI Caringin di Kabupaten Sukabumi;
- 13) Pembangunan Daerah Irigasi (DI) Baru: DI Curug Dengdeng di Kabupaten Cianjur;
- 14) Pembangunan Daerah Irigasi (DI) Baru: DI Parigi di Kabupaten Pangandaran;
- 15) Pembangunan Daerah Irigasi (DI) Baru: DI Candra Goyang di Kabupaten Garut;
- 16) Pembangunan Daerah Irigasi (DI) Baru: DI Cikalong di Kabupaten Tasikmalaya;
- 17) Optimalisasi Daerah Irigasi: Rehab Tuntas DI Padawaras di Kabupaten Tasikmalaya;

- 18) Optimalisasi Daerah Irigasi: Pembangunan Bendungan Cijalu di Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya;
- 19) Optimalisasi Daerah Irigasi: Rehab Tuntas DI Cidadali di Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur; dan
- 20) Optimalisasi Daerah Irigasi: Pencetakan Sawah Baru di Kecamatan Cipatujah, Kecamatan Karangnunggal, dan Kecamatan Bantarkalong, Kabupaten Tasikmalaya.

Selain itu, di Kawasan Jabarsel juga direncanakan sejumlah proyek Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Lainnya, yang meliputi:

- 1) Pengembangan Pusat Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum (RSU) Jampang Kulon di Desa Tanjung, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi;
- 2) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Cisolok – Cisukarame di Kabupaten Sukabumi;
- 3) Pengembangan *Pump Storage Upper* Cisokan di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur;
- 4) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata di Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Cianjur;
- 5) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Matenggeng *Pumped Storage* di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Ciamis;
- 6) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Kabupaten Sukabumi;
- 7) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Kabupaten Garut;



▲  
Kemenko Marves mengundang para pemangku kepentingan melakukan kunjungan lapangan ke lokasi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sukabumi 150 MW, di Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, 1 April 2022.

Ilustrasi rumah warga yang berada di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Selasa (15/10/2019). Amanat Perpres 87/2021, PLTB serupa juga akan dibangun di Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Sumber: Antara/Abriawan Abhe





- 8) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Galunggung di Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut;
- 9) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Papandayan di Kabupaten Garut; dan
- 10) Pembangunan Desa Digital di 120 Desa di Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur; dan Kabupaten Pangandaran.

Rencana Induk Pengembangan Sektor Agribisnis berupa proyek dan program yang merupakan turunan dari kebijakan dan strategi. Kebijakan dan strategi utama yang mendasari Rencana Induk ini, yaitu Pembangunan Pasar; Pembangunan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Sektor Agribisnis; dan Pembangunan Sarana Pengembangan Sektor Peternakan.

Untuk Pembangunan Pasar, proyek dan program yang direncanakan meliputi: 1) Pembangunan Pasar Cikajang di Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut; dan 2) Pembangunan Pasar Padakembang di Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan untuk Pembangunan Sarana Pengembangan Sektor Peternakan, program yang direncanakan adalah Pembangunan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sapi Pasundan di Desa Sidaharja, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis.

Adapun untuk Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Sektor Agribisnis, program dan proyek yang direncanakan meliputi: 1) Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi (PDP) di Kabupaten Tasikmalaya; dan 2) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan

Produk Turunan Kelapa (Produk Unggulan Kawasan Desa Kementerian Desa dan PDTT) di Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya.

Rencana Induk Pengembangan Sektor Kelautan berupa proyek dan program yang merupakan turunan dari kebijakan dan strategi. Kebijakan dan strategi utama yang mendasari Rencana Induk ini, yaitu Pembangunan dan Penataan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan; Pembangunan Galangan Kapal Perikanan; Pengembangan Kawasan Tambak dan Budi Daya; dan Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan.

Untuk Pembangunan dan Penataan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan, sejumlah program dan proyek telah direncanakan, yang meliputi: 1) Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Pelabuhanratu di Kabupaten Sukabumi; 2) Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Cilauteureun di Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut; 3) Penataan Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Ujunggenteng, Minajaya, Cikembang, Cisolok, Ciwaru, Cibangban, dan Tegalbuleud di Kabupaten Sukabumi; dan 4) Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Rancabuaya (Kab Garut); Batukaras (Kab Pangandaran); Jayanti (Kab Cianjur); Minajaya, Cisolok, dan Ciwaru (Kab Sukabumi); serta Nusamanuk dan Pamayangsari (Kab Tasikmalaya).

Untuk Pembangunan Galangan Kapal Perikanan, program yang direncanakan adalah Pembangunan Galangan Kapal Perikanan di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Sedangkan untuk Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan

direncanakan untuk dilakukan di Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi.

Adapun untuk Pengembangan Kawasan Tambak dan Budi Daya direncanakan dua program, yaitu 1) Pengembangan Kawasan Tambak Udang di Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi; serta 2) Pengembangan Budi Daya Lobster dan Sidat di Kabupaten Sukabumi.

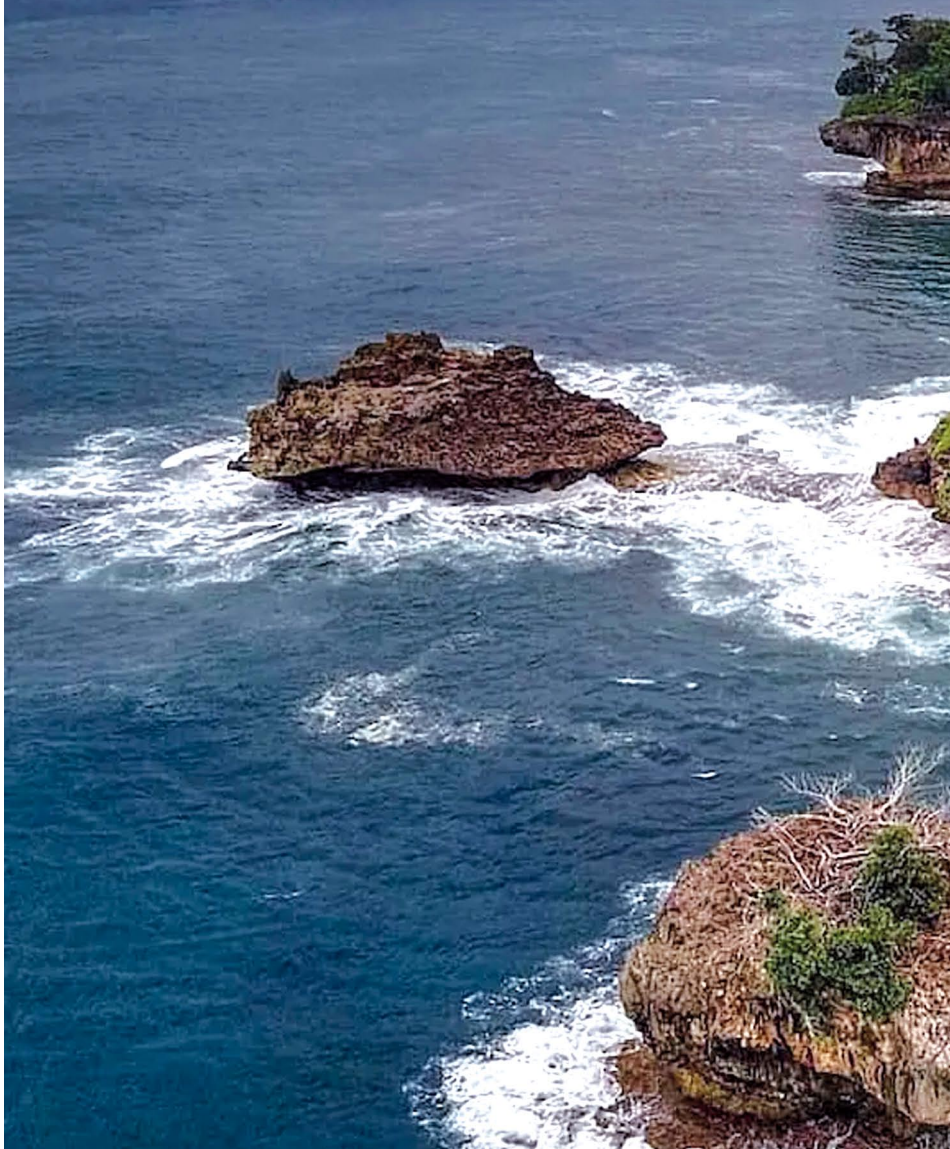
Rencana Induk Pengembangan Sektor Pariwisata berupa proyek dan program yang merupakan turunan dari kebijakan dan strategi. Kebijakan dan strategi utama yang mendasari Rencana Induk ini, yaitu Pengembangan Destinasi Wisata; Pengembangan Kawasan Ekonomi Berbasis Pariwisata; dan Pengembangan Desa Wisata. Adapun rincian proyek dan program yang direncanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Kawasan Ciletuh Palabuhanratu UNESCO Global Geopark – Kabupaten Sukabumi yang meliputi: Kawasan Ujunggenteng (Kec Cicarap); Kawasan Geyser Cisolok (Kec Cisolok); Pantai Minajaya (Kec Surade); Pantai Cikembang (Kec Cisolok); Pantai Cibangban (Kec Palabuhanratu); Pantai Karanghawu (Kec Cisolok); Kawasan Kasepuhan Cipragelar (Kec Cisolok dan Kec Cikakak); dan Curug Cikaso (Kec Surade);

- 2) Pengembangan Destinasi Wisata Kabupaten Cianjur yang meliputi: Kawasan Gunung Padang (Kec Cempaka); Pantai Cemara Cipanglay (Kec Cidaun); Pantai Tipar Sinar Laut (Kec Argabinta); Pantai Batukukumbung (Kec Cidaun); dan Kawasan Wisata Budaya Pandanwangi (Kec Warungkondang);
- 3) Pengembangan Destinasi Wisata Kabupaten Garut yang meliputi: Pantai Santolo dan Pantai Sayanghelang (Kec Ciketel); Kawasan Situ Bagendit (Kec Banyuresmi); dan Situ Cangkung;
- 4) Pengembangan Destinasi Wisata Kabupaten Tasikmalaya yang meliputi Pantai Karangtawulan (Kec Cikalong) dan Geopark Galunggung;
- 5) Pengembangan Destinasi Wisata Kabupaten Ciamis yang meliputi: Situ Lengkong (Kec Panjalu); Karangkemulyan (Kec Cijeungjing); dan Kampung Adat Kuta (Kec Tambaksari);
- 6) Pengembangan Destinasi Wisata Kabupaten Pangandaran yang meliputi: Kawasan Wisata Budaya Cikalong (Kec Sidamulih); Pantai Madasari (Kec Cimerak); dan Geopark Pangandaran;
- 7) Pengembangan Kawasan Pariwisata Cikidang di Kabupaten Sukabumi;
- 8) Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran; dan

Tempat wisata Madasari Pangandaran memiliki sekitar sebelas pulau karang kecil yang tersebar di sekitar pantai.

Sumber: Istimewa









Ilustrasi Karang Potong Ocean View di Kabupaten Cianjur.

Sumber: Istimewa

- 9) Pembangunan *Creative Center* di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan Perpres 87/2021 tersebut, pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dalam Rencana Induk Pembangunan Kawasan sebagaimana telah diuraikan di atas. Rencana Induk tersebut menjadi pedoman untuk menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk menyusun kebijakan sektoral yang terkait dengan dua super kawasan ekonomi baru tersebut.



# Bagian 3



Progres Pembangunan  
Kawasan Rebana  
dan Jabarsel



## Dukungan Lintas Sektor

*Pengembangan Kawasan Rebana dan Jabarsel membutuhkan dukungan lintas sektor, baik dari kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah hingga swasta. Pembangunan kawasan ekonomi baru ini juga tidak hanya menyasar pembangunan fisik, tapi juga non fisik seperti peningkatan SDM dan sektor UMKM.*

**S**emua pemerintah daerah di Jawa Barat mendukung upaya pengembangan kawasan Rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan (Jabarsel). Namun dua kawasan ini masih menghadapi tantangan kesiapan sumber daya manusia (SDM) hingga regulasi. Agar Rebana dan Jabarsel bisa menjadi sumber ekonomi baru, maka semua pihak perlu berkolaborasi dan bersinergi. Demikian disampaikan sejumlah perwakilan pemerintah daerah di beberapa kesempatan.

Dalam suatu forum, Pemerintah Daerah Kota Cirebon menyatakan kesiapan mereka menyambut Rebana. Meskipun luasnya hanya 37 kilometer persegi, tapi Kota Cirebon telah memiliki puluhan hotel, restoran, hingga pusat perbelanjaan. Kota Cirebon memang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Jabar Bagian Timur. Maka ketika nantinya ada pembangunan pabrik di Kabupaten Cirebon, maka Kota Cirebon bisa mendukung dari sisi MICE (*meeting, incentive, convention, dan exhibition*). Terlebih pergerakan orang di Kota Cirebon dalam sehari bisa mencapai 2 juta orang, padahal warganya hanya 340.000 jiwa.

Di Kabupaten Majalengka, adanya pembangunan kawasan Rebana telah menggeser sejumlah industri dari wilayah utara Jabar ke Majalengka. Saat ini, terdapat 61 industri dengan serapan tenaga kerja mencapai 68.000 orang. Imbasnya, pengangguran di Majalengka dapat berkurang. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) di Majalengka pada tahun 2022 mencapai 6,63 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan LPE Jabar, yakni sebesar 5,45 persen. Komitmen terhadap Rebana pun terus mengalir. Selain menyiapkan Rumah Sakit Umum Daerah Cideres menjadi tipe B, Pemkab Majalengka juga tengah membantu pendirian Politeknik Manufaktur (Polman) Bandung Kampus 2 di Majalengka.

Sementara di Indramayu, Pemkab Indramayu dapat memasok bahan pangan untuk pengembangan Rebana. Setiap tahunnya produksi beras di Indramayu mencapai 1,3 juta ton, sedangkan perikanan 175.261 ton. Adanya kawasan Rebana merupakan peluang untuk memasarkan

produk unggulan daerah. Namun demikian, konektivitas diakui masih menjadi problem. Sehingga ada wacana membangun jalan tol dari Kertajati ke Indramayu yang akan dibangun pada 2024-2029 untuk memudahkan mobilitas barang. Pemkab Indramayu juga tengah merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk mendukung kebutuhan lahan industri di Rebana. Mereka mengajukan 20.000 hektare untuk pembangunan industri di sejumlah kecamatan, seperti Patrol, Losarang, dan Krangkeng.

Meski begitu, regulasi terkait penyediaan lahan industri di daerah menemui tantangan karena dapat menggerus lahan pertanian. Pemkab Cirebon misalnya, telah mengajukan revisi RTRW kepada Pemprov dan pemerintah pusat untuk menambah kawasan industri hingga 10.000 hektare. Tapi terkendala karena ada permintaan LSD (lahan sawah yang dilindungi) di angka 50.000 hektare. Sementara rencana Pemkab Cirebon hanya 40.000 hektare saja. Dan kebijakan ini belum juga terselesaikan.

Selain aspek regulasi, tantangan pengembangan Rebana dan Jabarsel juga ada pada ketersediaan bahan baku, air, hingga ketidakpastian ekonomi global. Kemenko Marves melalui Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah pun mendorong berbagai pihak bersinergi membangun kawasan tersebut. Apalagi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.



Kendaraan memasuki Kawasan Pelabuhan Patimban (21/12/2023). Pelabuhan ini akan mendorong pengembangan wilayah di Segitiga Rebana. Masih mudahnya UMR di Segitiga Rebana menjadi salah satu daya tarik pengusaha untuk mendirikan pabrik di kawasan tersebut.

Sumber: Dok Asdep IPW Kemenko Marves RI

## **Dukungan Penganggaran**

Pembangunan Kawasan Rebana dan Jabarsel membutuhkan dukungan penganggaran yang kuat. Pada Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tentang Rencana 2023-2024 bersama 7 Kementerian/Lembaga (K/L) dan Bappenas yang dilaksanakan di Jakarta, 8 Februari 2023, Kementerian PUPR memaparkan Rencana Kerja untuk mendukung Perpres Nomor 87 Tahun 2021. Dalam paparannya, setidaknya ada lima poin terkait Direktif Presiden untuk Tahun Anggaran (TA) 2023. Salah satunya adalah Percepatan



Pembangunan Kawasan Rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan dengan anggaran sebesar Rp 206,03 miliar.

Pada Rakor tersebut, dipaparkan pula Rencana Pelaksanaan Tahun 2023-2024 yang meliputi 58 kegiatan/pekerjaan. Pekerjaan tersebut perlu dikonfirmasi kembali kepastiannya dari daftar proyek yang telah direncanakan dalam Perpres 87/2021 tersebut. Sebanyak 4 pekerjaan direncanakan dilaksanakan pada tahun 2023, 37 pekerjaan akan dilaksanakan pada 2024, dan 17 pekerjaan lainnya berencana untuk dilaksanakan setelah tahun 2024. 4 program yang dilaksanakan pada 2023 yaitu 3 program Sumber Daya Air dan 1 program Bina Marga.

Berdasarkan Rapat Evaluasi tanggal 23 Februari 2023, terdapat 3 Proyek Sektor PUPR yang diestimasi selesai tahun 2023 dan 17 Proyek Tahun 2024. Terhadap kebutuhan pendanaan proyek tahun 2023 dan 2024 tersebut, diperlukan Penajaman, Kepastian, dan Konfirmasi K/L untuk proyek yang tercantum dalam RKAKL Tahun 2023 maupun 2024. Adapun proyek yang diestimasi selesai pada 2023 adalah 1) Pembangunan Breakwater Pantai Timur Pangandaran; 2) Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu (Seksi 3-6); dan 3) Pelebaran jalan Cimalaka-Cipadung (Interchange Cisumdawu-Cimalaka).

Sedangkan 17 proyek yang diestimasi selesai pada 2024 yaitu: 1) Pelebaran ruas jalan Cipasung – Subang – Cilebak (Kab. Kuningan) – Kutaagung/Dayeuh Luhur (Kab. Cilacap); 2) Pelebaran jalan Conggeang- Buah dua; 3) Pelebaran jalan Legok – Conggeang (interchange Cisumdawu – Legok); 4) Pembangunan jalan Lingkar Timur Selatan; 5) Pembangunan

Embung Rancah Hilir; 6) Penanganan banjir di Sukabumi, 7) Pengendalian Banjir Kawasan BIJB (normalisasi Sungai Cibolerang, revitalisasi Situ Cijawara, dan Cimaneuh); 8) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perkotaan Pangandaran; 9) Pengembangan SPAM Perkotaan Palabuhanratu; 10) Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Bojongsari; 11) Pembangunan TPA Sampah Ciminyak; 12) Pembangunan TPA Sampah Jalupang; 13) Pembangunan TPA Sampah Nangkaleah; 14) Pengembangan TPA Sampah Heuleut; 15) Pembangunan Politeknik Manufaktur Kampus II; 16) Pembangunan pasar Padakembang; dan Pengembangan ITB Kampus Cirebon.

Di sisi lain, Presiden RI Joko Widodo juga telah menetapkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Inpres ini dimaksudkan dalam upaya percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk memberi manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah, menurunkan biaya logistik nasional, menghubungkan dan mengintegrasikan dengan sentra-sentra ekonomi, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap, sebagai upaya mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Dalam kaitannya dengan Inpres No 3/2023 itu, Pemprov Jabar mengajukan usulan pembangunan beberapa ruas jalan melalui Inpres peningkatan konektivitas jalan daerah yaitu: 1) Pelebaran jalan Cimalaka-Cipadung (Interchange Cisumdawu-Cimalaka); 2) Pelebaran ruas jalan Cipasung – Subang – Cilebak (Kab. Kuningan) – Kutaagung/Dayeuh

Luhur (Kab. Cilacap); dan 3) Pelebaran jalan Legok – Congeang (interchange Cisumdawu – Legok).

Tidak kalah penting dari itu, pemenuhan Readiness Criteria (RC) terhadap proyek yang diestimasi selesai tahun 2023 dan 2024 perlu diperbarui, terutama yang masih berupa Komitmen Kepala Daerah. Beberapa dokumen RC yang perlu mendapat perhatian antara lain yaitu: 1) Pelebaran ruas jalan Cipasung – Subang – Cilebak (Kab. Kuningan) – Kutaagung/Dayeuh Luhur (Kab. Cilacap), dimana pemenuhan dokumen masih belum lengkap, namun didukung dengan pernyataan Kepala Daerah untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga dinyatakan memenuhi kriteria; 2) Pembangunan jalan Lingkar Timur Selatan, dimana pemenuhan dokumennya



Asdep IPW Kemenko Marves, Djoko Hartoyo berdiskusi dengan Kepala KSOP Kelas II Patimban Capt Dian Wahdiana terkait program pengembangan Pelabuhan Patimban (21/12/2023). Pelabuhan ini akan mendorong pengembangan wilayah di Jawa Barat, khususnya di Segitiga Rebana.

Sumber:  
Dok Asdep IPW Kemenko Marves RI



Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah, Kemenko Marves, Djoko Hartoyo memimpin rapat koordinasi yang membahas penganggaran untuk pelaksanaan proyek prioritas (P1) Kawasan Rebana dan Jabarsel, Rabu (29-03-2023). Diskusi ini merupakan tindak lanjut dari rapat kesiapan dan prioritas anggaran tahun 2023 dan 2024 yang telah diadakan pada bulan Februari 2023 di Jakarta.

Sumber: Kemenko Marves

juga tidak Lengkap, namun didukung pernyataan Kepala Daerah untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga dinyatakan memenuhi kriteria; dan 3) Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Bojongsari yang belum ada Amdal, Izin Teknis dari dinas terkait, dan lahan milik Pemda bersertifikat, namun ada Pernyataan Kepala Daerah sehingga memenuhi kriteria.

## **Meningkatkan Infrastruktur Daerah**

Dalam suatu Rapat Internal terkait PSN tanggal 6 September 2023, Presiden RI Joko Widodo memberikan

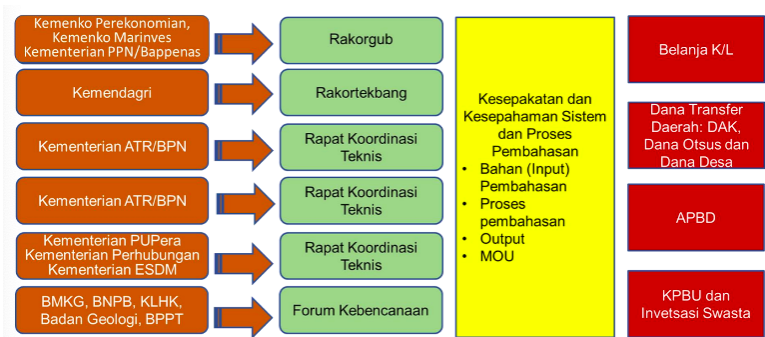
arahan untuk memfokuskan dukungan pembiayaan tanah supaya dapat cepat disalurkan dan jangan di-*carry over* di 2023. Selain itu, perlu diprioritaskan PSN yang sudah masuk tahap konstruksi dan dapat beroperasi di tahun 2023. “Memprioritaskan pembangunan PSN yang dapat diselesaikan paling lambat semester 1 tahun 2024, serta memastikan waktu penyelesaian PSN yang telah transaksi atau sedang dalam tahap konstruksi namun tidak dapat diselesaikan pada tahun 2024 untuk dapat dipastikan kepastian terkait pembiayaan, pengadaan tanah, dan perizinannya,” demikian ujar Presiden RI.

Direktif Presiden dan penuntasan janji Presiden terkait dengan PSN ini antara lain yaitu terkait dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tercantum dalam Permenko Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022, Perpres Nomor 79 Tahun 2019, Perpres Nomor 80 Tahun 2019, dan Perpres Nomor 87 Tahun 2021. Adapun Rancangan awal arah kebijakan lingkup sarana dan prasarana TA 2024 juga dialokasikan untuk penuntasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yaitu termasuk penyelesaian proyek PSN dan major proyek lainnya.

Terkait dengan PSN ini, Kementerian PUPR melalui Menteri Basuki Hadimuljono juga memberi dukungan terkait Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR). *Pertama*, semua proyek pembangunan yang sudah selesai harus segera dimanfaatkan (bendungan, rusun, SPAM, dan lain sebagainya). *Kedua*, utamakan program

pemeliharaan infrastruktur yang telah terbangun (tanggul sungai dan pantai, jalan dan jembatan, serta lain-lain). *Ketiga*, seluruh infrastruktur baru harus langsung dapat beroperasi (SPM jalan tol, irigasi, bendungan, dan lain sebagainya). *Keempat*, utamakan program rehabilitasi (bendungan, sumur bor, sekolah, pasar, dan lain sebagainya).

Harmonisasi terkait program penyelesaian PSN ini, khususnya dalam konteks Perpres Nomor 87 Tahun 2021, senantiasa dilakukan dalam setiap forum maupun rapat koordinasi di forum perencanaan, baik itu Rakorteknis, Rakorbang, maupun Rakorgub. Untuk penyusunan Rancangan Awal RKP 2024 akan dioptimalkan sebelum penetapan pagu indikatif, sekitar Februari-Maret 2023. Sedangkan untuk penyusunan RPJMN 2025-2029, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPN) 2025-2045 ditetapkan sebagai acuan.



Harmonisasi Forum dan Rapat Koordinasi

Sumber: Kemenko Marves

Menurut Bappenas, Penyusunan Background Study RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 harus melalui tahap proses perencanaan sebagai berikut: 1) Naskah Akademik. Analisa dan gambaran komprehensif, kondisi dan pencapaian pembangunan berdasarkan data-data empirik yang objektif; 2) Proses Teknokratik. Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional, atau oleh lembaga / unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan; 3) Proses Politik. Integrasi dgn Visi, Misi, dan Program yang ditawarkan oleh Presiden; 4) Proses Partisipatif Top-Down dan Bottom-Up melalui konsultasi publik dan Musrenbangnas; dan 5) Penetapan/Pengesahan Dokumen. Berupa dokumen perencanaan formal, sebagai rujukan perencanaan pembangunan segenap pelaku pembangunan.

Dalam upaya meningkatkan infrastruktur di daerah serta mendukung pembangunan wilayah, khususnya Kawasan Rebana dan Jabarsel setidaknya diperlukan empat hal penting. *Pertama*, adanya sinergi, kolaborasi, dan integrasi antara para pihak terkait (K/L/D) yang dalam hal ini harus saling komunikatif, responsif, dan berkesinambungan. *Kedua*, perlu upaya dalam pemenuhan dokumen *Readiness Criteria* (RC) seperti ketersediaan lahan, dokumen rencana tata ruang, studi kelayakan (FS), DED, analisa dampak lingkungan (Amdal), perizinan yang lengkap, dan lain sebagainya. *Ketiga*, aspek pembiayaan baik yang bersumber dari APBN, APBD, KPBU, DAK, SBSN, dan lainnya. *Keempat*, peran Kemenko Marves sebagai fasilitator.

Dalam hal keterpaduan lintas sektor, Kemenko Marves memiliki tugas serta fungsi koordinasi dan sinkronisasi, baik



dalam hal perumusan, penetapan, maupun pelaksanaan kebijakan di K/L. Kemenko Marves juga memiliki wewenang dalam pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan (Monev). Kemenko Marves juga melaksanakan fungsi lain bergantung pada penugasan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

## **Meningkatkan Kualitas SDM**

Pembangunan Kawasan Rebana dan Jabarsel tidak hanya menyasar pembangunan secara fisik, melainkan juga non fisik seperti pembangunan Sumber Daya Manusia-

---

Soft Launching dan Pengoperasian Perdana Pelabuhan Internasional Patimban, Subang, Jawa Barat, Minggu (20/12/2020). Dalam acara tersebut, Presiden Joko Widodo turut menyaksikan proses pengangkutan 140 unit kendaraan ke dalam kapal MV Suzuka Express milik PT Toyofuji Shipping Co, Ltd, yang akan diekspor menuju Brunei Darussalam.

Sumber: Dokumentasi BKIP Kemenhub





Asisten Deputi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Asdep IPW) Kemenko Marves, Djoko Hartoyo menjadi narasumber dalam Talkshow “Pemantapan Daya Saing Ekonomi Melalui Peningkatan Infrastruktur Daerah,” yang menjadi bagian dari kegiatan Musrenbang Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 di Sukabumi, 15 Maret 2023.

Sumber: Kemenko Marves

nya. Pembangunan dari sisi SDM yang seiring seiras dengan pembangunan fisik, diharapkan akan menjadi nilai tambah, serta menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan.

Menurut Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar, Iendra Sofyan, pengembangan kawasan Rebana dan Jabarsel harus disertai dengan

peningkatan kualitas SDM lokal supaya agar ke depannya mereka tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Kualitas SDM yang semakin meningkat juga secara tidak langsung akan turut menaikkan tingkat kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di Jabar.

Peningkatan kualitas SDM salah satunya dapat dicapai dengan peningkatan SDM Vokasi. Pasalnya, sampai saat ini Pendidikan Vokasi cukup berperan penting dalam menyiapkan tenaga kerja lokal mumpuni. Peningkatan SDM Vokasi tersebut perlu difasilitasi dengan hadirnya kampus, politeknik, maupun sekolah menengah atas (SMA)/sekolah menengah kejuruan (SMK) yang berada di wilayah Rebana maupun Jabarsel.

Dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Jabarsel, tertuang sejumlah rencana pengembangan SDM. Diantaranya pengembangan Politeknik Manufaktur (Polman) Kampus 2 di Kabupaten Majalengka, Akademi Maritim, dan Institut Teknologi Bandung (ITB) Kampus Cirebon. Kampus-kampus tersebut nantinya tidak hanya menjadi wadah mencetak SDM unggul, namun juga menghadirkan kerjasama-kerjasama dengan kawasan industri.

Di sisi lain, penguatan SMK di Kawasan Rebana dan Jabarsel juga perlu dilakukan. Sarana dan prasarana yang perlu dibenahi, penyelarasan kompetensi keahlian dengan pemetaan industri maupun sektor ekonomi di kawasan Rebana dan Jabarsel juga penting untuk digencarkan. Menurut hasil kajian Badan Penelitian dan Pengembangan

Daerah (BP2D), hingga kini sarana dan prasarana pendidikan seperti perbaikan ruang kelas dan media pembelajaran di Kawasan Rebana dan Jabarsel masih minim.

Kepala Bappeda Jabar, Iendra Sofyan juga menyebut, diperlukan adanya penyelarasan beberapa bidang kompetensi keahlian yang belum sesuai. Oleh sebab itu perlu ada pemetaan industri apa saja yang akan masuk di Kawasan Rebana maupun Jabarsel dan penambahan jumlah guru SMK dalam mendukung peningkatan kualitas SMK. Dari sisi lain, kesiapan Pemerintah Kabupaten/Kota juga perlu terus ditingkatkan.

“Kesiapan kabupaten/kota dalam pengembangan Kawasan Rebana dan Jabarsel terus berproses. Salah satunya terlihat dari gerak cepat Pemprov Jabar, mulai dari menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sampai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kolaborasi Pemprov Jabar dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)/ Pemerintah Kota (Pemkot) sangat penting dalam pengembangan Kawasan Rebana dan Jabarsel. Pemkab/Pemkot menyiapkan mulai dari sisi infrastruktur, SDM, maupun regulasi. Seperti menyesuaikan RTRW, lalu menyusun RDTR,” ujar Kepala Bappeda Jabar, Iendra Sofyan.

Sebelumnya pada 1 Oktober 2021, Dinas Pendidikan Jabar secara resmi menyerahkan Surat Keputusan Pembukaan Kompetensi Keahlian Baru di Kawasan Rebana Tahun 2020-2023. Dalam surat tersebut tertulis, sebanyak 17 sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri di Wilayah Rebana membuka 12 program keahlian baru berbasis industri. Adapun 12 program keahlian tersebut meliputi

Grafika, Logistik, Otomasi Programmable Logic Controller (PLC), Manufaktur Logam Mesin, Elektronika, Mekatronika, Kimia Industri, serta Pertanian dan Pengolahan Pangan. Selain itu, terdapat program keahlian Teknik Sipil dan Konstruksi, Teknik Komputer dan Animasi Serta Multimedia, Otomasi Industri Robotika, Kemaritiman, dan Perhotelan Kepariwisataan.

Penambahan 12 program keahlian tersebut diterapkan pada SMK di Cirebon wilayah Kantor Cabang Dinas (KCD) X, seperti Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka, Indramayu, dan Kabupaten Cirebon. Adanya program keahlian baru tersebut diharapkan dapat memacu seluruh SMK lainnya di kawasan Rebana maupun Jabarsel agar terus meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran sesuai tuntutan kebutuhan dunia kerja.



Suasana pembelajaran di Politeknik Manufaktur (Polman) Bandung. Saat ini Polman Bandung tengah membangun Kampus 2 di Kabupaten Majalengka.

Sumber: Polman Bandung



Asdep IPW Kemenko Marves, Djoko Hartoyo mensosialisasikan Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah dan Implikasinya Terhadap Pembangunan di Perdesaan, dihadapan para mahasiswa FISIP Universitas Padjadjaran (06/10/2023).

Sumber: Dok Asdep IPW Kemenko Marves RI

## Selaras Dengan Pengembangan UKM

Kawasan Rebana dan Jabarsel didesain untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jabar yang inklusif. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka tahap perencanaan hingga implementasi pembangunan sudah tentu harus selaras dengan pengembangan UKM (Usaha Kecil Menengah) lokal setempat. Terlebih, kawasan Rebana dan Jabarsel diproyeksi untuk menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Jabar di masa depan.

Saat ini perencanaan pengembangan Kawasan Rebana dan Jabarsel memiliki sejumlah tantangan untuk



menjadi pusat pertumbuhan inklusif. Salah satunya adalah pembangunan kawasan metropolitan yang selaras dengan pengembangan UKM/IKM setempat. Kawasan Rebana dan Jabarsel sejatinya didorong untuk menjadi kawasan industri yang terintegrasi, inovatif, kolaboratif, berdaya saing tinggi, serta berkelanjutan. Namun terdapat sejumlah catatan untuk perbaikan. Antara lain terkait kesesuaian Jawasari Peruntukan Industri (KPI) dengan aktivitas ekonomi lokal serta kualifikasi sumber daya manusia (SDM) lokal.

Di sisi lain, karakteristik struktur ekonomi di kedua kawasan tersebut masih bercorak pertanian dan perdagangan. Beberapa pihak menilai masih ada ketidaksinkronan antara UKM/IKM unggulan di Kawasan Metropolitan Rebana dengan industri besar yang diundang masuk ke-13 Kawasan Peruntukan Industri (KPI). Hal tersebut menjadi tantangan sendiri, karena jika investasi besar di Kawasan Rebana dan Jabarsel membludak, maka diperlukan upaya untuk memunculkan inklusifitas di kawasan tersebut. Apalagi pemerintah bermaksud untuk mengejar pertumbuhan inklusif.

Ekonomi inklusif ini sejatinya menargetkan agar sektor industri besar maupun industri kecil sama-sama bertumbuh. Oleh sebab itu diperlukan kajian lebih lanjut terkait entitas bisnis kecil (mikro) dengan usaha yang lebih besar. Sedangkan dari sisi makro, dalam pemanfaatan SDM di kawasan Rebana dan Jabarsel juga masih timpang. Hal tersebut terlihat dari kualifikasi SDM yang diharapkan industri besar tidak cocok dengan kualifikasi angkatan kerja yang tersedia. Salah satu contohnya adalah di wilayah



Subang yang rata-rata lama sekolah penduduk mencapai 7,2 tahun. Atau di Cirebon yang mencapai 10,3 tahun.

Jika melihat angka-angka tersebut, maka sebagian penduduk di Kabupaten Subang maupun Cirebon yang tidak lulus SMP dan tidak lulus SMA. Imbasnya, mereka tidak bisa mengisi peluang *employment* yang ada. Sedangkan dunia industri saat ini pada umumnya membutuhkan tenaga kerja setidaknya lulusan diploma 1, 2, 3 ataupun SMA. Sehingga perlu ada upaya bersama untuk mengurangi gap tersebut.

Di sisi lain, kinerja UMKM di wilayah Rebana dan Jabarsel masih belum optimal. Hal tersebut karena karakteristik UMKM di wilayah Rebana dan Jabarsel yang cenderung serupa, yakni *mindset* kewirausahaan yang lemah, serta *manajerial skill* dan kompetensi organisasi yang terbatas. Kemudian, aspek standarisasi mutu produk juga belum optimal, terbatasnya adaptasi teknologi informasi dalam proses bisnis; lemahnya permodalan, akses pasar, dan akses perijinan; kemitraan bisnis dalam lingkup pentahelix masih rendah; serta kreativitas, inovasi, dan daya saing yang masih terbatas.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada sejumlah hal yang perlu dilakukan dalam upaya pengembangan kawasan Rebana dan Jabarsel. *Pertama*, pemahaman bersama dan tindakan afirmatif dari pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menjadikan kawasan tersebut menjadi pusat pertumbuhan ekonomi inklusif melalui konsep local economic development (LED). *Kedua*, perlunya sinergitas pemerintah untuk mempersiapkan SDM melalui pusat

pendidikan formal. *Ketiga*, perlunya kebijakan pemerintah daerah menuju sinergitas pengembangan usaha besar dengan UKM/IKM. Dan *Keempat*, perlunya peninjauan ulang rencana pembangunan infrastruktur daerah dalam mendukung Metropolitan Rebana agar ramah dengan pengembangan UKM/IKM setempat.



Industri kulit di Sukaregang, Kabupaten Garut, Jawa Barat yang sudah bergeliat sejak 1970. Berbagai produk olahan berbahan dasar kulit, mulai dari jaket, sepatu, tas, hingga dompet, dapat dengan mudah ditemukan di sini.

Sumber: indonesia.go.id

## Pentingnya Sinergi dan Kolaborasi

*Dalam sejumlah kesempatan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) terus menyerukan pentingnya sinergi dan kolaborasi untuk Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan (Jabarsel).*

**A** sisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah (Asdep IPW) Kemenko Marves, Djoko Hartoyo, menyebutkan bahwa untuk merealisasikan proyek yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Jabarsel), maka diperlukan sinergi dan kolaborasi. Asdep Djoko bercerita, selama ini telah diadakan rapat kerja dan rencana kerja per tiga bulan. Kegiatan tersebut melibatkan 7 Kementerian di bawah koordinasi Kemenko Marves,

juga melibatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas).

Salah satu hal yang dipaparkan oleh Menteri PUPR dalam pertemuan rutin tersebut adalah mengenai kegiatan implementasi proyek yang tercantum dalam Perpres 87/2021, yang merupakan salah satu direktif Presiden RI. Lebih lanjut, ada 58 pekerjaan disektor ke PU-an yang terdiri dari 4 pekerjaan di laksanakan 2023, 37 kegiatan di tahun 2024, dan 17 kegiatan dilaksanakan setelah tahun 2024. “Ini merupakan tugas bersama. Sejauh ini program sudah banyak dibahas, termasuk untuk pendanaan kegiatannya,” tutur Asdep Djoko dalam rapat koordinasi yang membahas penganggaran untuk pelaksanaan proyek/program P1, pada Kamis (30/3/2023).

Diskusi ini merupakan tindak lanjut dari rapat kesiapan dan prioritas anggaran tahun 2023 dan 2024 yang telah diadakan pada bulan Februari lalu di Jakarta. Mengingat rapat yang digelar secara daring dan luring ini membahas soal penganggaran P1 Perpres 87/2021 di sektor ke PU-an, maka hadir pula dalam rapat Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Karo PAKLN KemenPUPR) Edy Juharsyah.

Edy menyampaikan bahwa pihaknya sedang menyiapkan usulan pagu PUPR tahun anggaran 2024 setelah sebelumnya merangkum berbagai hasil rapat dan diskusi. “Prioritas program di tahun 2024 nanti mencakup penuntasan proyek; Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi,

dan Rehabilitasi (OPOR); Ibu Kota Negara (IKN); dan Direktif Presiden. Jadi Perpres 87/2021 jadi salah satu fokus Pemerintah juga,” sebutnya.

Menurut Direktur Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK), KemenPUPR, Essy Asiah, ada empat kegiatan yang akan didukung oleh DJCK antara lain Pasar Cikajang (Kabupaten Garut), Pasar Padakembang (Kabupaten Tasikmalaya), Politeknik Manufaktur Kampus II (Polman II Kabupaten Majalengka), serta Institusi Teknologi Bandung (Kabupaten Cirebon). Khusus untuk pembangunan pasar Padakembang, Pemda telah menyiapkan lahan untuk pembangunan pasar tersebut, namun dana pembangunan pasar secara khusus belum tersedia sehingga masih butuh dukungan dan perhatian pihak terkait.

Sedangkan Polman II telah dilakukan pembebasan lahan untuk akses menuju kampus, lahan untuk pembangunan kampus, dan telah disusun Detail Engineering Design-nya. Penganggaran proyek-proyek tersebut juga memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas); Kementerian Perdagangan; dan Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Dalam rapat juga dibahas progres dan pendanaan proyek, terutama pembangunan jalan yang diusulkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Kebijakan ini bertujuan membangun jalan yang terhubung dan terintegrasi, utamanya untuk mendukung produktivitas kawasan industri, kawasan pariwisata, kaawasan

perkebunan, kawasan pertanian, dan kawasan produktif lainnya.

Subkoordinator Keterpaduan Perencanaan dan Pembiayaan Direktorat Jenderal Binamarga KemenPUPR Fadil Arif menjelaskan beberapa lokasi yang dapat diusulkan masuk ke dalam daftar proyek Inpres tersebut, antara lain: 1) Jalan Cimalaka-Cipasung (Interchange Cisudawu-Cimalaka) sepanjang 11,5 kilometer; 2) preservasi Jalan Legok-Conggeang sepanjang 2,5-3,8 kilometer; 3) pelebaran Jalan Conggeang-Buah Dua sepanjang 8,5 kilometer; 4) pelebaran ruas Jalan Cipasung-Subang-Cilebak-Kutaagung/Dayeuhluhur sepanjang 15 kilometer; dan 5) pembangunan Jalan Lingkar Timur Selatan di Kab. Kuningan sepanjang 9,51 kilometer. Sebagian kabupaten



Rapat Koordinasi membahas penganggaran untuk pelaksanaan proyek/program P1, Kamis (30/3/2023).

Sumber: Dokumentasi Asdep IPW Kemenko Marves



Rakor ini di hadiri oleh perwakilan dari Biro PAKLN PUPR, Dit Sarana dan Prasarana Strategis Ditjen Cipta Karya PUPR, Dit Sistem Sarana dan Pengelolaan Sumber Daya Air Ditjen Sumber Daya Air PUPR, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat PUPR, dan perwakilan Bappeda Provinsi Jabar.

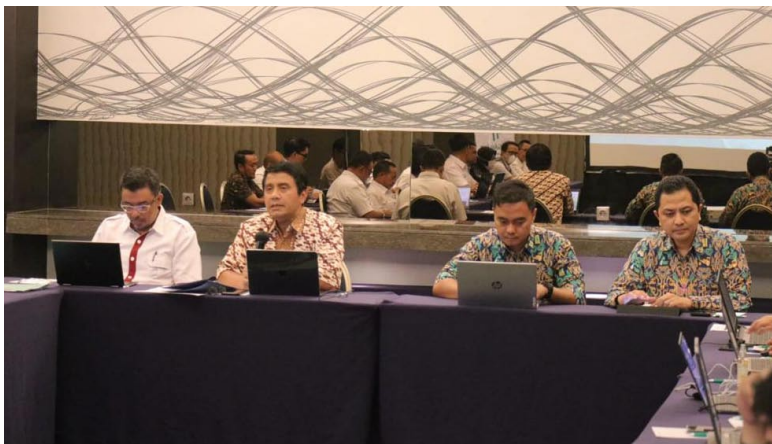
Sumber: Dokumentasi Asdep IPW Kemenko Marves

pun telah mengusulkan untuk masuk dalam daftar rencana proyek di Inpres 3/2023.

Sejauh ini, secara umum dokumen dan persiapan proyek P1 Perpres 87/2021 telah dipenuhi dan divalidasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, yaitu sebanyak 47 proyek dari 85 Proyek di P1.

Sebagai informasi, Perpres Nomor 87 Tahun 2021 sebelumnya telah ditandatangani Presiden Joko Widodo





Rakor ini juga dihadiri Perwakilan BPKP Jabar, Kepala Bappeda Kuningan, Kepala Bappelitbangda Sumedang, Kepala Bappelitbangda Subang, Kepala Bappelitbangda Tasikmalaya, Sekretaris Bappelitbangda Pangandaran, Perwakilan Bappelitbangda Sukabumi, Perwakilan Bappelitbangda Ciamis, dan perwakilan Dinas PU dan Tata Ruang dari kabupaten terkait.

Sumber: Dokumentasi Asdep IPW Kemenko Marves

pada 10 September 2021. Penyusunan Perpres tersebut melibatkan Kemenko Marves, Sekretariat Kabinet, Kemenko Perekonomian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian teknis serta Pemerintah Kabupaten di Kawasan Rebana dan Jawa Barat bagian Selatan.

## Pembangkit Listrik Ramah Lingkungan di Jabarsel

*Melalui Perpres 87/2021, pemerintah akan membangun sejumlah Pembangkit Listrik Ramah Lingkungan di pesisir Jabar. Seperti Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Sukabumi dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata di Kabupaten Purwakarta.*

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang diproyeksikan berlokasi di Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi merupakan satu di antara 170 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sudah diprogram pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Lokasi pembangunan PLTB yang masuk skala prioritas pemerintah itu ditinjau jajaran Kemenko Marves, Jumat (1/4/2022). Wakil Bupati Sukabumi Iyos Somantri beserta perangkat daerah terkait turut mendampingi kegiatan peninjauan lokasi pembangkit listrik tersebut.

Asisten Deputi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Marves, Djoko Hartoyo mengatakan, pembangunan PLTB ini merupakan proyek prioritas nasional untuk mendukung ketersediaan energi listrik yang didistribusikan kepada pelanggan di Jawa dan Bali. Terutama disalurkan ke jaringan transmisi gardu PLN Palabuhanratu. Kapasitas energi listrik yang dihasilkan PLTB sebesar 150 Megawatt. PLTB ini mengandalkan angin yang berfungsi memutarakan turbin untuk menghasilkan energi listrik. Penampung utama listrik dari PLTB ini dihubungkan ke gardu PLN Palabuhanratu.

Menurut Asdep Djoko, proyek pembangunan energi terbarukan ini harus didukung pemerintah daerah agar segera terwujud. Wakil Bupati Sukabumi Iyos Somantri, merespons baik dengan rencana pembangunan PLTB di Kecamatan Ciemas. Kehadiran energi terbarukan ini adalah salah satu proyek prioritas nasional. Iyos berharap,

---

Ilustrasi PLTB Sukabumi, Jawa Barat.

Sumber: UPC Sukabumi Bayu Energi

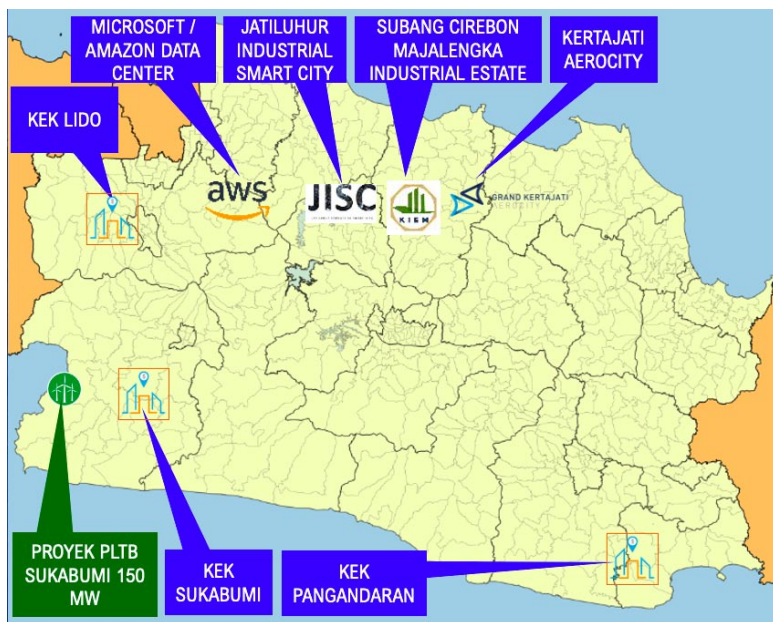


pembangunan PLTB yang dikembangkan oleh UPC Renewables dan perusahaan proyeknya, yaitu PT UPC Sukabumi Bayu Energi ini bisa berjalan lancar sampai beroperasi untuk memasok kebutuhan listrik masyarakat. Terlebih dari pembangunan PLTB ini ke depannya bisa dijadikan destinasi wisata, sehingga berpotensi meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

Pada kegiatan tersebut, UPC Renewables juga berkesempatan untuk menyampaikan kemajuan pengembangan proyek serta kesiapannya untuk memasuki proses pengadaan dan tahapan konstruksi sebagai implementasi dari Peraturan Presiden yang telah menetapkan bahwa Proyek PLTB Sukabumi harus memulai pembangunan pada tahun 2023, hanya 9 bulan lagi, selaras dengan target COD pada tahun 2024 dalam RUPTL 2021-2030 yang diterbitkan pada bulan Oktober 2021.

Namun demikian, pengembangan PLTB Sukabumi ini mengalami sejumlah tantangan. Kuota kapasitas pengadaan PLTB untuk jaringan kelistrikan Jawa Barat yang dapat diisi oleh Proyek PLTB Sukabumi mulai muncul dalam RUPTL 2016 -2025 setelah UPC menandatangani RUPTL dengan PLN pada tahun 2015. Dengan berlalunya waktu, kuota kapasitas ini berubah-ubah dari 80 MW bahkan hingga mencapai 250 MW. Dalam RUPTL terakhir, angka ini turun menjadi 60 MW. Kapasitas 60 MW tidak mendukung kelayakan Proyek PLTB Sukabumi, mempertimbangkan bahwa kapasitas yang disepakati dalam MOU dengan PLN adalah 250 MW, sementara 150 MW adalah angka yang lebih efisien dan efektif dari sisi bisnis.

Di sisi lain, pengembangan-pengembangan penting diperkirakan akan mendorong kebutuhan permintaan listrik energi terbarukan bersih di Jaringan Kelistrikan Jawa Barat selama kurun 2022-2025. CEIA/RE1000 mengidentifikasi adanya kebutuhan konsumsi listrik sebesar 3.114.780 MWh per tahun. Pembangunan Jatiluhur Industrial Smart City (JISC) memerlukan pasokan energi terbarukan secara khusus dengan kapasitas 70 MW. Perusahaan-perusahaan IPTEK seperti Microsoft dan Amazon juga telah mengumumkan rencana mereka untuk membangun data center dan infrastruktur-infrastruktur terkait di Jawa Barat serta mencari pasokan listrik energi terbarukan untuk memasok kebutuhan infrastrukturnya.



Estimasi kebutuhan permintaan energi terbarukan di Jaringan Kelistrikan Jawa Barat

Sumber: UPC Sukabumi Bayu Energi

Niko Priyambada, Direktur PT UPC Sukabumi Bayu Energi, mengharapkan agar pemangku kebijakan dapat mendorong agar kapasitas proyek PLTB Sukabumi di RUPTL 2021-2030 dioptimalkan menjadi 150 MW. Agar dapat memberikan harga yang kompetitif sesuai dengan harga listrik yang berlaku di Pulau Jawa, yang tentunya akan juga memberikan penghematan jangka panjang baik bagi PLN maupun Republik Indonesia.

Mempertimbangkan pembangunan berbagai fasilitas seperti Terminal Laut Khusus dan proses transportasi yang rumit untuk membawa komponen turbin dari lokasi Pelabuhan menuju ke lokasi pembangkit. Sebagai salah satu proyek infrastruktur prioritas penting yang ditargetkan konstruksinya dimulai pada tahun 2023, PLTB Sukabumi 150 MW diusulkan sebagai Proyek PLTB terbesar di Indonesia. Dan telah mendapatkan dukungan yang sangat kuat dari berbagai stakeholder, baik Regional maupun Nasional; serta telah memiliki data angin selama melebihi



Terminal Khusus PLTB Sukabumi diperlukan untuk pembongkaran komponen komponen turbin yang dikirim dari Pelabuhan Ciwandan.

Sumber: UPC Sukabumi Bayu Energi



8 tahun yang terbukti dan bankable serta studi kelayakan yang mendetail.

Proyek ini juga telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Provinsi Jawa Barat pada 2020 dan direkomendasikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta didukung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, dalam pidato Presiden Jokowi pada peresmian PLTB Sidrap, yang video resminya diunggah di YouTube pada bulan Juli 2018, Presiden Jokowi menyebutkan secara khusus menyebutkan proyek PLTB Sukabumi 150 MW sebagai salah satu PLTB berikutnya yang akan ditambahkan ke Jaringan kelistrikan di Indonesia.

PLTB Sukabumi 150 MW juga mendapat dukungan dari Pemerintah Amerika Serikat (AS) berupa kehadiran DFC, lembaga pembiayaan pembangunan dan Lembaga Pemerintah Federal AS yang sebelumnya berhasil mendanai PLTB Sidrap 75 MW. Kehadiran Kenertec, produsen lokal menara angin skala utilitas bersertifikat ISO, melalui perjanjian Kerjasama dengan UPC untuk membangun puluhan menara kincir angin senilai 500 Miliar Rupiah untuk PLTB Sukabumi. Sebelumnya, kedua perusahaan tersebut telah bekerjasama untuk membangun PLTB Sidrap 75 MW, dan menghasilkan tingkat TKDN yang sangat baik dan berkualitas. Nilai kontrak yang besar ini diusulkan untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang substansial dan membuka peluang bagi produk-produk internasional yang dengan bangga diproduksi di Indonesia untuk digunakan di Indonesia – untuk Indonesia.





Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah Kemenko Marves, Djoko Hartoyo (kiri) bersama PT UPC Sukabumi Bayu Energi Niko Priyambada, Kadis ESDM Jabar Ai Saadiyah Dwidaningsih, dan Kabid Kelistrikan Dinas ESDM Jabar Zaenal Arifin dalam Rapat Permohonan Dukungan Perubahan Kuota Kapasitas PLTB Sukabumi 150 MW yang digelar di Bandung, 6 Juni 2023.

Sumber: Kemenko Marves

Sementara itu, promosi PLTB Sukabumi sebagai destinasi wisata baru akan mengintegrasikan keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan budaya bagi masyarakat lokal, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan kepada semua pengunjung Geopark Ciletuh Palabuhanratu UNESCO (CPUGGp), baik domestik maupun internasional.

PLTB Sukabumi nantinya dapat menjadikan Geopark Ciletuh Palabuhanratu menjadi destinasi wisata berkelas dunia. Hadirnya PLTB di wilayah Geopark Ciletuh Palabuhanratu ini akan meningkatkan ekonomi secara nasional dan khususnya masyarakat lokal di Kabupaten Sukabumi dengan pengembangan pariwisatanya. Ditambah

kolaborasi UPC dengan Warrior Group yang merupakan pengembang, pembangun, dan operator spesialis wisata petualangan berskala Internasional yang berbasis di Dubai; bersama dengan Tim Geopark Ciletuh bakal mengeksplorasi bermacam opsi untuk jenis dan lokasi Adventure Sport di Palabuhanratu Unesco Global Geopark (CPUGGp).

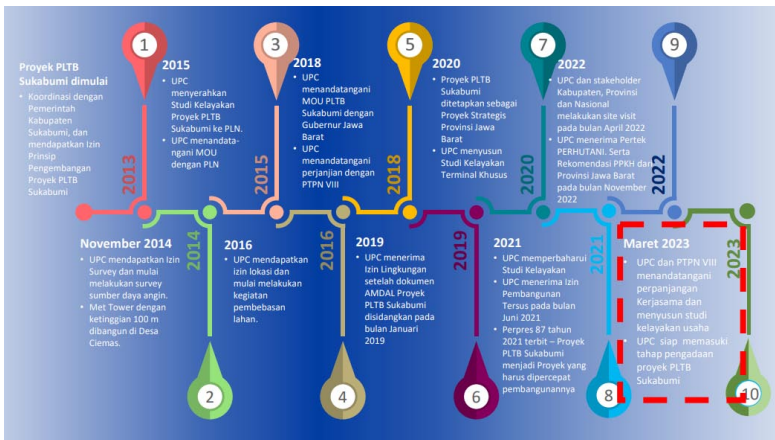
UPC meyakini bahwa rencana besar pembangunan PLTB 150 MW berskala besar di lokasi CPUGGp nantinya tidak hanya akan memberikan energi bersih dan hijau, serta nilai tambah pariwisata di Kabupaten Sukabumi, namun juga menyeimbangkan antara konservasi, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Selain PLTB di Sukabumi, pemerintah juga tengah mempertimbangkan pembangunan PLTB di Garut sebesar 60 MW. Saat ini, PTPN 8 telah dibangun 1 unit Met Mast berdasarkan HoA yang ditandatangani oleh PT Alpha Wind Energi dengan PTPN 8 sejak pertengahan tahun 2022. Proyek PLTB yang akan dibangun di Pameungpeuk, Kabupaten Garut memiliki data angin kurang dari 1 tahun. Lahan PTPN 8 ini juga telah memperoleh perjanjian (HoA) dalam rangka pemanfaatan lahan seluas 20 ha yang ditandatangani pada tahun 2022.

Menurut UPC, Proyek PLTB Sukabumi sudah lebih maju dari sisi penyusunan studi kelayakan dan analisis sumber daya angin dibandingkan proyek PLTB di Garut. Proyek PLTB Sukabumi memiliki total data angin selama 31 tahun yang diambil dari tahun 2014, dan saat ini masih memiliki 4 MET Tower yang beroperasi. Kelayakan dan *bankability* data angin tersebut sudah divalidasi oleh konsultan pihak

ketiga, dan dianggap layak untuk mendapatkan pendanaan. Selain itu, Proyek PLTB Sukabumi juga jauh lebih maju dari segi perizinan dan pembebasan lahan, dan mampu untuk membangun Proyek PLTB Sukabumi sesuai target COD yang telah ditetapkan dalam RUPTL 2021-2030.

Proyek PLTB Sukabumi, jika kapasitasnya 150 MW, juga mampu untuk menawarkan tarif penjualan listrik levelized 25 tahun yang nilainya dibawah rata-rata BPP Nasional tahun 2021 (BPP Nasional tahun 2021 = USD 7.05 sen/kWh). Proyek PLTB Sukabumi juga telah mendapatkan dukungan sangat kuat dari seluruh tingkat pemerintah maupun pemangku kepentingan. Proyek ini juga telah mendapatkan penawaran pendanaan dari DFC.



Capaian proyek PLTB Sukabumi 150 MW.

Sumber: Kemenko Marves

## Harapan Kemandirian Energi Di Jabarsel

Pembangunan PLTB Sukabumi, PLTB Garut, dan pembangkit listrik ramah lingkungan lainnya di Jabarsel merupakan upaya untuk mengubah terstigma Jabarsel sebagai daerah terpinggirkan. Sebagian potensi masa depan energi ramah lingkungan bagi bangsa ini kini ada di pesisir Selatan Jabar. Pesisir Jabarsel punya potensi energi baru terbarukan (EBT) potensial. Selain tenaga bayu, ada pula potensi panas bumi dan tenaga surya yang ramah lingkungan.

Secara investasi, pengembangan energi bersih ini memang tidak murah, sehingga diperlukan skema pengembangan energi terbarukan secara komunal. Dengan begitu, biaya investasi dan pengelolaannya tidak hanya ditanggung oleh satu pihak saja karena ada banyak pihak yang bisa memanfaatkannya. Ketika energi bersih ini diterapkan, maka kekhawatiran terhadap pasokan listrik kemungkinan besar bisa ditekan. Itulah mengapa Perpres 87/2021 juga menekankan untuk memaksimalkan potensi EBT (Energi Baru Terbarukan).

Menurut Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah, Kemenko Marves, Djoko Hartoyo, hanya menggantungkan kebutuhan pada energi fosil bukanlah hal bijaksana. Selain berbiaya tinggi, Bumi saat ini juga dihadapkan pada pemanasan global. Energi ramah lingkungan dibutuhkan untuk memperpanjang usia bumi. EBT merupakan langkah konkret mendesak untuk menangani pemanasan global. Semua negara bakal terdampak. Tidak ada lagi batasan antardaerah dan negara.



Presiden RI Joko Widodo meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata 192 MWp, (09/11/2023) di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Presiden mengatakan infrastruktur ini merupakan PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara dan ketiga di dunia.

Sumber: Dok BPMI Setpres

Untuk itu, Asdep Djoko mengajak semua pihak untuk berinisiatif mengencakan pola pembangunan berkelanjutan. Salah satunya dengan pembangunan infrastruktur pendukung energi terbarukan. Sejauh ini, pemerintah provinsi Jabar berada di jalan yang tepat. Berbagai infrastruktur, mulai dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), sedang dan akan dibangun menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Itu merujuk PLTS terapung di Waduk Cirata yang berkapasitas 145 megawatt (MW) serta PLTB Sukabumi yang berkekuatan 150 MW. Keberadaan dua infrastruktur ini bakal membantu menopang pasokan energi terbarukan panas bumi di Jabar mencapai 1.269 MW.



Presiden RI Joko Widodo meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata 192 MWp, (09/11/2023) di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Presiden mengatakan infrastruktur ini merupakan PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara dan ketiga di dunia.

Sumber: Dok BPMI Setpres

Di sisi lain, pengolahan sampah di masa depan juga diyakini lebih ramah energi. Selain punya pengolahan plastik satu-satunya di Indonesia, kawasan pengolahan sampah raksasa tengah disiapkan. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Legok Nangka, misalnya, ditargetkan bakal menghasilkan listrik 20-30 MW. Langkah itu melengkapi pembangunan baterai mobil listrik di Jabar. Dalam FGD Dekarbonisasi di Bandung pada awal November 2023 bahkan terungkap bahwa Pemprov Jabar menjadi satu-satunya daerah yang menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas.

Mengacu pada data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jabar, potensi EBT bisa dimaksimalkan lebih masif. Energi surya menjadi yang terbesar, yaitu mencapai 156,630 gigawatt peak (GWp). Selain itu, ada angin sebesar 12.272 megawatt (MW) dan panas bumi sebesar 5.956,80 MW. Namun, selain panas bumi yang sudah dimanfaatkan hingga 20 persen, angin dan surya masih berjuang menyentuh angka 1 persen.

## **Membangun Politeknik Manufaktur Kampus 2 di Majalengka**

*Melalui kerjasama pemanfaatan lahan dengan Pemerintah Kabupaten Majalengka, Politeknik Manufaktur (Polman) Bandung merencanakan untuk membangun kampus kedua di Desa Jatipamor, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka.*

**P**ada 27 April 2023, Duta Besar Swiss untuk Indonesia-Timor Leste, YM Olivier Zehnder dan Deputy Head of Mission/Wakil Duta Besar Swiss, Philip Sturbe melakukan kunjungan ke Politeknik Manufaktur (Polman) Bandung. Kunjungan ini utamanya membahas tentang persiapan kunjungan Menteri Luar Negeri Pemerintah Federal Swiss pada 2 Agustus 2023 yang akan datang untuk menindaklanjuti kerjasama antara pemerintah Swiss dan



Indonesia terkait pengembangan pendidikan vokasi. Turut hadir dalam pertemuan ini diantaranya, Direktur Polman Bandung Mohammad Nurdin, Ketua Dewan Pengawas Polman Bandung Kiki Yuliati, dan Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah Kemenko Marves Djoko Hartoyo.

Duta Besar Swiss untuk Indonesia-Timor Leste, YM Olivier Zehnder mengatakan bahwa kedatangannya antara lain adalah untuk lebih mengenal Polman Bandung, sebagai insitusi pendidikan vokasi yang pernah menerima bantuan terbesar dan terlama Pemerintah Swiss di Indonesia secara lebih dekat. Selain itu, kunjungan beliau juga merespon harapan dari Polman Bandung pada acara Anniversary 50th Years Swiss - Indonesia Vocational Collabration yang diselenggarakan 19 Oktober 2022 sekaligus pengangkatannya sejak Februari 2023 sebagai Duta besar dan berkuasa penuh Swiss untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN.



Direktur Polman Bandung Mohammad Nurdin (batik kanan) mendampingi delegasi pemerintah Swiss mengelilingi fasilitas pembelajaran vokasi di Polman Bandung.

Asdep IPW Kemenko  
Marves, Djoko  
Hartoyo (batik kanan)  
mendampingi delegasi  
pemerintah Swiss  
mengelilingi fasilitas  
pembelajaran vokasi  
di Polman Bandung.

---

Pada kesempatan ini, Direktur Polman Bandung, Mohammad Nurdin menyampaikan sejarah pendidikan vokasi di Indonesia.

Polman Bandung merupakan politeknik pertama di Indonesia yang dahulu bernama Politeknik Mekanik Swiss-ITB (PMS-ITB). Pendirian PMS-ITB merupakan hasil kerjasama bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Konfederasi Swiss yang perjanjiannya ditandatangani pada 6 Desember 1973.

Sejak 1973, pemerintah Swiss telah mensupport penyediaan bahan pengajaran, peralatan praktik, hingga tenaga ahli. Sedangkan pihak Indonesia berkontribusi pada penyediaan lahan, pembangunan gedung perkuliahan, serta fasilitas penunjang lainnya. Pemerintah konfederasi Swiss kemudian menunjuk Swisscontact, yaitu yayasan bantuan teknis dari Swiss sebagai pelaksana proyek dari



pihak Swiss, sedangkan pemerintah Indonesia menunjuk Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagai pelaksana dari pihak Indonesia.

Tiga tahun kemudian, tepatnya pada 1976, perkuliahan pertama di Polman Bandung dimulai dengan 3 program studi, yaitu Tool Making (Teknik Pembuatan Perkakas Presisi), Maintenance Mechanic (Teknik Pemeliharaan Mesin), dan Design Drafting (Teknik Gambar & Perancangan) untuk program Diploma 3. PMS-ITB baru diresmikan secara formal pada tanggal 24 Maret 1977 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI saat itu, Sjarif Thajeb.

Sebagai pelopor pendidikan politeknik di Indonesia, PMS-ITB berhasil merealisasikan tujuan pendidikan tinggi vokasi yang memperoleh sambutan sangat baik dari sektor industri. Lulusan Polman Bandung dapat diterima dengan baik oleh pasar kerja, sehingga dengan keberhasilan ini pemerintah Indonesia mendirikan politeknik-politeknik negeri lainnya di seluruh wilayah Indonesia dan membentuk Pusat Pengembangan Pendidikan Politeknik atau PEDC (*Polytechnic Education Development Center*) melalui bantuan Bank Dunia.

Menurut Mohammad Nurdin, salah satu keunggulan yang dimiliki Polman Bandung diantaranya yaitu penerapan metode pembelajaran yang dikenal sebagai *Production Based Education* (PBE). Melalui metode PBE tersebut, mahasiswa akan terlibat langsung dalam kegiatan produksi untuk keperluan industri yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan. Guna merespon kebutuhan industri nasional akan tenaga ahli di beberapa bidang manufaktur, pada 1988

Polman kemudian membuka jurusan Foundry (Teknik Pengecoran Logam). Medio 1990, nama PMS-ITB berubah menjadi Polman Bandung. 5 tahun kemudian, Polman Bandung membuka jurusan Automation & Mechatronic (Teknik Otomasi Manufaktur & Mekatronika).

Pada 1995 kerjasama bilateral antara pemerintah RI dan pemerintah Konfederasi Swiss berakhir. Sejak tahun 2002, seluruh program studi yang di selenggarakan Polman Bandung memperoleh nilai akreditasi “A” dari badan akreditasi nasional pendidikan tinggi (BAN-PT). Polman Bandung juga meraih Sertifikat ISO 9001-2000 yang merupakan sertifikat ISO pertama yang diberikan kepada sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia. Capaian



Suasana pembelajaran di Politeknik Manufaktur Bandung.

tersebut menegaskan posisi Polman dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan nasional untuk mencetak SDM yang kompeten, cerdas, disiplin dan profesional.

Untuk menjawab tantangan kedepan, Polman Bandung harus terus mengembangkan diri. Namun karena keterbatasan lahan Kampus 1 di Bandung saat ini, Polman kini tengah berupaya untuk membangun Kampus 2 di tempat lain, yaitu di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Adapun pengembangan Kampus 2 dilakukan dengan konsep Dual Pole, yaitu Blue Pole dan Green Pole, yaitu pendidikan yang mengintegrasikan seluruh aspek manufaktur meliputi teknologi, budaya, dan ekonomi. Selain itu ekosistem pendidikan perlu dibangun agar dapat berinteraksi dengan industri khususnya Jawa Barat sehingga akan meningkatkan daya saing industri dan mendukung ekonomi umat di Jawa Barat yang akhirnya akan mempengaruhi perkembangan kemajuan teknologi di Indonesia.

Menurut Ketua Dewan Pengawas Polman Bandung Kiki Yulianti, Presiden Indonesia Joko Widodo sangat berkomitmen dalam pengembangan Pendidikan Vokasi di Indonesia. Selain karena tuntutan perkembangan industri dan teknologi yang kian cepat, dukungan terhadap pengembangan pendidikan vokasi sekaligus untuk mempersiapkan 100 tahun Kemerdekaan Indonesia, sehingga Polman Bandung berkomitmen untuk terus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk mensupport dengan mencetak SDM-SDM yang kompeten yang dapat mendukung industri di Indonesia.

Terkait pengembangan Polman Kampus 2 di Majalengka, Kiki Yulianti menyebut sampai saat ini dukungan terus mengalir, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Adapun dengan rencana kehadiran konsep Dual-Pole di area Polman Kampus 2, diharapkan dapat memberi suatu perubahan atau transformasi dari nilai-nilai dasar dalam mendukung pembangunan manusia seutuhnya yang berakhlak, berbudi pekerti, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan dalam berbangsa, bernegara, dan beragama khususnya di Jawa Barat.

Pembangunan Polman Kampus 2 di Majalengka juga senada dengan konsentrasi dari pemerintah pusat dalam pengembangan wilayah ekonomi baru, salah satunya yaitu Kawasan Rebana yang teruang dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2021. Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah Kemenko Marves Djoko Hartoyo menyebut bahwa teknologi dari Swiss adalah salah satu yang terbaik di dunia. Sehingga besar harapan agar kerjasama antara pemerintah Swiss dan Indonesia dapat terus berlanjut. Terlebih Polman Bandung nantinya akan mensupport setiap industri yang ada di Kawasan Rebana.

Dalam kesempatan tersebut, segenap tamu juga berkesempatan berkeliling melihat langsung aktivitas pendidikan vokasi di Polman Bandung, mulai dari fasilitas, gedung, sarana prasarana, aktivitas mahasiswa, hingga produk-produk berkualitas tinggi yang dihasilkan oleh Polman Bandung. Setelah berkeliling, Duta Besar Swiss untuk Indonesia-Timor Leste, YM Olivier Zehnder mengapresiasi prestasi serta capaian Polman Bandung dalam mencetak





Kunjungan Duta Besar Swiss untuk Indonesia-Timor Leste, YM Olivier Zehnder dan Deputy Head of Mission/Wakil Duta Besar Swiss, Philip Sturbe ke Polman Bandung, 27 April 2023. Turut hadir pula Direktur Polman Bandung Mohammad Nurdin, Ketua Dewan Pengawas Polman Bandung Kiki Yuliati, dan Asdep IPW Kemenko Marves Djoko Hartoyo

SDM-SDM berkualitas yang siap berkiprah di dunia industri. Mr Olivier Zehnder bahkan akan mengupayakan agar kerjasama yang terjalin antara Pemerintah Federal Swiss dan Pemerintah Republik Indonesia terkait pengembangan Pendidikan Vokasi dapat terus berlanjut, termasuk dalam pendirian Polman Kampus 2 di Kabupaten Majalengka, serta mendorong sektor industri maupun swasta untuk berbagi peran dalam pengembangan vokasi di Indonesia.

Sebelumnya, Kamis pagi, 27 April 2023, Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah Kemenko Marves,



Djoko Hartoyo menghadiri dan menjadi saksi pelantikan Kepala Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (BP Cekban) dan Kepala BP Kawasan Metropolitan Rebana di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung. Prosesi pelantikan dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Tatang Rustandar Wiraatmadja dilantik sebagai Kepala Pelaksana Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. Sedangkan Bernardus Djonoputro dilantik sebagai Kepala Badan Pengelola Kawasan Rebana.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut bahwa 27 April 2023 menjadi tanggal bersejarah dalam tata kelola pembangunan Jawa Barat, khususnya terkait terciptanya inovasi untuk percepatan penyempurnaan proses pembangunan. Gubernur berpesan kepada kedua Kepala BP bahwa dalam teori pembangunan perkotaan diketahui tidak semua urusan bisa mudah dikoordinasikan jika berada pada satu aglomerasi.

Ridwan Kamil mengingatkan bahwa wilayah administrasi politik berupa provinsi, kota, maupun kabupaten dalam realita di lapangan tidak selalu warganya cukup beraktivitas di satu wilayah saja. Ridwan Kamil mencontohkan dalam urusan ekonomi, dimana orang tinggal di kabupaten A bisa saja bekerja di kota B. Begitu pun untuk urusan air, yang mengalir datang dari kota A, ke kota B, lalu berakhir di kota C. Hal tersebut telah menyebabkan banyak kendala dalam menyamakan visi dan misi dalam skala aglomerasi ataupun klaster.

Terkait pengelolaan BP Cekungan Bandung (BP Cekban), Ridwan Kamil menyebut bahwa saat ini BP

Pelantikan Kepala  
BP Cekban  
dan Kepala BP  
Rebana, 27 April  
2023. Disaksikan  
Asdep IPW  
Kemenko Marves,  
Djoko Hartoyo.



Cekban telah mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat melalui Perpres Nomor 45 tahun 2018 tentang RTR Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung sehingga Cekban menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN). Selain itu ada pula dukungan berupa Peraturan Menteri ATR Nomor 24 tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 tahun 2020 tentang BP Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.

Kepada Kepala BP Cekban, Ridwan Kamil berharap pelantikan tersebut menjadi awal yang positif untuk membangun sebuah manajemen pembangunan yang lebih baik. Gubernur menitipkan kepada Kepala BP Cekban agar sesegera mungkin berkoordinasi dengan tim provinsi serta lima wilayah di Bandung Raya untuk memulai menyamakan persepsi permasalahan. Adapun untuk mendukung pengelolaan tata ruang, Gubernur menekankan agar pembangunan transportasi publik di wilayah Cekban dapat menjadi prioritas.



Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil melantik Kepala BP Cekban dan Kepala BP Rebana di Aula Gedung Sate Kota Bandung – Jawa Barat, 27 April 2023.

Sedangkan kepada Kepala BP Rebana, Ridwan Kamil berharap ke depannya Kawasan Rebana dapat menjadi Representasi atau Wajah Terbaik dari Jawa Barat. Ridwan Kamil menekankan kepada Kepala BP Rebana Bernardus Djonoputro agar bisa membawa kawasan Rebana menjadi yang terdepan. Terlebih kawasan tersebut didesain mulai dari nol, sehingga harus direncanakan dengan baik agar bisa menjadi wajah terbaik Jabar di masa depan. Gubernur menyebut Kawasan Rebana dapat meningkatkan pertumbuhan Provinsi sekitar 3-4 persen jika dieksekusi dengan baik.

Menurut Ridwan Kamil, BP Rebana bukan hanya sekadar urusan koordinasi tata ruang saja melainkan juga aksi nyata, dimana BP Rebana harus dapat berkerja secara kolaboratif. Adapun salah satu yang perlu diperhatikan adalah

pembangunan Kota Maritim Patimban yang memerlukan upaya-upaya nyata berupa sosialisasi, koordinasi, hingga fokus untuk memasarkan kawasan kota Maritim Patimban. Sehingga Patimban dapat menjadi pelabuhan dengan tata ruang yang baik, setara Pelabuhan Yokohama di Jepang.

Pasca pelantikan, Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah Kemenko Marves, Djoko Hartoyo menyebut bahwa Pelantikan Kepala BP Cekban dan Kepala BP Rebana merupakan hal positif, khususnya terkait percepatan pengembangan wilayah ekonomi baru di Jawa Barat. Asdep Djoko Hartoyo berpesan kepada Kepala BP Cekban dan Kepala BP Rebana bahwa dalam waktu dekat akan dilaksanakan penyusunan Road Map (Peta Jalan) Pendidikan Vokasi, yang diantaranya bertujuan untuk mencetak SDM-SDM berkualitas yang siap bekerja dan mengembangkan industri di Jawa Barat.

Disampaikan pula bahwa salah satu program prioritas yang kini sedang dipersiapkan adalah Pembangunan Polman Kampus 2 di Majalengka. Asdep IPW berharap Pembangunan Tahap I Polman Kampus 2 dapat segera Ground Breaking sehingga diharapkan dalam 2-3 tahun ke depan masyarakat Jawa Barat sudah dapat menikmati Polman Kampus 2, sebagai ikon baru pendidikan vokasi di Majalengka dan Jawa Barat.

## Mengembangkan Kawasan Agribisnis Pertanian

*Pengembangan kawasan agribisnis pertanian di Rebana dan Jabarsel terus didorong oleh Kemenko Marves untuk memaksimalkan potensi pengembangan ekonomi baru.*

**S**epanjang tahun 2023, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi terus menindaklanjuti pengembangan kawasan agribisnis di Kawasan Rebana dan Jabarsel. Pada 10 Maret 2023, Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah Kemenko Marves, Djoko Hartoyo memimpin Rapat “Pembahasan Kegiatan di Kabupaten Kuningan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Jabar Selatan.” Rapat ini dihelat di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung.



Rapat “Pembahasan Kegiatan di Kabupaten Kuningan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Jabar Selatan,” di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat, Kamis, 10 Maret 2023.

Salah satu poin pembahasan dalam rapat tersebut antara lain difokuskan membahas kelanjutan program “Pengembangan Kawasan Agribisnis Berbasis Korporasi Pertanian” di Kabupaten Kuningan. Adapun Pengembangan Korporasi Pertanian di Kuningan merupakan implementasi proyek strategis yang tertuang dalam Perpres 87 Tahun 2021. Dalam Perpres itu, Kabupaten Kuningan diarahkan mengembangkan Kawasan Pertanian Berbasis Desa dan korporasi pertanian dengan potensi hortikultura seperti cabai, kentang, dan tomat.

Asdep IPW Kemenko Marves, Djoko Hartoyo menyebut bahwa Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut untuk mempersiapkan program kegiatan 2023 dan 2024 di sektor

pertanian, khususnya di Kabupaten Kuningan. Selain membahas pengembangan korporasi petani, rapat juga membahas tentang daya saing kawasan; pengembangan kawasan agribisnis berbasis korporasi petani; peningkatan infrastruktur dasar, seperti Jalan Usaha Tani (JUT), saluran irigasi, dan cetak sawah baru; serta pengembangan pusat penelitian.

Dalam rapat tersebut, Djoko Hartoyo meningkatkan segenap Pemkab untuk segera menyiapkan proposal dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Kendala-kendala yang ada juga harap segera dikomunikasikan supaya bisa ditindaklanjuti secepatnya. Dengan kordinasi yang baik, maka program pengembangan sektor pertanian akan berjalan lebih cepat.

Perwakilan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kuningan, Andi menyebut, pihaknya akan segera melengkapi kekurangan terkait proposal grand design pengembangan pertanian di Kabupaten Kuningan. “Konsen kami ada pada moda transportasi pertanian, korporasi petani, pasokan pupuk murah, dan peningkatan kapasitas petani serta penyuluh. Kami berharap nilai tukar petani ini bisa meningkat,” papar Perwakilan Bappeda Kuningan, Andi.

Korporasi petani merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas petani. Para petani didorong untuk berkelompok. Gabungan dari banyak kelompok tani kemudian dikumpulkan menjadi jumlah yang lebih besar lagi sehingga memiliki skala ekonomi yang efisien dan berada dalam sebuah korporasi. Dengan korporasi, petani



didorong untuk lebih mandiri dan bisa mendapatkan akses terhadap permodalan yang lebih luas.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, Iendra Sofyan; Perwakilan Kepala Bappeda Kabupaten Kuningan; Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kuningan, Ahmad Juber; Perwakilan dari Biro Perencanaan Kementerian Pertanian (Kementan), Vina; serta para dinas-dinas terkait dari Ditjen Hortikultura Kementan, dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat.

Pada kesempatan tersebut, Bappeda Kabupaten Kuningan menyampaikan beberapa usulan kegiatan/program pembangunan dan pengembangan kawasan



Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah Kemenko Marves, Djoko Hartoyo menyampaikan urgensi pembangunan infrastruktur dan pengembangan korporasi petani dalam kegiatan Musrenbang 2023 Kab Sukabumi, 15 Maret 2023.

agribisnis pertanian (hortikultura) berbasis korporasi petani, antara lain: penyusunan grand design pembangunan pertanian di Kab Kuningan; pembangunan prasarana Jalan usaha Tani (JUT); pembangunan prasarana pengairan berupa embung, sumur dalam, irigasi perpompaan, maupun irigasi pipanisasi; penyediaan sarana produksi; penyediaan sarana pengolahan dan pemasaran; peningkatan SDM petani milenial hortikultura melalui Inkubator pertanian; pengembangan Balai Benih Tanaman Pertanian; perlindungan konsumsi pangan; konservasi tanah dan air; dan pembangunan Pertanian Presisi (pembangunan sarana angkutan pertanian).

Terkait penyusunan grand design pembangunan pertanian di Kab Kuningan, usulan program itu meliputi 12 desa, yaitu Desa Gunungsirah, Desa Karagsari, Desa Sagarahyang, Desa Situsari, Desa Puncak, Desa Cihirup, Desa Cierih, Desa Babakanmulya, Desa Sidamulya, Desa Randobawagirang, Desa Sukadana, dan Desa Sukamulya. Sedangkan pembangunan JUT diharapkan bisa menyasar 10 desa, yaitu Desa Gunungsirah, Desa Karagsari, Desa Sagarahyang, Desa Situsari, Desa Puncak, Desa Cihirup, Desa Cierih, Desa Babakanmulya, Desa Sidamulya, dan Desa Randobawagirang.

Pembangunan embung ditargetkan di tiga desa yaitu Desa Sagarahyang, Desa Situari Kec Darma, dan Desa Babakanmulya Kec Jalaksanan. Sementara untuk pembangunan irigasi perpompaan diajukan di enam lokasi, yaitu di Desa Karangsari, Desa Sagarahyang, Desa Gunungsirah, Desa Randobawagirang, Desa Cieurih, dan

Desa Situsari. Adapun pembangunan irigasi perpipaan diajukan di sepuluh desa, yaitu Desa Gunungsirah, Desa Situsari, Desa Karangsari, Desa Sagarahiyang, Desa Puncak, Desa Randobawagirang, Desa Cieurih, Desa Babakanmulya, Desa Sidamulya, dan Desa Cihirup. Sedangkan untuk pembangunan sumur dalam, empat lokasi diajukan, yaitu di Desa Gunungsirah, Desa Karangsari, Desa Puncak, dan Desa Cihirup.

Bappeda Kabupaten Kuningan juga konsen terhadap pembangunan sarana produksi hingga pengolahan dan pemasaran pascapanen. Sarana produksi yang diajukan mulai dari benih, pupuk, dan alat mesin pertanian. Sedangkan untuk pengolahan pascapanen akan didorong dengan pemanfaatan teknologi yang tepat guna. Dengan adanya stimulan tersebut, petani diharapkan bisa melaksanakan usaha dengan biaya lebih rendah, sehingga produksi dan produktivitas komoditas hortikultura dapat ditingkatkan sepanjang tahun.

KegiatanpembangunankawasanpertaniandiKabupaten Kuningan merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kemiskinan. Melalui kawasan hortikultura, diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktifitas komoditas untuk meningkatkan pendapatan para petani. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan produksi bisa meningkat 7 persen. Dengan meningkatnya produksi, diharapkan juga berdampak pada peningkatan pendapatan petani serta kesejahteraan mereka.

Pengembangan agribisnis berbasis korporasi juga didorong untuk dikembangkan di Kabupaten Sumedang.

Melalui skema korporasi, para petani diorganisir dan didorong untuk bekolaborasi dalam suatu korporasi petani yang memiliki skala ekonomi sehingga mereka dapat meningkatkan efisiensi usahanya. Pada awal 2023 lalu, Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Pelatihan (BBPP) Lembang menyelenggarakan Pelatihan Korporasi Mendukung Pembangunan Kawasan Rebana dan Jabarsel di Sumedang.

BBPP Lembang menggelar Pelatihan Pengembangan Agribisnis Berbasis Korporasi Petani di Kantor UPTD Jatigede Kabupaten Sumedang, pada 27-28 Februari 2023. Pelatihan tersebut diikuti oleh 30 orang petani dari 3 kecamatan yaitu Jatigede, Ujungjaya, dan Tomo. Selama 2 hari peserta menerima materi dari fasilitator pelatihan yaitu penyuluh pertanian dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumedang. Materi yang disampaikan adalah penumbuhan dan pengembangan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, serta Kelompok Ekonomi Petani.

Menurut Kepala UPTD Kecamatan Jatigede, Cahyadi, pelatihan tersebut dapat meningkatkan motivasi petani dalam manajerial kelompok dalam kerangka pemberdayaan kelompok tani sehingga meningkatkan partisipasi anggota kelompok yang diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas mangga gedong gincu. Adapun pengembangan kawasan korporasi mangga gedong gincu di Kabupaten Sumedang dilaksanakan di luas areal 3.653 hektar dari 3 kecamatan yaitu Jatigede, Ujungjaya, dan Tomo.

Menurut Ketua Kelompok Tani Mekarsari I dari Kecamatan Darma, Asep Setiawan, pelatihan tersebut sangat bermanfaat. “Banyak ilmu dan pengetahuan yang kami terima di pelatihan ini yang bermanfaat bagi kami sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Semoga program-program yang digulirkan untuk mendukung pembangunan kawasan Rebana dan Jabarsel ini dapat berjalan sesuai harapan, tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan petani,” tuturnya.

Pada 16 Maret 2023, Kemenko Marves menindaklanjuti rapat pengembangan sektor pertanian di Kawasan Rebana dan Jabarsel yang digelar di Bandung seminggu sebelumnya. Pada kesempatan tersebut, Asdep IPW Kemenko Marves, Djoko Hartoyo memimpin rapat “Pembahasan Progres Kegiatan Pendukung Perpres 87 Tahun 2021 di Sektor



Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah Kemenko Marves, Djoko Hartoyo memimpin Rapat “Pembahasan Progres Kegiatan Pendukung Perpres 87 Tahun 2021 di Sektor Pertanian,” pada Kamis, 16 Maret 2023 di Bandung.



Asdep IPW Kemenko Marves, Djoko Hartoyo meninjau produksi pengolahan pasca panen komoditas Mangga Gedong Gincu yang dikelola oleh Koperasi Mitra Tani Jatigede. Sumedang, 31 Agustus 2023.

Pertanian.” Pada kesempatan itu Asdep Djoko mengingatkan bahwa keberhasilan menumbuhkembangkan Korporasi Petani akan meningkatkan akses petani terhadap sumber daya produktif; memberi nilai tambah dan daya saing produk pertanian; memperkuat kelembagaan petani; serta meningkatkan kapasitas dan posisi tawar petani, yang akhirnya bermuara pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Saat ini Korporasi Petani tidak lagi berbasis individual dan fokus pada usaha tani budidaya, namun menjadi berbasis korporasi dan mencakup aneka usaha terintegrasi. Korporasi Petani dibentuk dari, oleh, dan untuk petani. Sementara pengelolaannya dilakukan dengan memadukan inovasi teknologi dengan manajemen kreatif.



Perwakilan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Merry menyebutkan, Bappeda Jabar telah mengidentifikasi empat lokasi pengembangan sektor pertanian yang tertuang dalam Perpres 87 Tahun 2021, yaitu di Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Kuningan. Pada tahun 2023, pengembangan korporasi komoditas gedong gincu dan Hortikultura di Kabupaten Sumedang sudah bisa berjalan melalui mekanisme pendanaan kompetitif dengan anggaran Rp21,4 miliar, sedangkan di tiga lokasi lainnya masih perlu penyesuaian dokumen.



Asdep IPW Kemenko Marves, Djoko Hartoyo bersama perwakilan BRIN, Kementan, dan Bappeda Jabar, berdiskusi bersama sejumlah petani komoditas Mangga Gedong Gincu yang tergabung dalam Koperasi Mitra Tani Jatigede. Sumedang, 31 Agustus 2023.



Perwakilan Biro Perencanaan Kementerian Pertanian (Kementan) Vina menjelaskan bahwa ketiga lokasi lainnya masih menemui sejumlah kendala. Sebagai contoh, proyek pembangunan pusat penelitian yang terkendala akibat fungsi penelitian yang saat ini sudah dialihkan dan terpusat ke BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) dan tidak lagi berada di masing-masing kementerian/lembaga. “Pencetakan sawah baru di Tasikmalaya juga perlu konfirmasi dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, mengingat saat ini tidak ada lagi kebijakan pencetakan sawah baru,” ujarnya.

Vina menambahkan bahwa program Korporasi Petani merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo untuk fokus meningkatkan kesejahteraan petani dengan cara penguatan dari hulu ke hilir. Arahan Presiden itu ditindaklanjuti oleh Kementan melalui penetapan Permentan-RI Nomor 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018. Pihaknya pun akan terus berupaya mendorong agar target Korporasi Petani bisa tercapai.

Pembahasan progres kegiatan pendukung Perpres 87/2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan merupakan tindak lanjut dari upaya koordinasi yang digalakan Kemenko Marves terkait implementasi Perpres terkait di bidang pertanian. Sebelumnya, pembahasan dukungan sektor pertanian telah dilakukan melalui serangkaian kegiatan sejak tahun lalu, antara lain rakor, pengajuan matriks usulan dari kabupaten, visitasi, dan validasi lapangan.

Terkait Korporasi Petani, Asdep Djoko berharap setiap pihak bisa lebih bersinergi dan intens berkomunikasi. Terlebih Korporasi Petani ini merupakan arahan langsung dari Presiden Jokowi. Korporasi Petani merupakan major project yang pelaksanaannya membutuhkan sinergi antarunit eselon lingkup Kementerian Pertanian serta lintas Kementerian maupun Lembaga. “Apa yang dilakukan saat ini sangat in-line dengan rancangan program prioritas pemerintah,” tegas Asdep Djoko.

Secara umum, pada lampiran Perpres 87/2021 terdapat beberapa proyek/program lingkup sektor pertanian yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian (Kementan) dengan bersinergi dengan Pemda terkait, yaitu:

1. Dalam Tabel IV.5 Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur Lainnya Kawasan Rebana, ada kegiatan peningkatan daya saing kawasan yaitu Pengembangan Kawasan Agribisnis Berbasis Korporasi Petani di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Kuningan.
2. Dalam Tabel IV.6 Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, ada kegiatan Optimalisasi Daerah Irigasi melalui Pencetakan Sawah Baru di Kecamatan Cipatujah, Kecamatan Karangnunggal, dan Kecamatan Bantarkalong yang seluruhnya ada di Kabupaten Tasikmalaya.
3. Dalam Tabel IV.7 Rencana Induk Pengembangan Sektor Agribisnis Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, ada kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan Produk Turunan Kelapa (produk

Unggulan Kawasan Desa Kementerian Desa dan PDTT) di Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya; dan juga Pembangunan Pusat Penelitian Pengembangan Sapi Pasundan di Desa Sidaharja, Kecamatan Lakkok, Kabupaten Ciamis.

Pembahasan dukungan sektor pertanian ini telah dilakukan oleh Asdep IPW Kemenko Marves melalui sejumlah rangkaian kegiatan antara lain rakor, pengajuan matriks usulan dari kabupaten, visitasi, dan validasi Lapangan. Beberapa kegiatan dukungan antara lain adalah Rakor Pembahasan Tindaklanjut Penyiapan Dokumen



Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah Kemenko Marves, Djoko Hartoyo (topi krem, kiri) meninjau Bendungan Cariang di Kec Ujung Jaya, Kab Sumedang yang jebol. Sumedang, 27 Oktober 2023.

Readiness Criteria Proyek P1 di Garut, 20 September 2022; Rapat Pembahasan Program/Proyek Kementerian Pertanian dalam mendukung Perpres 87 tahun 2021 di Kantor Kementerian Pertanian Jakarta, 3 Oktober 2022; Penyampaian Usulan Kegiatan Proyek Sektor Pertanian dari 4 Kabupaten yaitu Sumedang, Kuningan, Tasikmalaya, Ciamis; Visitasi dan Validasi Lapangan di Sumedang, Kuningan, Tasikmalaya, dan Ciamis pada 26-28 Oktober 2022 dan 2-5 November 2022; serta FGD Percepatan Program Strategis Nasional Pembangunan Kawasan Rebana dan Jabarsel (Perpres 87/2021) lingkup Kegiatan Sektor Pertanian di Bandung, 17 November 2022.

Pengembangan Kawasan Agribisnis Berbasis Korporasi Petani merupakan Major Project yang membutuhkan sinergi.

---

Bendungan Cariang di Kec Ujung Jaya, Kab Sumedang yang jebol, membuat irigasi lahan pertanian untuk kawasan sekitarnya terganggu. Sumedang, 27 Oktober 2023.



Dalam Rapat Terbatas Akselerasi Penguatan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan di Kantor Presiden, Jakarta, 10 Desember 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan: *“Mendorong lebih kuat kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di sektor pertanian untuk berkolaborasi membentuk kelompok-kelompok atau bersama korporasi besar. Kelompok Petani/Gabungan Kelompok Tani didorong untuk membentuk Korporasi Petani.”*

Kemudian dalam Rapat Terbatas Korporasi Petani Nelayan dalam Mewujudkan Transformasi Ekonomi pada 6 Oktober 2020, Presiden Joko Widodo kembali memberi tiga arahan: *Pertama*, fokus membangun model bisnis korporasi petani atau korporasi nelayan di sebuah provinsi. Presiden menginginkan nantinya bisa dijadikan contoh di provinsi lain. *Kedua*, meminta peran BUMN, swasta besar dan BUMD bukan semata-mata sebagai *off taker*. *Ketiga*, meminta agar memperkuat ekosistem bisnis yang dilakukan secara terpadu.

Penguatan jaminan usaha melalui Korporasi Petani dan Nelayan perlu dilakukan karena sejumlah pertimbangan. *Pertama*, belum terintegrasinya 1.029 klaster komoditas pertanian berbasis produksi pertanian dengan askes pasar. *Kedua*, akses sumber daya produktif rendah, akses KUR untuk sektor pertanian hanya 23 persen. *Ketiga*, adanya keterbatasan nelayan untuk mengakses skema perkreditan, permodalan, teknologi, dan pasar. *Keempat*, perlunya peningkatan Nilai Tukar Petani dan Nelayan atau NTP.

Dengan Korporasi Petani dan Nelayan, nilai NTP diharapkan bisa meningkat; nilai tambah per tenaga

pertanian juga meningkat menjadi Rp 54,30 juta per tenaga kerja; nilai tuker nelayan semakin menguat, serta terbentuk setidaknya 150 kalster Korporasi Petani. Oleh sebab itu, maka penguatan Korporasi Petani ini hanya bisa terlaksana dengan baik jika ada keterpaduan lintas sektor. Kementerian PPN/Bappenas sebagai penanggung jawab proyek perlu didukung oleh lintas K/L seperti Kementan, KemenKP, KemenKUKM, Kemendag, Kemenperin, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta, hingga Perguruan Tinggi.

## Studi Sosial Pengembangan Wilayah

*Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) telah menyelenggarakan studi sosial pengembangan wilayah di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan. Ini merupakan salah satu upaya untuk menggali potensi daerah dan menyusun rekomendasi pembangunan yang tepat sasaran.*

**M**edio 5-6 Agustus 2023, Kemenko Marves melalui Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah (Asdep IPW) menyelenggarakan Studi Sosial Pengembangan Desa Konservasi di Kabupaten Majalengka. Studi bertajuk Join Course Program Social Design 2.0 itu diselenggarakan di Desa Bantaragung, Kecamatan Sindangwangi dan menjadi bagian dari implementasi Perpres Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan (Jabarsel).



Tim Asdep IPW Kemenko Marves sebelumnya sudah melakukan survei lokasi ke Majalengka pada 13-14 April 2023. Saat itu ada 5 desa di sekitar Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) yang dikunjungi. Setiap desa memiliki potensi dan keunikan tersendiri. Setelah survei dan studi awal tersebut, Desa Bantaragung lalu ditetapkan sebagai lokasi kajian karena dinilai mewakili kebutuhan di Majalengka.

Saat membuka Join Course Program Social Design 2.0 itu pada Sabtu, 5 Agustus 2023, Asdep IPW Kemenko Marves Djoko Hartoyo menyebut bahwa kajian di Desa Bantaragung merupakan tindak lanjut dari program pengembangan Desa Konservasi di Kabupaten Majalengka. Adapun pengembangan Desa Konservasi itu merupakan usulan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena letak geografis Majalengka sebagai penyangga TNGC.

Hasil studi nantinya akan menjadi masukan bagi pemerintah pusat dan daerah terkait model pengembangan Desa Konservasi di Kabupaten Majalengka. Majalengka dinilai akan semakin berkembang kedepannya, secara ekonomi maupun pariwisata. Terlebih setelah dibukanya Tol Cisumdawu yang mempersingkat waktu tempuh dari Bandung ke Majalengka. Bandara BIJB Kertajati juga akan berkembang seiring dengan rencana penambahan jumlah rute penerbangan dalam waktu dekat.

Selain itu, Kabupaten Majalengka juga menjadi lokasi pembangunan Politeknik Manufaktur (Polman) Bandung Kampus 2. Untuk tahap awal, Polman Bandung akan membangun Gedung Technopole. Kemenko Marves juga mendorong agar anak-anak muda di Bantaragung bisa

menerima beasiswa afirmatif dari Provinsi. Sehingga nanti minimal akan ada alokasi 20 orang perwakilan dari Dinas di provinsi, dan saya ada setidaknya satu orang pemuda Desa Bantaragung yang mendapat beasiswa.

Sebelumnya pada 31 Maret 2023, Asdep IPW Kemenko Marves telah meneken Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran (Unpad) terkait Studi Sosial Program Desa Konservasi di Kabupaten Majalengka. Dalam PKS itu, tim FISIP Unpad akan melakukan studi sosial di sejumlah desa sekitar kawasan TNGC. Pada prosesnya, FISIP Unpad juga mengajak mahasiswa dari Waseda University Jepang untuk bergabung dalam studi.

Sebelum kajian di Majalengka, Asdep IPW Kemenko Marves telah melakukan PKS serupa pada 2022 dengan FISIP Unpad untuk Studi Sosial di Kabupaten Kuningan. Berdasarkan MoU tersebut, Asdep IPW Kemenko Marves melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Kawasan Berbasis Desa Konservasi dan Observasi Lapangan Pilot Project Desa Konservasi Kab Kuningan pada 29 September 2022 dengan melibatkan Akademisi dari PSSDML UI, FISIP Unpad, Prodi Ilmu Lingkungan UNIKU, serta Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), Bappeda Provinsi Jabar, Bappelitbangda Kabupaten Kuningan, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII Provinsi Jabar, Dinas LH Kabupaten Kuningan, dan Bagian Perekonomian dan SDA Kabupaten Kuningan.

Adapun FGD di Kuningan itu bertujuan untuk menggali informasi awal dalam rangka menyusun konsep

Pengembangan Kawasan Berbasis Desa Konservasi yang selaras dan seimbang antara kepentingan ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Selanjutnya Kemenko Marves melaksanakan observasi pada daerah yang berpotensi dan akan diusulkan sebagai pilot project kegiatan tersebut.

Pada 13-16 Oktober 2022, Studi Sosial bertajuk Join Course - Social Design 1.0 Pengembangan Kawasan Desa Berbasis Konservasi Kabupaten Kuningan terlaksana dengan melibatkan 34 mahasiswa UNPAD, 2 mahasiswa Waseda University (*Student Exchange*), 1 mahasiswa S2 dari Afganistan (beasiswa Indonesia), dan 7 mahasiswa Waseda

Join Course  
– Social Design  
1.0 di Kabupaten  
Kuningan, 13-16  
Oktober 2022

Sumber: Asdep IPW  
Kemenko Marves





Penandatanganan PKS antara Kemenko Marves dan FISIP Unpad terkait studi sosial pengembangan kawasan di Kabupaten Kuningan. 23 September 2022

Sumber: Asdep IPW Kemenko Marves

University yang mengikuti secara daring, serta 8 dosen FISIP UNPAD.

Program Join Course - Social Design juga merupakan implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Dalam hal ini Kemenko Marves dan Bappelitbangda Kabupaten Kuningan berperan sebagai tim pendamping lapangan. Dalam kegiatan tersebut, para mahasiswa peserta Social Design melakukan survei pengumpulan data dan memuat agenda observasi lapangan dan wawancara kepada masyarakat di 4 desa di Kabupaten Kuningan, yaitu Desa Cibuntu, Desa Cibeureum, Desa Cisantana, dan Desa Karangsari.

Pasca studi social di Kabupaten Kuningan berakhir, Asdep IPW Kemenko Marves lalu melaksanakan Koordinasi Tindak lanjut Join Course tersebut pada 22-23 Desember 2022 di Bandung untuk melihat perkembangan penyusunan hasil studi lapangan yang telah dilaksanakan sebelumnya dan perkembangan penyusunan publikasi karya ilmiah bersama sebagai salah satu ruang lingkup dan output dalam PKS. Adanya publikasi karya ilmiah bersama sebelum PKS berakhir diharapkan bisa bermanfaat sebagai masukan dalam menyusun desain model kebijakan dan program pengembangan kawasan berbasis Desa konservasi yang partisipatif.

Terkait Studi Social 2.0 di Kabupaten Majalengka, Asdep IPW Kemenko Marves, Djoko Hartoyo menyebut bahwa kegiatan tersebut dilatarbelakangi oleh empat hal. *Pertama*, implementasi Perpres No 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jabarsel. *Kedua*, pengembangan Desa Konservasi yang diusulkan oleh 3 kabupaten yaitu Subang, Majalengka, dan Kuningan merupakan proyek prioritas pertama (P1) dan telah memenuhi *Readiness Criteria* (RC) dari hasil validasi BPKP dan ditargetkan selesai sebelum tahun 2024.

*Ketiga*, Program tersebut juga terindikasi masuk dalam Rancangan Awal Proyek Prioritas Kawasan Rebana untuk tahun 2024 berdasarkan hasil kajian Bappenas, sehingga agar pencapaian program sesuai dengan yang diharapkan diperlukan kajian model kebijakan pengembangan kawasan berbasis Desa Konservasi. Dan *keempat*, selain studi sosial pengembangan Desa Konservasi, kegiatan dalam PKS

juga akan mengkaji dampak dari program pengembangan wilayah di Kabupaten Majalengka.



Asdep IPW Kemenko Marves, Djoko Hartoyo (kemeja biru) melakukan kunjungan ke Desa Bantaragung, Kec Sindangwangi, Kabupaten Majalengka pada 14 April 2023. Dalam hadir dalam kunjungan tersebut, Perwakilan FISIP Unpad, Pengelola TNGC, Bappedalitbang Kab Majalangka, Bappeda Prov Jabar, dan Bank Indonesia.

Sumber: Asdep IPW Kemenko Marves



Kemenko Marves menyelenggarakan studi sosial bertajuk Join Course Program Social Design 2.0 di Desa Bantaragung, Kecamatan Sindangwangi pada 5-6 Agustus 2023. Asdep IPW Kemenko Marves, Djoko Hartoyo menyebut studi sosial ini sebagai implementasi Perpres 87/2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Jabarsel.

Sumber: Asdep IPW Kemenko Marves





Kemenko Marves menyelenggarakan Studi Sosial Pengembangan Desa Konservasi di Desa Bantaragung, Kecamatan Sindangwangi pada Sabtu-Ahad, 5-6 Agustus 2023. Sebanyak 15 mahasiswa Program Administrasi Publik Unpad dan 5 mahasiswa Ilmu Sosial Waseda University Jepang terlibat dalam Join Course Program Social Design 2.0 ini. Mereka dibagi ke dalam 5 kelompok topik riset, yaitu *organizational capacity*, *governance*, *rural economic development*, *policy*, dan *society*.

Sumber: Asdep IPW Kemenko Marves

Studi Sosial di Kabupaten Majalengka yang tertuang pada PKS antara Kemenko Marves dan FISIP Unpad juga tidak hanya mengkaji tentang pengembangan Desa Konservasi, melainkan juga akan mengkaji dampak dari program/proyek lainnya dalam rangka percepatan pengembangan wilayah di Kabupaten Majalengka, seperti dampak pembangunan PSN (Cisumdawu, Kertajati) dan proyeksi dampak pembangunan yang akan dilaksanakan (Aerocity, Polman, dan lain sebagainya).

Dalam Join Course Program Social Design 2.0 di Kabupaten Majalengka, Wakil Dekan 1 Bidang Kemahasiswaan FISIP Unpad, Ida Widianingsih menyebut,



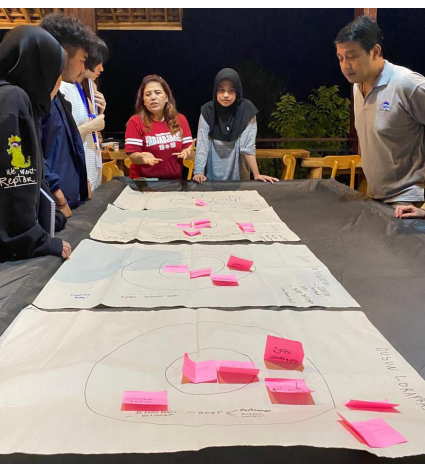
ada 15 orang mahasiswa dari Program Administrasi Publik Unpad dan 5 orang mahasiswa Ilmu Sosial Waseda University Jepang yang terlibat. Mereka kemudian dibagi ke dalam 5 kelompok topik riset, yaitu *organizational capacity*, *governance*, *rural economic development*, *policy*, dan *society*. Dalam setiap kelompok, mahasiswa didampingi oleh dosen dari Unpad, Waseda, dan juga Kemenko Marves sebagai fasilitator.

Asdep Djoko berharap penelitian-penelitian yang telah dilakukan di Kabupaten Kuningan maupun Majalengka akan memberi dampak positif. Hasil dari kajian tersebut



Suasana diskusi dalam kegiatan Studi Sosial Pengembangan Desa Konservasi di Desa Bantaragung, Kecamatan Sindangwangi pada Sabtu, 5 Agustus 2023.

Sumber: Asdep IPW Kemenko Marves



Suasana diskusi dalam kegiatan Studi Sosial Pengembangan Desa Konservasi di Desa Bantaragung, Kecamatan Sindangwangi pada Sabtu, 5 Agustus 2023.

Sumber: Asdep IPW Kemenko Marves

nantinya dapat diselaraskan dengan program eksisting dari pemerintah pusat maupun daerah, seperti program Desa Digital, Rumah Produksi Bersama, Pembangunan Akses Telekomunikasi, hingga Korporasi Petani. “Kemenko Marves siap menjadi penghubung dan memfasilitasi, apa-apa yang menjadi kendala pengembangan Desa Konservasi ini dapat dikomunikasikan dengan baik sehingga bisa ditemukan penyelesaiannya,” tegas Asdep Djoko.

Join Course Program Social Design 2.0 juga dihadiri oleh Executive Director Daiwa Institute of Research, Eiichiro Ashida; Assistant Manager The Aichi Bank Ltd, Arata Tsuzuki; dan President and Representative Director D+Daiwatech, Tadashi Oka. Daiwa Tech merupakan industri dari Jepang yang sudah berpengalaman membangun rumah ramah lingkungan dan

tahan gempa. Daiwatech saat ini tengah melakukan riset untuk pengembangan “rumah hijau” di Indonesia.

Kepala Desa Bantaragung, Samhari menyambut positif berlangsungnya kegiatan studi sosial di wilayahnya. Menurutnya, Desa Bantaragung memiliki banyak potensi alam maupun ekonomi yang bisa digali dan dimaksimalkan. Pengembangan Bantaragung sebagai Desa Konservasi itu sejatinya telah dimulai sejak 2008 atau sejak peralihan status pengelolaan kawasan hutan di sekitar Gunung Ciremai dari Perhutani ke TNGC. Hingga saat ini, kawasan konservasi di Desa Bantaragung dengan daya tarik wisata yang tidak kalah memukai dari Ubud di Bali ini masih dilakukan secara swadaya oleh masyarakat.

## **Meninjau Lokasi Pembangunan Rumah Hijau**

Bersamaan dengan pelaksanaan Social Design 2.0 itu, Asdep IPW Kemenko Marves, Djoko Hartoyo juga mendampingi kunjungan Daiwatech Jepang di Desa Bantaragung, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka. Kemenko Marves mendampingi Daiwatech yang saat ini sedang melakukan riset di sejumlah daerah di Indonesia untuk ditetapkan sebagai pilot project pembangunan rumah hijau (*green housing*) dan rumah tahan gempa. Adapun delegasi Jepang yang berkunjung terdiri dari Executive Director Daiwa Institute of Research, Eiichiro Ashida; Assistant Manager The Aichi Bank Ltd, Arata Tsuzuki; dan President and Representative Director D+Daiwatech, Tadashi Oka.

Tim Kemenko Marves dan Bappedalitbang Kab Majalangka mendampingi delegasi Daiwatech Japan survei lapangan calon lokasi pembangunan rumah hijau tahan gempa di Kabupaten Majalangka. 5 Agustus 2023.



Sumber: Asdep IPW Kemenko Marves

Pada kesempatan tersebut, Asdep IPW didampingi Pengelola Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) KLHK, Dadan, dan Perwakilan Pengurus Desa Bantaragung, Jejen mengajak delegasi Jepang mengunjungi *site plan* lokasi yang dianggap potensial untuk pengembangan green housing. Asdep Djoko juga menyatakan dukungannya terhadap rencana pilot project pengembangan rumah hijau dan rumah tahan gempa yang menggunakan teknologi Daiwatech di Kabupaten Majalangka. Menurutnya, kolaborasi antara Daiwatech dengan Pemkab Majalangka sangat cocok dengan upaya kemandirian energi, kebutuhan wisata, dan kelestarian alam. Terlebih teknologi Daiwatech merupakan teknologi ramah lingkungan, menggunakan energi baru terbarukan, dan bisa dibangun di lokasi rawan gempa.

Asdep Djoko kemudian mengapresiasi kedatangan delegasi Daiwatech Jepang ke Indonesia. Menurutnya hubungan antara Indonesia dan Jepang terkait riset dan pengembangan wilayah sudah terjalin lama dan berjalan

harmonis. Sebagai contoh, sekarang ini sedang dibangun Tol Cipali-Patimban di KM89, dimana dukungan studi kelayakannya juga didapat dari JICA (Jepang), serta loan untuk pembangunannya juga didapat dari Jepang. Selain itu ada pula rencana pembangunan KA dari Subang sampai Pringkasap, dimana peninjauan kerjasama dengan Jepang juga sudah dimulai.

Adapun lokasi pertama yang dikunjungi adalah proyek pembangunan pengelolaan sampah di Desa Bantaragung. Menurut Asdep IPW, pembangunan tempat pemilahan sampah adalah solusi menekan limbah di lokasi wisata. Saat ini Desa Bantaragung sudah ditetapkan sebagai Desa Wisata sekaligus Desa Konservasi. Adanya tempat pemilahan sampah antara organik dan organik bisa berdampak masif untuk pengembangan pariwisata dalam jangka panjang.

Perwakilan Desa Bantaragung, Jejen menyebut bahwa nantinya sampah-sampah akan dipilah, dipisahkan antara organik dan non-organik. Sampah organik diolah menjadi pupuk kompos, sedangkan sampah non-organik untuk menjadi bahan baku kerajinan tangan pelaku UMKM. Pupuk kompos yang dihasilkan diharapkan bisa menggantikan penggunaan pupuk organik yang saat ini masih dipasok dari luar. Pengelola Desa juga tengah mendorong agar hasil tanam masyarakat bisa menggantikan produk pasar yang kurang ramah lingkungan.

Setelah itu, delegasi Jepang diajak mengunjungi Buper Awi Lega di Desa Bantaragung. Saat ini lokasi yang kerap dijadikan tempat perkemahan bagi masyarakat sekitar sekitar Majalengka ini masih kekurangan pasokan energi dan air

bersih. Akses menuju Buper masih belum bisa dilalui dua mobil. Jalanan masih belum sepenuhnya diaspal lantaran Buper masih dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Pada lokasi kedua ini, Asdep Djoko memberikan catatan dan masukan agar lokasi ini bisa menjadi pertimbangan Daiwatech, khususnya terkait dengan teknologi panel surya untuk mengatasi masalah energi.

President and Representative Director D+Daiwatech, Tadashi Oka menyebut pihaknya sangat tertarik dengan potensi pengembangan teknologi dan bisnis milik Dewatech di Indonesia. Ia menyebut Daiwatech berfokus pada pengembangan energi dari solar panel dan angin secara *off green*. Daiwatech bersifat independen dan menyasar lokasi-lokasi *remote* maupun *blank spot* yang tidak tersambung dengan sumber energi. Daiwatech memiliki *solar sell modular* yang bisa digunakan di lokasi tanpa energi sekalipun.

“Inovasi Daiwatech bahkan sudah teruji di Jepang, dimana masyarakat tanpa sumber energi bisa mendapat energi dari solar panel, kendati di daerah mereka terjadi hujan selama tiga hari berturut-turut. Hal ini memungkinkan karena kemampuan inovasi Daiwatech dalam menyimpan energi di dalam baterai,” paparnya.

Executive Director Daiwa Institute of Research, Eiichiro Ashida menambahkan jika Daiwatech sudah memulai riset terkait *green housing* dan rumah tahan gempa sejak lama. Riset mereka didorong dari perhatian terhadap Jepang yang merupakan negara rawan gempa. Daiwatech disebutkan sudah sangat berpengalaman dalam memanfaatkan sumber daya alam natural untuk membangkitkan energi. Konsen

dari daiwatech sendiri adalah memulihkan diri dari bencana alam, sehingga inovasi *green housing* mereka bisa digunakan pasca bencana, atau bahkan untuk tindakan pencegahan di daerah-daerah rawan bencana.

“Daiwatech memiliki program untuk masyarakat ekonomi kelas bawah. Dimana di sejumlah lokasi di Jepang, kami memanfaatkan sumber daya alam lokal di daerah setempat agar skala ekonomi menjadi lebih murah. Program ini sudah dimulai sejak 12 tahun lalu, saat Jepang mengalami gempa bumi dan tsunami dahsyat yang meluluhlantakkan sejumlah daerah. Saat ini kami sedang menjajaki kemungkinan membangun pilot project 10 unit *green housing* di Indonesia,” papar Eiichiro.

Setelah dari Buper Awi Lega, Asdep IPW dan delegasi Jepang kemudian berjalan kaki melewati jalan pintas menuju Curug Cipeteuy. Curug ini merupakan salah satu lokasi wisata andalan di Desa Bantaragung. Akses jalan pintas menuju curug ini terbilang curam dan terjal. Belum ada jalan setapak untuk memudahkan pejalan kaki. Akses jalannya naik turun dan agak sedikit licin karena berlumut. Di beberapa titik terdapat pepohonan tumbang.

Pengelola Desa menyebut akses pintasan dari Buper Awi Lega ke Curug Cipeteuy memang belum terbangun dengan baik, karena bukan akses utama. Namun ke depannya ia berharap bisa dibangun akses untuk memudahkan wisatawan dari Buper Awi Lega yang ingin berkunjung ke Curug Cipeteuy dan begitu juga sebaliknya. “Kami berharap jika jalan ini bisa dibangun, orang-orang yang berkunjung ke sini bisa lebih lama,” papar Jejen.





Tim Kemenko Marves dan Bappedalitbang Kab Majalengka mendampingi delegasi Daiwatech Japan survei lapangan calon lokasi pembangunan rumah hijau tahan gempa di Kabupaten Majalengka. 5 Agustus 2023.

Saat ini masih banyak sektor di Jawa Barat mengandalkan energi fosil sebagai sumber energinya. Sektor pariwisata misalnya. Asdep Djoko lantas mendorong Daiwatech untuk melakukan riset di Majalengka untuk mengetahui sejauh mana potensi pengembangan energi bersih dan *green housing*. “Kemenko Marves akan terus mendukung dan memfasilitasi sejumlah riset di Kabupaten Majalengka. Salah satu riset yang difasilitasi adalah riset-riset yang mendukung pengembangan wilayah sebagaimana amanat implementasi Perpres Nomor 87 Tahun 2021,” pungkasnya.

## Kawasan Industri Subang Smartpolitan

*Asdep IPW Kemenko Marves, Djoko Hartoyo, memimpin FGD pada Senin, 13 Februari 2023. FGD tersebut menindaklanjuti rencana dan aktivitas Pembangunan Kawasan Industri Subang Smartpolitan yang menjadi salah satu PSN dalam Perpres 87 Tahun 2021.*

**A**sisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah (Asdep IPW) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Djoko Hartoyo, memimpin Focus Group Discussion (FGD) di Kantor Proyek Suryacipta Smartpolitan di Kecamatan Cipendeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat, pada Senin, 13 Februari 2023. FGD tersebut menindaklanjuti rencana dan aktivitas Pembangunan Kawasan Industri Subang Smartpolitan yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2021.

“Kegiatan ini menjadi tindak lanjut dari apa yang sudah kita mulai sejak 2021 dalam rangka membangun KI (Kawasan Industri) Subang Smartpolitan, sekaligus merupakan bentuk dukungan Kemenko Marves dalam memonitor progres dan kendala yang dihadapi. Sampai saat ini Kemenko Marves masih optimistis dan berkomitmen mengawal program ini. Sehingga apa-apa yang menjadi hambatan bisa didiskusikan supaya bisa terjadi percepatan dan tidak timbul masalah di masa depan,” ujar Asdep Djoko saat membuka FGD.

Pembahasan KI Subang Smartpolitan sudah dilakukan sejak 2021. Ketika itu Kemenko Marves menggelar Rakornas dan Kunjungan Pembangunan Rel KA Subang-Patimban pada 10 Desember 2021. Setelahnya ada lanjutan Rapat tentang Perpres 87 Tahun 2021 di Bandung pada 20 Mei



Maket pengembangan daerah industri Subang Smartpolitan di The Manor Office PT Suryacipta Swadaya, Karawang, Jawa Barat, Rabu (8/3/2023).

Sumber: KOMPAS/Jumarto Yulianus

2022 dan 7 Juni 2022. Pembangunan KI Subang Smartpolitan sudah berada pada status operasional dengan target industri otomotif, makanan, minuman, elektronik, dan sebagainya. Sebagian dari lahan akan diajukan sebagai KEK (Kawasan Ekonomi Khusus). Pembangunan KI merupakan inti dari Pengembangan Kawasan Cirebon-Patimban-Kertajati untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.

Kegiatan yang digelar secara daring maupun luring ini menghadirkan dua narasumber lainnya, yaitu Direktur Government Relation PT Suryacipta Swadaya, Grace Octalian dan Sub Direktorat Perencanaan Teknis Jalan Bebas Hambatan, Dirjen Bina Marga-Kementerian PUPR, Dedy Gunawan.

---

Asdep IPW Kemenko Marves, Djoko Hartoyo (kedua dari kanan) didampingi Direktur Government Relation PT Suryacipta Swadaya, Grace Octalian (rompi hijau) mengunjungi lokasi Pengembangan KI Subang Smartpolitan (13/02/2023).

Sumber: Asdep IPW Kemenko Marves





Asdep IPW Kemenko Marves Djoko Hartoyo (kedua dari kanan) didampingi Direktur Government Relation PT Suryacipta Swadaya, Grace Octalian (rompi hijau) melihat langsung progres Pengembangan KI Subang Smartpolitan, (13/02/2023).

Sumber: Asdep IPW Kemenko Marves

Grace Octalian menyebut Subang Smartpolitan didesain untuk menjadi kawasan pintar dan berkelanjutan (smart and sustainable) dengan empat pilar, yaitu konektivitas, komunitas, bisnis, dan edukasi inovasi. “Kami ingin agar orang-orang bisa tinggal, bermain/berekreasi, serta bekerja di tempat yang sama, yaitu di Subang Smartpolitan. Kami juga bermimpi untuk bisa terhubung dan menjadi penghubung serta menjadi pusat pendidikan dan inovasi,” paparnya.



Dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2021, sejumlah proyek tercatat bersinggungan dengan KI Subang Smartpolitan, seperti Pembangunan Akses Tol Cipali (Subang KM 89 Patimban), Pembangunan Rel KA Subang – Patimban, Pembangunan Rumah Susun Pekerja Subang Smartpolitan, Pembangunan Pusat Pendidikan Vokasi/ Pelatihan Vokasi, Pembangunan Rumah Sakit Cipeundeuy Tipe A, dan Pengembangan Kawasan Industri Subang Smartpolitan. Tahun ini, Kementerian PUPR mengalokasikan Rp 206,3 miliar untuk mendukung realisasi kegiatan prioritas 2023 di Kawasan Rebana dan Jabarsel.

SubDirektoratPerencanaanTeknisJalanBebasHambatan, Dirjen Bina Marga-Kementerian PUPR, Dedy Gunawan menyebut, saat ini pembangunan jalan tol masih sesuai rencana. Pihaknya tengah berupaya memastikan masyarakat yang terdampak pembangunan jalan tol mendapat pengganti yang sepadan. “Semua masih sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati. Semoga tidak ada kendala. Jadi yang akan diselesaikan adalah jalan tol dulu, baru kemudian rel kereta api menyusul,” papar Dedy Gunawan.

---

Perjalanan menuju lokasi Pengembangan Subang Smartpolitan (Senin, 13/02/2023). Tampak proses pembangunan sudah memasuki tahap pemerataan (cut and earth moving) serta pemadatan lahan (fill and compact).

Sumber: Asdep IPW Kemenko Marves



Menurut Asdep Djoko diperlukan kajian komprehensif tentang dampak pembangunan exit tol, khususnya dampak secara ekonomi maupun sosial bagi masyarakat sekitar. “Poin pentingnya adalah mengapa kita perlu exit tol ini? bahwa pembukaan akses tol akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Tidak hanya peluang tapi juga realisasinya. Kemajuan memang membutuhkan waktu, tidak hanya 1-2 tahun, tapi bisa sampai puluhan tahun seperti pengalaman Suryacipta di Karawang,” paparnya.

Selepas FGD, Kemenko Marves dan para peserta FGD kemudian diajak berkeliling melihat lokasi Pembangunan Subang Smartpolitan. Di sepanjang perjalanan menuju lokasi, tampak proses pembangunan telah memasuki tahap

---

Foto udara Pengembangan Subang Smartpolitan (Selasa, 29/03/2023). Tampak proses pembangunan sudah memasuki tahap pemerataan (cut and earth moving) serta pemadatan lahan (fill and compact).

Sumber: KOMPAS/Kristianto Purnomo







Proses pemerataan (cut and earth moving) dan pemadatan lahan (fill and compact) Kawasan Industri Subang Smartpolitan (Selasa, 29/03/2023).

Sumber: KOMPAS/Kristianto Purnomo

pemerataan tanah (cut and earth moving) dan sebagian di tahap pemadatan lahan (fill and compact).

Fase pertama KI Subang Smartpolitan direncanakan beroperasi pada triwulan III-2024. Kawasan industri baru di Jawa Barat ini akan menarik banyak investor. Menurut Managing Director PT Suryacipta Swadaya, Hudaya Arryanto Sumadhija, pihaknya mengembangkan kawasan industri baru yang terintegrasi dengan nama Subang Smartpolitan di lahan seluas 2.717 hektar (ha) di Subang. Kawasan ini terintegrasi dengan Pelabuhan Patimban dan akses tol Patimban sepanjang 37,05 kilometer.

KI Subang Smartpolitan dibangun secara bertahap sejak 2020 dengan nilai investasi untuk fase pertama sekitar Rp

5 triliun. Di tahun 2023, PT Suryacipta Swadaya anggarakan Rp 1 triliun untuk pembebasan lahan maupun penyiapan lahan. Fase I seluas 400 ha ditargetkan siap di tahun 2024. Sedangkan operasinya ditargetkan pada triwulan III-2024. Dari total luas KI Subang Smartpolitan itu, progres pembebasan lahan hingga Maret 2023 hampir 1.500 ha. Kemudian dari 400 ha yang disiapkan untuk fase I, sekitar 100 ha di antaranya sudah siap jual.

Mengusung konsep *smart and sustainable* KI Subang Smartpolitan akan terkoneksi ke infrastruktur nasional Tol Cikopo-Palimanan atau Tol Trans Jawa, Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, Tol Patimban yang akan selesai pada 2024, dan Pelabuhan Patimban. Di dalam KI Subang Smartpolitan terdapat kawasan industri, kawasan komersial, kawasan perumahan, fasilitas publik, dan sebagainya. Kawasan perumahan dikembangkan di bagian



Salah satu pabrik mobil PT Astra Daihatsu Motor, Karawang Assembly Plant, di Karawang, Jawa Barat.

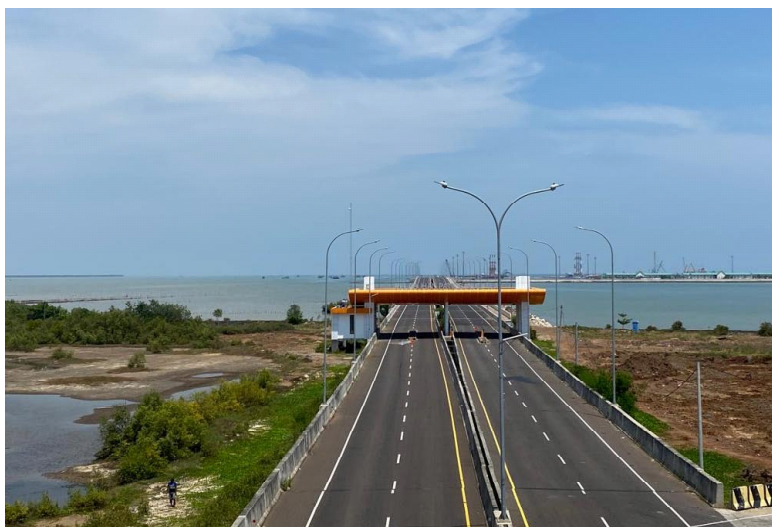
Sumber: Arsip Astra Daihatsu Motor

selatan dan disiapkan untuk kalangan pekerja menengah ke bawah. Seluas 40 ha dari 80 ha kawasan perumahan akan dikembangkan pada fase pertama.

Menurut Managing Director PT Suryacipta Swadaya, Hudaya Arryanto Sumadhija, KI Subang Smartpolitan ke depannya akan menjadi pelengkap atau pendukung kawasan industri Karawang yang telah dibangun sebelumnya. Kawasan bernama Suryacipta City of Industry di Karawang seluas 1.400 ha telah dibangun sejak 1990. Kawasan industri di Karawang itu kini telah ditempati oleh hampir 150 industri manufaktur dan tersisa sekitar 70 ha. Berbeda dengan kawasan di Karawang yang sudah matang, kawasan di Subang ini benar-benar baru, sebagai pengembangan lebih lanjut dari apa yang sudah ada di Karawang.

Saat ini industri manufaktur, terutama industri otomotif telah membangun konsep ekosistem. Setelah ada manufaktur besar dengan areal sekitar 100 ha, biasanya akan diikuti dengan perusahaan-perusahaan yang lebih kecil untuk memproduksi jok mobil atau kampas rem. Dengan demikian, akan ada potensi migrasi secara ekosistem. Menurut Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara, industri otomotif senantiasa melihat ekosistem dalam membangun usahanya. Semakin dekat penyuplainya dengan penggunaanya maka akan semakin bagus. Fasilitas di sebuah kawasan industri juga mesti lengkap.

Dengan posisi kawasan industri di Subang yang lebih ke timur, maka KI Subang Smartpolitan menjadi daya tarik tersendiri dengan berbagai konsep yang dikembangkan.



Akses jalan menuju Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat, (21/12/2023). Pelabuhan yang mulai beroperasi pada 2021 ini telah melayani bongkar muat kapal domestik dan internasional, khususnya untuk pengiriman kendaraan atau mobil.

Sumber: Dok Asdep IPW Kemenko Marves RI

Sehingga nantinya para pelaku industri akan memilih mana yang bagus dan sesuai dengan kebutuhannya. Di sisi lain, pelaku industri otomotif juga tentunya akan melihat dulu dan melakukan kajian jika ingin membangun pabrik di Subang. Sebab, investasi industri otomotif adalah investasi besar dan jangka panjang. Namun demikian, sdanya jalan tol dan pelabuhan memang sangat dibutuhkan untuk pengiriman produk manufaktur antarpulau maupun untuk kebutuhan ekspor.

## Mengembangkan Desa Digital

*Pemerintah terus berupaya mengembangkan Desa Digital, termasuk di kawasan Rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan (Jabarsel). Desa Digital dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan arus informasi yang terjadi di unit terkecil pemerintahan.*

**K**ementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Pemprov Jawa Barat menggelar Bimbingan Teknis (bimtek) peningkatan kapasitas bagi para pelaku UMKM dan operator desa. Kegiatan ini menindaklanjuti rencana aksi pelaksanaan Proyek Prioritas 1 (P1) dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.



Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Djoko Hartoyo membuka Bimtek “Desa Digital Kolaboratif dan Inovatif,” pada 19 Juli 2022.

Sumber: Asdep IPW Kemenko Marves

Bimtek yang mengusung tema “Desa Digital Kolaboratif dan Inovatif,” ini diadakan secara hybrid sejak Selasa, 19 Juli 2022 hingga Jumat 22 Juli 2022. Menurut Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah Kemenko Marves, Djoko Hartoyo, desa digital merupakan salah satu program transformasi digital yang diinisiasi oleh pemerintah sejak diterbitkannya Perpres 87 di awal tahun 2021.

Program ini diimplementasikan untuk mengurangi kesenjangan arus informasi yang terjadi di unit terkecil pemerintahan. Berdasarkan data International Business Machines (IBM) tahun 2021, dari total 5.312 desa di Jawa Barat, masih ada 624 desa tidak ada internet, dan 470 desa

blank spot. Mengacu pada data tahun 2021, sejumlah 49 kawasan desa digital yang telah tersedia infrastruktur internet belum memperoleh literasi digital. Sehingga acara ini bertujuan menjembatani hal tersebut dan mendorong kolaborasi serta inovasi.

Desa digital diterapkan dengan memanfaatkan jaringan internet serta teknologi informasi yang terintegrasi dalam pelayanan publik dan kegiatan perekonomian. Teknologi internet of things (IoT) menjadi potensi solusi untuk peningkatan produktivitas, pendapatan ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat pedesaan yang belum mengenal pentingnya manfaat inovasi digital secara optimal. Dengan akses internet yang merata, pemerintah berambisi menjadikan Indonesia sebagai negara digital.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kolaborasi nasional antara pemerintah, swasta, dan stakeholders terkait untuk menghubungkan yang tidak terhubung.



Bimbingan Teknis Desa Digital untuk 49 Desa dari 9 Kabupaten di Jawa Barat (2022). Merupakan program kolaborasi Kemenko Marves, BAKTI, Kemenkominfo dan Pemprov Jabar.

Sumber: Asdep IPW Kemenko Marves





Kegiatan Peningkatan Kapasitas Desa Digital yang Kolaboratif dan Inovatif, 19-22 Juli 2022. Peserta merupakan Champion Desa dan Operator Desa. Operator Desa Digital terkait pelayanan desa melalui sistem digital seperti posyandu, KTP, surat pindah dan lainnya.

Sumber: Asdep IPW Kemenko Marves

Dari sisi pemerintah, Kemenko Marves telah berkolaborasi dengan Kominfo; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan Pemprov Jabar untuk menjalankan program tersebut. Sebagai salah satu pihak yang mengoordinasikan implementasi Perpres 87/2021, Asdep Djoko tentunya mendukung peningkatan perekonomian desa digital.

Mengutip Perpres 87/2022, pengembangan desa digital dilakukan di kawasan Rebana (Kabupaten Subang, Sumedang, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Cirebon, serta Kota Cirebon) ditambah pembangunan desa digital di 120 desa di Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Pangandaran.

Menurut Kepala Biro Perencanaan Kominfo, Arifin S Lubis, sangat penting untuk memanfaatkan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan maksimal. Semua harus diterapkan sesuai kebutuhan dan semua harus memegang visi membangun bersama. Dengan memiliki konsep dan tekad yang kuat, maka proyek akan berkelanjutan dan terarah.

Desa digital berperan dalam meningkatkan akses informasi dan pengetahuan, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di desa, menarik investasi ke desa, meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa, serta mengatasi kesenjangan pusat dan daerah. Sejauh ini, terdapat 4.223 BUMDes di Jawa Barat yang sudah tergabung dan memperoleh pendampingan dari e-commerce.



Kegiatan Peningkatan Kapasitas Desa Digital yang Kolaboratif dan Inovatif, 19-22 Juli 2022. Peserta merupakan Champion Desa dan Operator Desa. Peserta dari Champion Desa meliputi peningkatan wirausaha desa dengan kunjungan ke Shopee dan Traveloka.

Sumber: Asdep IPW Kemenko Marves

“Saya yakin jumlah itu dapat terus tumbuh dan berkembang melalui penyelenggaraan bimbingan teknis. Kami berupaya agar terlaksana pembangunan inklusif dan tidak ada yang tertinggal, sebagaimana komitmen Sustainable Development Goals di tahun 2030,” pungkas Sekretaris Daerah Pemprov Jabar Setiawan Wangsaatmaja.

Menurut Asdep Djoko, saat ini sudah ada kisah desa digital yang sukses di Desa Puntang, Kabupaten Indramayu. Di sana, ikan-ikan diberi makan dengan memanfaatkan pengaturan waktu melalui teknologi digital. Ia pun berharap dari kemampuan dan kapasitas para peserta dalam mengolah data dapat mengembangkan kota, mengingat digitalisasi menjadi tulang punggung peningkatan ekonomi.

Dalam kesempatan tersebut, sekitar 90 orang champion desa (pelaku UMKM) dan operator desa mengikuti bimbingan teknis bersama para ahli di bidangnya. Champion dilibatkan dalam pelatihan peningkatan ekonomi digital, sedangkan operator ikut serta dalam seminar pengembangan desa digital melalui aplikasi layanan desa bernama Sistem Informasi Desa dan Kawasan New Generation (Sideka-NG).

Selain mengadakan bimtek, Asdep IPW Kemenko Marves juga menyempatkan untuk menjalin kolaborasi dan sinergi antara pemerintah dengan daerah. Rapat tersebut dilakukan dengan para perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah agar Kemenko Marves dapat mengetahui secara langsung tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pelaksana di daerah.



Asdep IPW Kemenko Marves, Djoko Hartoyo melaksanakan monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas Desa Digital di Kabupaten Sukabumi, (27/12/2022).

Sumber: Asdep IPW Kemenko Marves

Pada 28 Desember 2022, Asdep IPW Kemenko Marves, Djoko Hartoyo melakukan monitoring dan evaluasi (monev) dalam rangka peningkatan kapasitas Desa Digital ke Desa Mekarjaya. Bertempat di Kantor Desa Mekarjaya, dilakukan diskusi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Asdep IPW, kegiatan monev ini dilaksanakan untuk meningkatkan semangat dan follow up kegiatan pasca Bimbingan Teknis (Bimtek) Desa Digital yang digelar pada Juli 2022.

Pada kesempatan monev tersebut, Asisten Daerah Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi Akhmad Riyadi menceritakan bahwa meskipun Desa Mekarjaya terisolasi secara lokasi, tapi sudah punya akses untuk teknologi informasi. Bupati Sukabumi berjanji bahwa selama tahun 2021-2026 akan menangani 119 desa blind spot. Namun, saat ini baru 23 digital yang tertangani. “Khusus di Desa Mekarjaya, kami sudah memanfaatkan internet untuk keperluan administrasi desa dan pelayanan publik,” tuturnya.

Asda Riyadi mengaku butuh bantuan Pemerintah Pusat untuk menyediakan akses internet bagi 46 desa wisata dan desa digital yang menjadi prioritas. Diinformasikan oleh perwakilan Badan Aksesibilitas Teknologi dan Informasi (BAKTI) Kominfo Reza bahwa di Sukabumi, akses internet baru tersedia di 11 titik kantor pemerintahan, 4 titik pelayanan kesehatan, dan 10 titik pendidikan.

Pada kuartal pertama 2023, aparat desa dan pelaku ekonomi akan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan dan sertifikasi, serta memberikan bantuan desa lainnya. Kepala Subbagian dari Bappeda Provinsi Jawa Barat Anne Caroline mengelaborasi bahwa Desa Mekarjaya memiliki potensi besar di bidang peternakan. “Nantinya kita dapat adakan pelatihan untuk pemotongan daging, termasuk edukasi bagian daging untuk diolah menjadi steak agar bisa meningkatkan nilai jual produk,” tuturnya.

“Kami berharap di masa mendatang Desa Mekarjaya dapat tumbuh sejajar seperti desa-desa maju lainnya,” tutur Kepala Desa Utom Bustomi. Terlebih, sekarang administrasi desa sudah banyak mengadopsi sistem digital.

Dalam kesempatan tersebut, selain membahas akses sinyal dan fasilitas penunjang di Desa Mekarjaya, Sukabumi, Asdep Djoko juga menyinggung tentang perbaikan akses jalan dan perbaikan akses jalan jembatan. “Soal infrastruktur jalan dan jembatan, agar dapat dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah supaya terawat, tidak membahayakan, dan nyaman untuk warga yang lewat,” pungkasnya.

# Bagian 4

Monitoring dan  
Evaluasi





## Terus Mengawasi dan Mengevaluasi

*Kemenko Marves menggelar Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) progres proyek yang tercantum dalam Perpres 87/2021. Secara khusus, Monev difokuskan untuk kegiatan dan program di lingkup infrastruktur perhubungan dan pekerjaan umum.*

Rapat dilaksanakan di Aula Ballroom 1 Grand Mercure Hotel Bandung, Jawa Barat pada Jumat, 8 Desember 2023 dengan tujuan untuk melakukan pengawasan (monitoring) dan evaluasi terhadap program/proyek yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pengembangan Kawasan Rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan (Jabarsel). Kegiatan ini difokuskan untuk aktivitas monitoring dan evaluasi (monev) pada proyek-proyek di bidang akses perhubungan kereta api dan pelabuhan, serta di bidang pekerjaan umum (PU).

“Rakor hari ini membahas beberapa hal dan isu, diantaranya terkait progres proyek/program yang tercantum dalam Perpres 87 tahun 2021 yang dilaksanakan pada tahun 2023; informasi dukungan penganggaran program/proyek yang diestimasi selesai pada tahun 2024; dan daftar-daftar proyek yang sudah termuat dalam rencana anggaran K/L tahun 2024, namun belum termuat dalam list proyek pada lampiran surat yang diestimasi selesai tahun 2023 dan 2024,” ujar Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah (Asdep IPW), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Djoko Hartoyo, saat membuka rapat, (08/12).

Turut hadir dalam rakor ini para perwakilan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), diantaranya yaitu Kasubdit wilayah II, CK PUPR, Feriqo Asya Yogananta; Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, Indah Widya Astuti; Dit Sungai dan Pantai, PUPR, Taufik; Dirjen Kepelabuhanan Kemenhub, Deby Hospital; dan Ketua Tim Program, Direktorat Pembangunan Jalan PUPR, Hesti Dwi Aristyani. Rakor juga dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari Pemprov Jawa Barat maupun Pemda (Kota/Kab) dalam lingkup wilayah Rebana dan Jabarsel.

Asdep IPW Kemenko Marves dalam rapat menyebut, terdapat 23 list proyek pada lingkup Kementerian PUPR dan 11 list proyek pada lingkup Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang diestimasi selesai tahun 2023 dan 2024. Total ada 34 proyek tersebut tertuang dalam Perpres 87/2021. Beberapa isu yang dibahas dalam rapat diantaranya terkait progres proyek/program yang tercantum dalam Perpres 87 tahun 2021 yang dilaksanakan pada tahun 2023; informasi



Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah Kemenko Marves, Djoko Hartoyo memimpin Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Progres Proyek yang Tercantum Dalam Pelaksanaan Perpes 87/2021 di Bandung, Jumat, 8 Desember 2023. Monev ini difokuskan untuk kegiatan dan program di lingkup infrastruktur perhubungan dan pekerjaan umum.

Sumber: Asdep IPW Kemenko Marves

dukungan penganggaran program/proyek yang diestimasi selesai pada tahun 2024; dan daftar-daftar proyek yang sudah termuat dalam rencana anggaran K/L tahun 2024, namun belum termuat dalam list proyek pada lampiran surat yang diestimasi selesai tahun 2023 dan 2024.

Indah Widya Astuti dari Dirjen Perkeretaapian – Kemenhub kemudian menjelaskan dua program dalam Perpres 87/2021 yang dilaksanakan tahun 2023, yaitu DED Pembangunan Kereta Api menuju Pelabuhan Patimban



Asdep IPW Kemenko Marves, Djoko Hartoyo menyebut, dalam Perpres 87/2021 terdapat 23 list proyek pada lingkup Kementerian PUPR dan 11 list proyek pada lingkup Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang diestimasi selesai tahun 2023 dan 2024.

Sumber: Asdep IPW Kemenko Marves

dan DED Jalur dan Jembatan Kereta Api Lintas Cipatat – Padalarang. Sementara dukungan penganggaran program yang diestimasi selesai pada tahun 2024 difokuskan pada dua program, yaitu Penyusunan Dokumen AMDAL Pembangunan Jalur Kereta Api Pelabuhan Patimban dan DED Pembangunan Jembatan Stasiun dan fasilitas operasi Kereta Api menuju Pelabuhan Patimban.

Sedangkan untuk daftar proyek yang sudah termuat dalam rencana anggaran K/L tahun 2024 namun belum ada pada lampiran dan di estimasi selesai tahun 2024 adalah Peningkatan Underpass BH 421 Jatibarang. Indah menerangkan bahwa salah satu tantangan dalam perkeretaapian saat ini antara lain adanya jeda terlalu lama

antara DED dan konstruksi, yang kemudian tidak jarang perlu berimbas pada perlunya dilakukan evaluasi hingga DED ulang karena ada perubahan kondisi di lapangan.

Berbagai usulan perkeretaapian pun lantas mengemuka. Perwakilan Kabupaten Pangandaran berharap ke depannya bisa semakin banyak Kereta Api Eksekutif maupun Bisnis yang berhenti di Stasiun Sidarja Cilacap, Jawa Tengah karena stasiun tersebut relatif lebih dekat untuk menuju Destinasi Wisata Pangandaran. Untuk jangka menengah, rute Kalipucang ke Pangandaran dan juga relasi Kereta



Sebanyak 34 proyek tertuang dalam Perpres 87/2021 untuk lingkup perhubungan dan pekerjaan umum. Adapun Direktif Presiden untuk TA 2023, percepatan pembangunan Kawasan Rebana dan Jabarsel diberikan alokasi anggaran Rp 206,03 miliar untuk kegiatan PUPR mendukung Perpres tersebut.

Sumber: Asdep IPW Kemenko Marves

Api tujuan Banjar diharapkan bisa diaktifkan kembali agar semakin banyak wisatawan datang berkunjung ke Pangandaran.

Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah (Asdep IPW) Kemenko Marves, Djoko Hartoyo kemudian mengusulkan agar di minggu kedua Januari 2024, semua pihak bisa bersama-sama melakukan pemetaan, dari ujung Pangandaran sampai ujung Sukabumi terkait jalur Kereta Api, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan juga update kondisi di lapangan. Kepada Pemda, Asdep IPW juga berharap aspek legal bisa secepatnya disiapkan, karena kesiapan menjadi hal yang sangat penting.

Direktorat Sungai dan Pantai, Dirjen Sumber Daya Air, Kemen-PUPR, Taufik menjelaskan sejumlah proyek yang tengah dan sudah berjalan. *Pertama*, Pengendalian Banjir Sungai DAS Cisanggarung, Citaal, Cijangkelok, Cibat, Cipanundan. Yaitu Pembangunan Tanggul Banjir dan Pelindung Tebing Sungai Cisanggarung Desa Babakan TA 2021; Pembangunan Pengaman Pantai Dadap Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu TA 2021; Pembangunan Pengaman Pantai Dadap Blok Timur Di Desa Dadap Kec. Juntinyuat (Tahap II) TA 2022; Pembangunan Breakwater Blok Dermaga Di Desa Dadap Kec. Juntinyuat TA 2022; dan Penanganan Tanggul Dan Tebing Banjir Sungai Cijangkelok TA 2023.

*Kedua*, Pengendalian Banjir Kab. Pangandaran, yaitu Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Citanduy Hilir di Kab. Pangandaran TA 2022, dimana terdapat tebing kritis pada hilir Sungai Citanduy dengan bantaran yang sempit pula yang mengancam jalan utama, rumah dan areal persawahan di sepanjang Sungai Citanduy. *Ketiga*, Pembangunan Breakwater Pantai

Timur Pangandaran. Menurut Taufik, permasalahan yang kerap terjadi pada daerah Pantai pada umumnya adalah perubahan garis pantai alami. Hal ini ditunjukkan oleh peta citra satelit pada rentang waktu tahun 2006 – 2018; Erosi pada tebing Pantai akibat gelombang yang relative besar; dan Sedimentasi di Muara Sungai.

Dari Direktorat Jalan Bebas Hambatan menjelaskan berbagai progres. *Pertama*, Akses Patimban, dengan catatan untuk lingkup pengadaan tanahnya oleh BUJT adalah keseluruhan ruas Jalan Tol Akses Patimban (STA. 0+000 – STA. 37+050) dan jalan akses non tol yaitu Jalan Pringkasap-Akses Pabuaran. Rincian porsi BUJT adalah pada main road: STA. 0+000 – STA. 14+110 (14,11 km) Interchange dan Junction: JC Cipeundeuy, IC Pabuaran, dan IC Pasir Bungur. Sementara itu untuk konstruksi pelebaran 3 ruas jalan akses non tol yaitu Jalan Pringkasap-Akses Pabuaran, Jalan Pasir Bungur-Akses Pasir Bungur, dan Jalan Ion Martasasmita-Akses Tambakdahan.

*Kedua*, Akses Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap (Getaci). Catatan untuk proyek Getaci adalah telah terjadinya pengakhiran PPJT pada Jalan Tol Getaci, sehingga akan dilakukan proses pelelangan ulang secara bertahap, dimana saat ini pelelangan akan dilakukan untuk Jalan Tol Gedebage-Ciamis terlebih dahulu. Ketiga, Akses Ciawi – Sukabumi. Terkait hal ini, disampaikan bahwa berdasarkan Kepmen PUPR Nomor 367 Tahun 2023 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional 2020-2040, maka rencana Jalan Tol Sukabumi –Ciranjang dan Ciranjang – Padalarang merupakan rencana tahun 2025-2029. Adapun untuk penyiapan studi kelayakan direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2024 oleh DJPI.





Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah Kemenko Marves saat agenda monev dalam rangka peningkatan kapasitas Desa Digital ke Desa Mekarjaya, Selasa, 27 Desember 2022.

Sumber: Asdep IPW Kemenko Marves

Dari Dirjen Bina Marga, Kemen-PUPR menjelaskan beberapa program kegiatan TA 2023. Pertama, Pembangunan Jalan Lingkar Cipari-Cisantana, Kota Kuningan yang saat ini progresnya mencapai 96,43 % (realisasi progres fisik) dan 85,04 % (realisasi progres keuangan). Kedua, Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Tasikmalaya yang saat ini progresnya mencapai 96,43 % (realisasi progres fisik) dan 85,04 % (realisasi progres keuangan). Adapun daftar yang tidak dapat ditangani pada TA 2023 adalah Pembangunan Jalan Dan Jembatan Seranganpanjang – Cipeundeuy; Pembangunan Jalan Lingkar Timur Selatan Kuningan; dan Pembangunan Jalan Lingkar Luar Kota Subang.

Terkait dengan Pembangunan Jalan Dan Jembatan Serangpanjang – Cipeundeuy, proyek ini termasuk dalam usulan penanganan Inpres Jalan Daerah namun tidak disetujui dengan usulan target penanganan sepanjang 24,40 km dan total kebutuhan alokasi sebesar Rp 298 Miliar. Nilai usulan dari Pemda > Rp 100 Miliar, dengan pertimbangan waktu pelaksanaan yang tersedia hanya 6 bulan maka dikhawatirkan pekerjaan tidak dapat selesai pada akhir tahun 2023 dan jalan tidak fungsional. DED yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah perlu disesuaikan kembali dengan standar dan spesifikasi yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga. Perlu perbaikan kesiapan dokumen readiness criteria lainnya yaitu pembebasan lahan dan dokumen lingkungan. Adapun jika dilakukan pengurangan target penanganan, konektivitas jalan yang terbangun tidak efektif.

Dari Direktorat Prasarana Strategis, Dirjen Cipta Karya, Kemen-PUPR turut menjelaskan progres pembangunan Pasar dan Perguruan Tinggi. *Pertama*, Pasar Cikajang terdapat beberapa kendala, seperti Dokumen perencanaan teknis dan RC belum lengkap (Cikajang DED 2018) dan Nilai RAB yang diterima melebihi pagu total yang ditetapkan dalam perpres. Ketika Pembahasan serupa pada tanggal 27 Juli 2023 disebutkan bahwa review DED akan dipenuhi di Desember 2023 oleh Pemda. *Kedua*, Pasar Padakembang, saat Pembahasan pada tanggal 2 Desember 2022 ditemukan bahwa Dokumen Perencanaan Teknis dan RC belum lengkap (Padakembang DED tahun 2016, dokumen review 2022 belum lengkap disampaikan) dan Nilai RAB yang diterima melebihi pagu total yang ditetapkan dalam perpres (Usulan RAB : 220M). *Ketiga*, Pembangunan Politeknik Manufaktur Kampus II di Majalengka yang saat ini dalam proses lelang

pekerjaan. Keempat, Pembangunan Institut Teknologi Bandung Kampus Cirebon. Dalam pembahasan tanggal 8 April 2022, kampus ITB Cirebon ini perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Asdep IPW, Djoko Hartoyo menegaskan bahwa Kemenko Marves akan mengakomodir semua kebutuhan dan masukan yang disampaikan oleh Pemda terkait pengembangan Kawasan Rebana dan Jabarsel. Termasuk usulan untuk pembangunan di sektor akses perhubungan maupun aktivitas ke-PU-an. Namun demikian, Asdep IPW juga berharap agar Pemda juga bisa menyiapkan dengan lengkap dokumen-dokumen perencanaan yang dibutuhkan. Sebagai contoh adalah untuk reaktivasi rel kereta. Berdasarkan data Dirjen Perkeretaapian, kendala terbesar untuk reaktivasi kereta api adalah ketersediaan lahan untuk jalur-jalur yang telah beralih fungsi. Di beberapa titik bahkan ada lokasi yang awalnya rel, telah beralih menjadi perumahan penduduk. Hal yang sama juga akan terjadi jika tidak ada koordinasi dan komitmen dari semua pihak.

Sebelumnya pada penghujung 2022, Kemenko Marves melalui Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah juga melakukan monev dalam rangka peningkatan kapasitas Desa Digital ke Desa Mekarjaya. Pada Selasa, 27 Desember 2022, bertempat di Kantor Desa Mekarjaya, dilakukan diskusi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. “Kami datang ke sini untuk menepati janji di bulan Juli lalu saat Kemenko Marves dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengadakan pelatihan Desa Digital. Lebih lanjut, Asdep Djoko menyatakan bahwa monev ini diadakan guna meningkatkan semangat dan

follow up kegiatan pasca bimbingan teknis tersebut.

Menanggapi hal itu, Asisten Daerah Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi Akhmad Riyadi menceritakan bahwa meskipun Desa Mekarjaya terisolasi secara lokasi, tapi sudah punya akses untuk teknologi informasi. “Bupati Sukabumi berjanji bahwa selama tahun 2021-2026 akan menangani 119 desa blind spot. Namun, saat ini baru 23 digital yang tertangani. Khusus di Desa Mekarjaya, kami sudah memanfaatkan internet untuk keperluan administrasi desa dan pelayanan publik,” tuturnya.

Asda Riyadi mengaku butuh bantuan Pemerintah Pusat untuk menyediakan akses internet bagi 46 desa wisata dan desa digital yang menjadi prioritas. Diinformasikan oleh perwakilan Badan Aksesibilitas Teknologi dan Informasi (BAKTI) Kominfo Reza bahwa di Sukabumi, akses internet baru tersedia di 11 titik kantor pemerintahan, 4 titik pelayanan kesehatan, dan 10 titik pendidikan. Nantinya, para aparatur desa dan pelaku ekonomi akan menyelenggarakan berbagai pelatihan dan sertifikasi, serta memberikan bantuan desa lainnya. Kepala Subbagian dari Bappeda Provinsi Jawa Barat Anne Caroline mengelaborasi bahwa Desa Mekarjaya memiliki potensi besar di bidang peternakan.

“Nantinya kita dapat adakan pelatihan untuk pemotongan daging, termasuk edukasi bagian daging untuk diolah menjadi steak agar bisa meningkatkan nilai jual produk,” tutur Anne. Sedangkan Kepala Desa Utom Bustomi berharap di masa mendatang Desa Mekarjaya dapat tumbuh sejajar seperti desa-desa maju lainnya. “Terlebih, sekarang administrasi desa sudah banyak mengadopsi sistem digital,” jelas Utom.

Dalam kesempatan tersebut, selain membahas akses sinyal dan fasilitas penunjang di Desa Mekarjaya, Sukabumi, Asdep Djoko juga menyinggung tentang perbaikan akses jalan dan perbaikan akses jalan jembatan. “Soal infrastruktur jalan dan jembatan, agar dapat dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah supaya terawat, tidak membahayakan, dan nyaman untuk warga yang lewat,” pungkasnya.

## Catatan Dari Cilacap Hingga Pangandaran

*Jelang pergantian tahun, Kemenko Marves melakukan tinjauan lapangan. Mulai dari Cilacap yang berbatasan langsung dengan Jawa Barat. Hingga ke Pangandaran di sisi paling ujung Jawa Barat Bagian Selatan. Semua dilakukan agar pengembangan kawasan ini bisa terkoneksi dan rampung sebagaimana rencana awal.*

**M**edio Kamis, 14 Desember 2023, Tim Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Asdep IPW Kemenko Marves) melakukan kunjungan ke beberapa lokasi yang menjadi titik proyek pengembangan wilayah dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Jawa Tengah. Kunjungan dinas ini juga menjadi upaya mengoneksikan antara pembangunan Kabupaten Cilacap

di Jawa Tengah dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran yang terletak di ujung Jawa Barat Bagian Selatan (Jabarsel) yang tertuang dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2021.

Titik pertama yang dikunjungi adalah Kantor Sekda Kabupaten Cilacap. Tim disambut oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab Cilacap, Muhammad Wijaya. Dalam diskusi, Wijaya menyebut ada tiga proyek yang urgen dan mendesak, yaitu Pembangunan Bendung Matenggeng; Pembangunan Fly Over Kroya; dan Pengembangan Kawasan Agribisnis Bantarsari. Bendungan Matenggeng didesain memiliki kapasitas 553 m<sup>3</sup> untuk mengairi lahan seluas 27.934 hektare (ha), mengurangi debit banjir sebesar 187 m<sup>3</sup> per detik, menyediakan pasokan air baku 1,11 m<sup>3</sup> per detik, dan menghasilkan listrik sebesar 27 MW.

Sementara Fly Over Kroya, sudah masuk Perpres 79/2019. Proyek ini kian mendesak karena perlintasan sebidang Kereta Api di Kubangkangkung (JN - Ruas Sidareja SP3 Jeruklegi) dan Kroya (JP – Ruas Buntu Kroya Slarang) sangat rawan terjadi kecelakaan. Di sisi lain, juga kerap terjadi kemacetan lalu lintas di perlintasan sebidang Kereta Api lokasi Kubangkangkung dan Kroya. Adapun untuk pengembangan Kawasan Agrowisata Bantarsari sangatlah potensial karena lahan telah dimiliki sepenuhnya oleh Pemda. Lahan-lahan tersebut cocok digunakan untuk beberapa jenis tanaman, khususnya hortikultura.

“Padi di Cilacap mengalami surplus hingga 300 ribu ton per tahun. Kabupaten Cilacap ini lumbung padinya Jawa Tengah. Sehingga jika Bendungan Matenggeng ini dibuat, maka akan menambah lahan kawasan persawahan irigasi



teknis yang sangat luar biasa. Produksi padi di Cilacap akan jauh meningkat. Bendungan ini juga bisa dikemas menjadi tujuan wisata, juga untuk menahan banjir, bahkan energi bersih dari PLTA. Sedangkan fly over Kroya juga semakin mendesak karena ini bisa mengurangi kemacetan, lantaran durasi perjalanan kereta api yang saat ini semakin tinggi,” jelas Wijaya.

Pemkab Cilacap juga memberikan usulan terkait Exit Tol/Simpang Susun dan Tiptol Gedebage-Cilacap. Usulan dilatarbelakangi oleh beberapa hal. Sesuai Perpres Nomor 109 tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Kabupaten Cilacap dilewati Trase Tol Gedebage-Cilacap dengan 2 exit tol yaitu IC Kaliputchang dan IC Sumingkir. Jarak Exit Tol Kaliputchang ke Perbatasan Jabar hanya 700 M. Dan trase tol sepanjang 34,35 km belum ada lokasi TIP (Tempat Istirahat dan Pelayanan).

Sebagai tindak lanjut, Pemkab Cilacap telah menerbitkan Surat Bupati Cilacap kepada Menteri PUPR Nomor 620/04154/37 tanggal 24 Juli 2020 tentang Usulan Perubahan Nama exit Tol Intersection dan TIP Tol Gedebage-Cilacap segmen Pangandaran-Cilacap. Pada surat tersebut diusulkan tiga hal. *Pertama*, perubahan nama Exit Tol dari IC Kaliputchang menjadi IC Patimuan, karena exit tol yang dimaksud secara administrasi masuk dalam Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap.

*Kedua*, pergeseran Intersection dari semula berada di Desa Sudamukti menjadi Desa Patimuan yang berada pada Ruas Nasional yang sama dengan Nomor Ruas Nomor 60 (Batas Jawa Barat – Patimuan – Sidareja) dengan pertimbangan agar masyarakat Kabupaten Cilacap di sekitar exit tol mendapat manfaat, khususnya pengembangan

ekonomi lokal (UMKM). Dan *ketiga*, pembangunan 2 buah Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) yang berlokasi di sisi utara trase jalan tol (Desa Bantarsari Kecamatan Bantarsari) dan di sisi selatan trase jalan tol (Desa Ujunggagak Kecamatan Kampung Laut).

Setelah dari Kantor Sekda Kabupaten Cilacap, Tim Asdep IPW Kemenko Marves yang didampingi utusan dari Bappeda Kab Cilacap dan Dinas PUPR Kab Cilacap meninjau langsung kondisi sejumlah proyek maupun calon proyek. Beberapa lokasi yang ditinjau antara lain yaitu proyek Water Break/Tanggul Pantai Cilacap, Kawasan Industri Cilacap (KIC), Jembatan Citanduy di sisi Cilacap, dan jalan JJLS (Jalur Jawa Lintas Selatan).

---

Lokasi Pembangunan Water Break atau Tanggul Pantai Cilacap, (14/12/2023).

Sumber: Asdep IPW Kemenko Marves



Pembangunan Water Break atau Tanggul Pantai Cilacap saat ini masih berlangsung. Pada 2020, abrasi Pantai Cilacap memang mulai mengkhawatirkan. Pada 11-26 Oktober 2021, gelombang ekstrem menyebabkan abrasi tanggul pantai di Pantai Kemiren, jebolnya tanggul pantai di Pantai Lengkong, dan kerusakan tambak. Terkait hal tersebut, pemerintah telah selesai melakukan penanganan darurat untuk lokasi Pantai Lengkong pada 10-18 Desember 2021. Pada 1 Agustus 2022, gelombang ekstrem menyebabkan abrasi tanggul semakin meluas di Lengkong, kerusakan tanggul buis beton dan tanggul darurat di Pantai Tegalkamulyan.

Terkait pembangunan Water Break ini, Pemkab Cilacap berharap nantinya sebagian lokasi Water Break ini bisa dikelola sedemikian rupa oleh pemerintah daerah. Ke depannya, tanggul pantai ini bisa dikemas menjadi destinasi wisata yang potensial. Namun mengingat saat ini status pengelolaan lahan sepenuhnya berada di TNI Angkatan Darat (TNI-AD), maka Pemkab Cilacap agak kesulitan untuk memanfaatkan lahan tersebut. Di sisi lain, TNI-AD juga kesulitan untuk mengelola, diantaranya karena mereka tidak memiliki anggaran khusus untuk mengelola.

Tidak jauh dari lokasi Water Break, Pemkab Cilacap juga tengah membangun Kawasan Industri Cilacap (KIC). KIC ini terletak di lokasi yang cukup strategis dan dikelilingi oleh industri strategis nasional. Letaknya hanya sekitar 12 km dari Pelabuhan Tanjung Intan, 12 km dari Bandara Tunggul Wulung, dan 11 km dari Exit Gate Tol Jeruklegi. Dengan demikian, dukungan infrastruktur jalan arteri, rencana jalan tol, pelabuhan, bandara, dan jalur kereta api sudah sangat mumpuni. Untuk progres KIC saat ini sudah





Asdep IPW Kemenko Marves, Djoko Hartoyo didampingi oleh Bappeda Kab Pangandaran dan Dinas PUPR Kab Pangandaran meninjau sejumlah titik lokasi pembangunan Break Water di Pesisir Pangandaran (19/12/2023).

Sumber: Asdep IPW Kemenko Marves



sekitar 82 hektare (ha) lahan dibebaskan, namun masih lebih dari 500 ha lainnya belum dibebaskan.

Kepala Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bappeda Kabupaten Cilacap, Imam Jauhari menyebut, sampai saat ini Pemkab Cilacap terus aktif mencari investor untuk KIC. Beberapa peninjauan sudah dilakukan, walaupun belum ada tindak lanjut lebih detail. Di sisi lain, telah ada kajian dari Politeknik Cilacap, bahwa Cilacap memiliki potensi perikanan (baik budidaya maupun perikanan tangkap), sehingga KIC ini bisa didesain guna menopang industri perikanan tersebut. KIC akan didesain untuk menjadi padat karya. Saat ini semua dokumen RC seperti DED, Amdal, Perzinan, dan lainnya sudah tersedia.

Perjalanan dilanjutkan ke Cilacap Utara, ke lokasi pembangunan Jembatan Citanduy 3, yang tidak jauh dari Jembatan Bendung Manganti. Kondisi Jembatan Bendung Manganti saat ini mulai mengalami kerusakan, over kapasitas, dan perlu pengamanan sebagaimana fungsinya, sehingga perlu dibuat jembatan baru diatas Sungai Citanduy agar konektivitas dan pergerakan masyarakat lancar. Terlebih Sungai Citanduy merupakan penghubung antara Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Pada 4 Januari 2023, dilaksanakan rapat terkait Pembahasan Rencana Pembangunan Jembatan Citanduy 3 dan Jembatan Bendung Manganti antara Kementerian PUPR (Direktur Pembangunan Jembatan Ditien Cipta Karya, BBP JN Jateng - DIY, BBP JN DKI Jakarta - Jaber, BBWS Citanduy), Pemkab Cilacap dan Pemkab Ciamis. Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa Pemkab Ciamis telah menyusun FS dan DED Jembatan Citanduy 3 dengan perkiraan bentang 80 m dan anggaran Rp 71,776 miliar, namun desain jembatan

ini perlu diasistensikan kepada Kementerian PUPR dan menunggu arahan dari Menteri PUPR.

Di sisi lain, Pemkab Cilacap dan Pemkab Ciamis juga perlu segera melakukan persiapan perencanaan pengadaan tanah akses jembatan. Rencananya, pengadaan tanah dilaksanakan pada tahun 2024. Dengan dibangunnya Jembatan Sungai Citanduy 3 ini, diharapkan aspek perekonomian antar dua kabupaten bisa meningkat, terjadinya aksesibilitas penghubung Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap, dan mengurangi kerusakan Bendung Manganti. Menurut Asdep IPW, Djoko Hartoyo, kunjungan ke beberapa lokasi yang menjadi titik proyek pengembangan wilayah dalam Perpres 79/2019 ini menjadi upaya mengoneksikan antara pembangunan Kab Cilacap



Asdep IPW Kemenko Marves meninjau lokasi pembangunan Jembatan Citanduy 3. Dengan dibangunnya Jembatan Sungai Citanduy 3 ini, diharapkan aspek perekonomian antar Kab Cilacap dan Kab Ciamis bisa meningkat dan mengurangi kerusakan Bendung Manganti.

Sumber: Asdep IPW Kemenko Marves

Asdep IPW Kemenko Marves, Djoko Hartoyo didampingi perwakilan dari Pemkab Ciamis dan Dinas PUPR Kab Ciamis meninjau titik-titik calon lokasi pembangunan Bendungan Matenggeng, (16/12/2023).

Sumber: Asdep IPW Kemenko Marves



di Jawa Tengah dengan Kab Ciamis dan Kab Pangandaran yang terletak di ujung Jawa Barat Bagian Selatan (Jabarsel).

Pada Sabtu, 16 Desember 2023, rombongan Tim Asdep IPW Kemenko Marves yang dipimpin oleh Asdep IPW Kemenko Marves, Djoko Hartoyo didampingi oleh perwakilan dari Pemkab Ciamis dan Dinas PUPR Kab Ciamis melakukan kegiatan monev di Kab Ciamis. Dipimpin oleh Bappeda Kab Ciamis dan dibersamai oleh perwakilan Dinas PUPR Kab Ciamis dan Bappeda Kab Ciamis, Asdep IPW Kemenko Marves meninjau langsung beberapa proyek strategis. Diantaranya calon lokasi pembangunan Bandungan Matenggeng di Desa Kaso; Jembatan Gantung Ciseel; dan lokasi pembangunan Jembatan Citanduy 3 dari sisi Kab Ciamis.

Di calon lokasi pembangunan Bendungan Matenggeng, Asdep IPW Kemenko Marves, Djoko Hartoyo, menegaskan bahwa Bendungan Matenggeng ini sudah diusulkan oleh daerah, baik dari Kab Cilacap maupun dari Kab Ciamis. Karena dua daerah tersebut yang nantinya menikmati



Kendaraan melintas di Jembatan Kaso yang menghubungkan Kab Ciamis dan Kab Cilacap, (16/12/2023). Di lokasi ini nantinya akan dibangun Bendungan Matenggeng untuk menambah lahan persawahan irigasi teknis dan meningkatkan produksi padi di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Sumber: Asdep IPW  
Kemenko Marves



dampak secara langsung dengan adanya bendungan tersebut, khususnya untuk menambah lahan persawahan irigasi teknis dan meningkatkan produksi padi. Kawasan bendungan juga bisa dikemas secantik mungkin menjadi tujuan wisata yang membangkitkan perekonomian di daerah.

Sedangkan untuk Jembatan Gantung Ciseel, Kemenko Marves akan mendorong agar bisa dibangun untuk menjadi lebih baik. Tanpa adanya Jembatan Gantung Ciseel tersebut, masyarakat harus memutar jauh, sehingga waktu tempuh antara dua desa menjadi lebih lama. Adapun Dinas PUPR Kab Ciamis sudah mengusulkan untuk pembangunan Jembatan Gantung Ciseel sepanjang 46 meter yang lebih layak, lebih aman, dan lebih bagus tentunya. Sedangkan Kemenko Marves akan mengawal usulan tersebut agar bisa direalisasikan segera.

Saat ini kondisi Jembatan Gantung Ciseel memang cukup mengkhawatirkan. Jembatan ini hanya tersusun

dari lilitan-lilitan kawat yang didesain sedemikian rupa menyerupai sling. Di atasnya lalu diisi dengan susunan bambu sebagai alas. Menurut Asdep Djoko, jembatan ini kurang aman karena kawat sewaktu-waktu bisa putus. Sedangkan keberadaan jembatan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat di dua desa, yaitu Desa Bojong Nangka Kec Purwadadi dan Desa Kertahayu Kec Pamarican di Kab Ciamis karena jembatan itulah yang menyambungkan dan memudahkan urusan mereka, mulai dari perdagangan, perekonomian, hingga pendidikan.

Medio Senin, 18 Desember 2023, Asdep IPW Kemenko Marves dan tim yang dipimpin oleh Asdep IPW Kemenko Marves, Djoko Hartoyo melanjutkan kegiatan monev terakhir di Kab Pangandaran. Dalam kegiatan lapangan tersebut, tim Kemenko Marves didampingi oleh perwakilan dari Pemkab Pangandaran, Dinas PUPR Kab Pangandaran, dan BBWS Citanduy. Dalam



Kondisi Jembatan Gantung Ciseel di Kab Ciamis yang cukup mengkhawatirkan. Jembatan ini tersusun dari lilitan-lilitan kawat yang didesain sedemikian rupa menyerupai sling. Di atasnya lalu diisi dengan susunan bambu sebagai alas.

Sumber:  
Asdep IPW Kemenko Marves

kunjungan tersebut hadir pula perwakilan dari Bappeda Kab Pangandaran. Tim meninjau langsung beberapa proyek strategis. Diantaranya titik-titik lokasi pembangunan Break Water di Pesisir Pangandaran; lokasi pengembangan pariwisata di sepanjang Pesisir Pangandaran; dan lokasi sedimentasi di beberapa titik desa.

Tim Kemenko Marves berkesempatan meninjau desa yang terdampak sedimentasi. Salah satunya adalah Desa Sukaresik. Keberadaan Desa Sukaresik semakin terancam lantaran desa ini menjadi muara dari tiga sungai yaitu Sungai Cikelewang, Sungai Citonjong, dan Sungai Cikembulan, plus mendapat sedimentasi dari laut, sehingga berimbas pada desa yang perlahan-lahan semakin dangkal. Sementara di beberapa desa lain, justru tergenang karena air dari hulu tidak mengalir ke hilir (laut). Kondisi demikian memerlukan

beberapa strategi, seperti perlunya penguatan tanggul sungai.

Menurut Asdep IPW Kemenko Marves, Djoko Hartoyo, pasir-pasir maupun tanah



Asdep IPW Kemenko Marves, Djoko Hartoyo meninjau Desa Sukaresik di Kab Pangandaran yang terancam sedimentasi air laut, (19/12/2023).

Sumber:

Asdep IPW Kemenko Marves

yang mengendap di Desa Sukresik, dan juga desa-desa lain yang terdampak sedimentasi ini perlu segera dikeruk, atau tanggulnya diperdalam. Dengan demikian, maka koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten mutlak harus dilakukan. Pemerintah pusat bisa mendukung dari sisi regulasi dan pendanaan. Pemprov bisa mendukung dari sisi penguatan tanggulnya. Sedangkan Pemkab bisa mengambil peran dalam membangun drainase yang baik dari rumah hingga ke sungai sampai laut.

Tim Kemenko Marves juga melihat pemanfaatan pasir laut untuk pembangunan Break Water. Break Water untuk melindungi pantai dari ombak ini didesain dengan meletakkan tetrapod di sisi terdepan. Tetrapod akan berfungsi memecah dan meredam ombak sehingga



Desa Sukaresik di Kab Pangandaran terancam sedimentasi karena menjadi muara dari tiga sungai yaitu Sungai Cikelewang, Sungai Citonjong, dan Sungai Cikembulan. Desa ini juga mendapat sedimentasi laut, sehingga berimbas pada desa yang perlahan-lahan semakin dangkal, (19/12/2023).

Sumber: Asdep IPW Kemenko Marves

wisatawan di sepanjang Pantai Pangandaran bisa lebih nyaman berwisata. Menurut Asdep IPW Kemenko Marves, Djoko Hartoyo, ujian sesungguhnya terhadap kekuatan dan eksistensi tetrapod ada di Januari dan Februari 2024, mengingat pada bulan tersebut adalah puncaknya ombak-ombak besar di sepanjang Pangandaran. Jika pemasangan tetrapod ini benar, maka tetrapod akan semakin kuat dan mengunci satu sama lain.

Lebih lanjut, Asdep IPW Kemenko Marves, Djoko Hartoyo menegaskan bahwa Kab Pangandaran memiliki potensi wisata yang cukup besar dan Kemenko Marves dengan sangat senang memfasilitasi daerah manapun yang mau maju. Terkait pengembangan wisata di Kab Pangandaran, aksesibilitas terutama akses udara dan darat perlu dipercepat. Jika nanti sudah ada tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap, maka waktu tempuh dari Cirebon ke Pangandaran bisa dipangkas menjadi hanya 2,5 jam saja.

Di sisi lain, kawasan Pangandaran ini merupakan daerah rawan bencana, yang memiliki potensi gempa tsunami, sehingga info terkait kebencanaan dan mitigasinya juga harus terus disosialisasikan ke masyarakat. Namun secara umum terkait dengan kegiatan monev dari Kab Cilacap hingga ke Kab Pangandaran ini, Asdep IPW Djoko Hartoyo mencatat bahwa pengembangan wilayah di Indonesia kerap terkendala di masalah lahan, RTRW dan RDTR. Maka kesiapan Pemda dalam menyiapkan lahan dan dokumen menjadi mutlak perlu dilakukan.